



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA Tahun 2025



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)) Kabupaten Toraja Utara merupakan wujud atas pertanggung jawaban kinerja pelaksanaan APBD tahun 2025 sebagai penjabaran RPJMD dan RKPD, sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)) Kabupaten Toraja Utara disusun dengan melakukan analisa terhadap 22 Sasaran Strategis yang uraiannya sbb :

- Misi 1 Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Sehat, dan Produktif terdiri dari 2 Sasaran dan dalam mencapai sasaran ini didukung oleh 8 program dengan anggaran sebesar Rp. 279,340,846,293.75
- Misi 2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan berkelanjutan terdiri dari 4 Sasaran dan dalam mencapai sasaran ini didukung oleh 20 program dengan anggaran sebesar Rp. 11,682,121,985.00
- Misi 3 Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang berkualitas untuk mendorong akselerasi pembangunan dari desa terdiri dari 6 Sasaran, dan dalam mencapai sasaran ini didukung oleh 9 program dengan anggaran sebesar Rp. 103,109,020,208.90
- Misi 4 Meningkatkan Kualitas Pemerintahan yang Bersih, Inovatif dan Melayani terdiri dari 3 Sasaran, dan dalam mencapai sasaran ini didukung oleh 12 program dengan anggaran sebesar Rp. 173,517,625,597.01
- Misi 5 Menciptakan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam, Adat dan Budaya serta Toleransi Antar Umat Beragama terdiri dari 7 Sasaran, dan dalam mencapai sasaran ini didukung oleh 12 program dengan anggaran sebesar Rp. 46,343,189,326.90

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja tahun 2025 sebelum dilakukan perubahan menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 15 sasaran yang telah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan Kabupaten Toraja Utara dalam RKPD tahun 2025. Kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2025 sebelum perubahan RPJMD dilihat dari beberapa Indikator dibawah ini, antara lain:

- a. Indeks Pembangunan Manusia 72,31 menjadi 73,24
- b. Indeks Pendidikan 65,77 menjadi 66,65
- c. Indeks Kesehatan 84,66 menjadi 84,98
- d. Angka Harapan Hidup 74 menjadi 75,24
- e. Indeks Reformasi Birokrasi 60,71 menjadi 64,88
- f. Nilai SAKIP Daerah 61,15 menjadi 61,95
- g. IKM 82,32 menjadi 84,74
- h. IPKD Belum Rilis
- i. PDRB/Kapita 47,73 menjadi 50,63
- j. Rasio Gini 0,316 menjadi 0,285
- k. Angka Kemiskinan 10,73 menjadi 10,05
- l. Indeks Daya Saing Infrastruktur 69,27 menjadi 56,39



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

- m. Skor Pola Pangan Harapan 75,40 menjadi 88,69
- n. Ketersediaan Energi/Kapita 1.819 menjadi 1.954
- o. Ketersediaan Protein/kapita 54 menjadi 61.30
- p. Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Angka 0,6082 menjadi 0.6101

Sementara Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja tahun 2025 setelah dilakukan perubahan RPJMD menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 22 sasaran yang telah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan Kabupaten Toraja Utara dalam RKPD tahun 2025. Kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2025 setelah perubahan RPJMD dilihat dari beberapa Indikator dibawah ini, antara lain:

- a. Indeks Pembangunan Manusia 73,24
- b. Rata-rata Lama Sekolah 8,72
- c. Harapan Lama Sekolah 13,53
- d. Usia Harapan Hidup 75,24
- e. Pertumbuhan Ekonomi 5,36
- f. Pendapatan Perkapita 50,63
- g. Tingkat Kemiskinan 10,05
- h. Rasio Gini 0,285
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka 2,01
- j. Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB 7,35
- k. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB 17,06
- l. Kontribusi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB 3,21
- m. Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil 3,8
- n. Indeks Ketahanan Pangan 75
- o. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 67,65
- p. Rasio Pajak dan Retribusi Terhadap APBD 5,09
- q. Tingkat Kemiskinan Ekstrem 0,49(2024)
- r. Indeks Layanan Infrastruktur 2,60
- s. Rasio Kemantapan Jalan 34,08
- t. Rasio Elektrifikasi Kabupaten 99.99
- u. Rasio Jaringan Irigasi 35,54
- v. Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan 60,77
- w. RT dengan Akses Sanitasi Layak 95,19
- x. Indeks Desa 0,6101
- y. Bumdes dengan Kategori Berkembang NA
- z. Lembang/Kelurahan yang Memiliki Akses Jaringan Internet 103
- aa. Indeks Reformasi Birokrasi 64,88
- bb. Nilai SAKIP 61,95
- cc. Indeks SPBE 2,3
- dd. Indeks Inovasi Daerah 44
- ee. Indeks Pelayanan Publik 2.30 (C-)
- ff. Persentase Lembang/Kelurahan yang Memiliki Lembaga Adat yang Aktif 100
- gg. Kelembagaan kebudayaan yang berperan dalam pemajuan kebudayaan daerah 70%
- hh. Kelembagaan Keagamaan yang efektif berfungsi 100
- ii. Indeks Ketimpangan Gender Belum Rilis



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

- jj. Persentase Wirausaha Muda 6,01
- kk. Persentase atlet kabupaten yang memperoleh peringkat dalam kejuaraan regional dan nasional 3,07
- ll. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 81,45
- mm. Penurunan Intensitas Emisi GRK 0
- nn. Indeks Kualitas Air 77,22
- oo. Indeks Kualitas Udara 89,89
- pp. Indeks Tutupan Lahan 73,45
- qq. Indeks Risiko Bencana 144,97
- rr. Konsumsi Listrik Perkapita Kwh/Jjiwa 296,55

Rantepao, Januari 2026
BUPATI TORAJA UTARA,

FREDERIK VICTOR PALIMBONG,S.T.,S.M.,M.Ak



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Pasang Lambe Kantor Gabungan Dinas dan Badan Panga' Kec. Tondon

Email : inspektoratdaerahtorajautara@gmail.com, inspektorattorajautara9@gmail.com FB: Inspektorat Toraja Utara, IG: @Inspektorat.kab.torajautara, WA: 085178211212, Kode Pos 91857

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Toraja Utara, 25 Maret 2026
Plt. Inspektur Kabupaten Toraja Utara



ANUGRAH YANUS RUNDUPADANG, S.E., M.M.

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b

NIP.: 197701032006041004



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum	1
1.3 Pertumbuhan Ekonomi	4
1.4 Bidang Kewenangan	7
1.5 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
1.6 Jumlah Aparatur Sipil Negara	12
1.7 Maksud dan Tujuan	12
1.8 Sistematika Laporan Kinerja	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026	15
2.1.1 Visi	15
2.1.2 Misi	15
2.1.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	17
2.1.4 Perjanjian Kinerja 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026	22
2.2 Rencana Strategis Tahun 2025-2029	25
2.2.1 Visi	25
2.2.2. Misi	26
2.2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	27
2.2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan 2025	42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	48
A. Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025	48
3.1 Capaian IKU Tahun 2025	48
3.2 Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara	50
B. Pengukuran Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029	92
3.1 Capaian IKU Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029	93
3.2 Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja tahun 2025 Perubahan	95
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	139
BAB IV PENUTUP	142



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan asas-asas umum penyelenggaraan Negara, meliputi : Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas. Asas Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah/kota dan menyampaikan pada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggung jawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik.

1.2. Gambaran Umum

1.2.1 Geografis

Kabupaten Toraja Utara termasuk wilayah dataran tinggi. Secara geografis letaknya antara 2° - 3° Lintang Selatan dan 119° - 120° bujur timur.

Kabupaten Toraja Utara dilewati oleh salah satu sungai terpanjang yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Sungai Saddang.

Jarak Ibu Kota Kabupaten Toraja Utara dengan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 329 Km yang melalui Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-Pare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep, dan Kabupaten Maros.



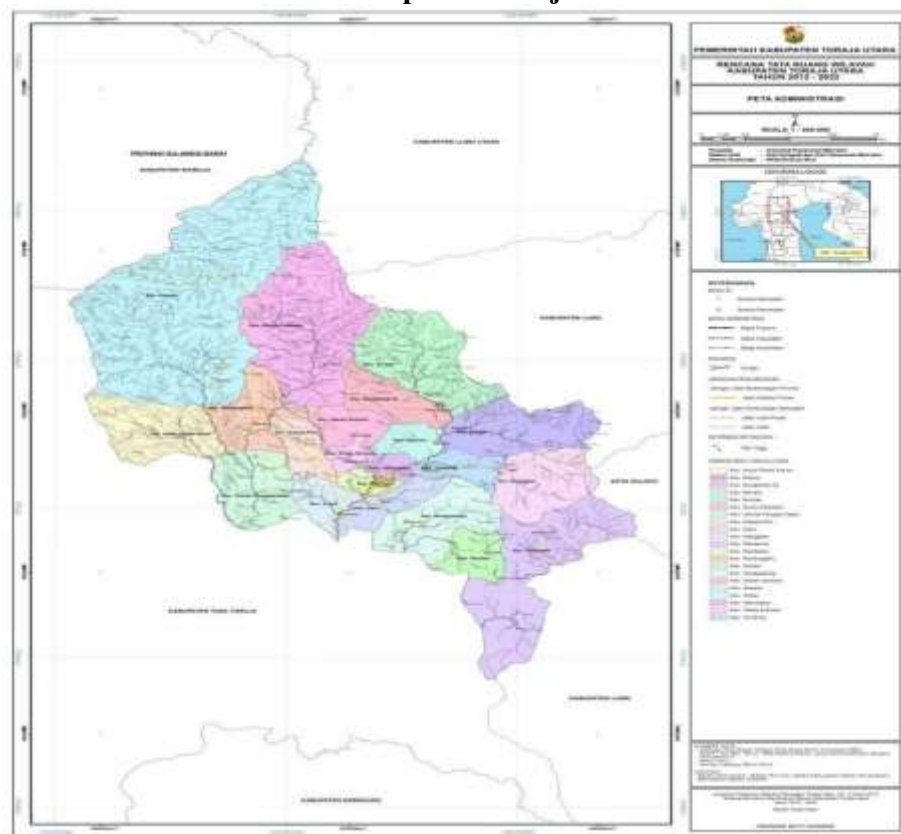
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Luas wilayah Kabupaten Toraja Utara tercatat 1.152,47 Km persegi yang meliputi 21 kecamatan. Kecamatan Baruppu' dan Kecamatan Buntupepasan merupakan 2 kecamatan terluas dengan luas masing-masing 162,17 dan 131,72 Km persegi atau luas kedua kecamatan tersebut merupakan 25,52 persen dari seluruh wilayah Toraja Utara.

Batas wilayah Kabupaten Toraja Utara adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Luwu dan Provinsi Sulawesi Barat
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kota Palopo
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Tana Toraja
- d. Sebelah Barat : Provinsi Sulawesi Barat

Gambar 1.1
Peta Kabupaten Toraja Utara



Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara secara administratif terbagi atas 21 Kecamatan, 40 Kelurahan, dan 111 Desa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Toraja Utara

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa
----	-----------	-----------	------



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

1.	Kecamatan Awan Rante Karua	-	4
2.	Kecamatan Balusu	2	5
3.	Kecamatan Bangkelekila'	-	4
4.	Kecamatan Baruppu'	1	3
5.	Kecamatan Buntao'	2	4
6.	Kecamatan Buntu Pepasan	1	12
7.	Kecamatan Dende' Piongan Napo	1	7
8.	Kecamatan Kapala Pitu	-	6
9.	Kecamatan Kesu'	2	5
10.	Kecamatan Nanggala	1	8
11.	Kecamatan Rantebua	2	5
12.	Kecamatan Rantepao	9	2
13.	Kecamatan Rindingallo	2	7
14.	Kecamatan Sa'dan	2	8
15.	Kecamatan Sanggalangi'	1	5
16.	Kecamatan Sesean	5	4
17.	Kecamatan Sesean Suloara'	-	5
18.	Kecamatan Sopai	1	7
19.	Kecamatan Tallunglipu	6	1
20.	Kecamatan Tikala	2	5
21.	Kecamatan Tondon	-	4
Jumlah		40	111

Sumber data : Kabupaten Toraja Utara dalam Angka 2025

1.2.2 Demografi

Penduduk Kabupaten Toraja Utara berdasarkan hasil registrasi penduduk Tahun 2025 berjumlah 268.717 jiwa yang tersebar di 21 Kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 29.063 jiwa mendiami Kecamatan Rantepao.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin perempuan, yang masing-masing 137.047 jiwa penduduk laki-laki dan 131.670 jiwa penduduk perempuan. Hal ini juga tercermin pada angka rasio jenis kelamin yang lebih besar dari 100, yaitu 104,3%, ini berarti dari setiap 100 orang perempuan terdapat 104 laki-laki.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Toraja Utara pada Tahun 2025 telah mencapai 229,40 jiwa/km persegi. Kecamatan terpadat terdapat di Kecamatan Rantepao, dengan tingkat kepadatan mencapai 2.775,02 jiwa/km persegi, sedangkan kecamatan yang tingkat kepadatannya paling rendah adalah Kecamatan Buntu Pepasan dan Baruppu', yaitu 47,12 jiwa/km persegi.

Profil sosial masyarakat dapat ditentukan oleh tingkat kepadatan penduduk suatu kabupaten atau wilayah. Namun demikian tingkat kepadatan yang ideal disuatu kabupaten tidak dapat ditentukan dengan pasti karena tergantung pada potensi yang dimiliki dan kemampuan penduduk di Kabupaten tersebut dalam memanfaatkan potensi yang ada. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menyadari bahwa ukuran kepadatan penduduk suatu



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

kabupaten akan lebih bermakna bila dikaitkan dengan potensi kabupaten dan kondisi penduduk antar kecamatan di Kabupaten Toraja Utara yang bervariasi.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2025

No	Kecamatan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Awan Rante Karua	5.667	5.667	5.905	5.987	6.080
2	Balusu	8.163	8.163	8.341	8.397	8.459
3	Bangkelekila'	9.314	9.314	7.934	8.102	8.110
4	Baruppu'	7.864	7.864	7.251	7.337	7.355
5	Buntao'	11.893	11.893	11.197	11.377	11.456
6	Buntu Pepasan	14.940	14.940	14.311	14.778	15.015
7	Dende' Piongan Napo	9.178	9.178	9.108	9.308	9.333
8	Kapala Pitu	7.110	7.110	7.279	7.387	7.479
9	Kesu'	19.753	19.753	19.504	19.899	20.137
10	Nanggala	10.518	10.518	10.257	10.304	10.357
11	Rantebua	9.196	9.196	8.878	8.985	9.038
12	Rantepao	28.757	28.757	28.231	29.073	29.063
13	Rinding Allo	9.378	9.378	9.370	9.466	9.490
14	Sa'dan	19.370	19.370	18.987	19.298	19.633
15	Sanggalangi'	13.532	13.532	13.765	14.080	14.125
16	Sesean	13.712	13.712	13.396	13.558	13.599
17	Sesean Suloara'	7.019	7.019	7.170	7.244	7.340
18	Sopai	16.098	16.098	16.142	16.409	16.623
19	Tallunglipu	20.976	20.976	19.965	20.456	20.681
20	Tikala	12.662	12.662	12.677	12.891	13.012
21	Tondon	13.098	13.098	11.981	12.177	12.332
Kabupaten		264.145	268.198	261.652	266.513	268.717

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara 2025

1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam melihat perkembangan pembangunan ekonomi daerah. Ukuran ini digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian, selain itu indikator ini sesungguhnya memberikan indikasi tentang sampai sejauh mana aktifitas perekonomian selama periode tertentu yang telah menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.

Gejala tersebut tersirat dalam rangka pertumbuhan output, karena pada dasarnya aktivitas ekonomi adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, yang pada gilirannya proses ini akan menghasilkan aliran balas jasa faktor-faktor produksi yang dikuasai masyarakat. Dengan demikian adanya



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat yang menguasai faktor-faktor produksi juga meningkat.

Nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan merupakan dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi, dengan demikian angka pertumbuhan yang diperoleh semata-mata mencerminkan pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) riil yang dihasilkan oleh aktifitas perekonomian suatu daerah/wilayah pada periode tertentu.

Penggunaan atas dasar harga konstan dimaksudkan untuk menghindari pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan riil ekonomi.

Sejak terbentuknya Kabupaten Toraja Utara Tahun 2008, Perekonomian Toraja Utara cukup baik dengan angka pertumbuhan tiap tahunnya meningkat cukup besar. Adapun perkembangan PDRB dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.3
Pertumbuhan PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan dan PDRB Toraja Utara
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2025 (%)

Tahun	PDRB Sul-Sel	PDRB Toraja Utara
2021	4,64	4,05
2022	5,1	5,27
2023	4,51	3,94
2024	5,02	4,49
2025	5,43	5,36

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Dilihat dari Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha selama periode tahun 2021-2025, Perekonomian Kabupaten Toraja Utara juga menunjukkan peningkatan yang positif, tetapi pada kurun waktu 2023 sampai dengan 2024 mengalami perlambatan karena perlambatan lapangan pekerjaan tidak banyak terbuka.

Tabel 1.4
Laju Pertumbuhan
PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2025

Lapangan Usaha/Industry		2021	2022	2023	2024	2025
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	5,76	5,74	1,82	1,86	7,14
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	3,02	-1,91	3,36	3,70	2,62
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	5,6	10,94	2,72	3,50	7,38



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	4,49	3,22	6,23	4,47	3,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water Supply, Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	2,61	14,43	4,76	6,13	0,9
F	Konstruksi/ <i>Contructions</i>	-0,03	1,02	3,43	-0,14	3,7
G	Pengadaan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	4,82	5,56	5,36	5,44	4,86
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	6,19	11,37	10,21	5,46	5,81
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	5,07	14,64	8,59	3,95	4,55
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	5,86	5,81	3,58	6,32	4,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	7,02	4,00	-0,85	5,65	11,09
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	2,66	1,18	2,09	5,77	7,47
M, N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	3,01	15,52	11,48	-0,51	3,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence, Compulsory Social Security</i>	4,31	3,71	3,04	12,85	2,89
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	1,43	1,83	2,37	5,9	3,31
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	1,06	6,35	6,09	4,78	5,06
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	4,72	11,24	10,38	8,3	5,35
Produk Domestik Bruto/<i>Gross</i>		4,05	4,05	3,94	4,49	4,49

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Lapangan usaha yang memperlihatkan kontribusi trend cenderung meningkat setiap tahunnya pada periode 2021-2025 adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian, lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi, lapangan usaha real estate. Sedangkan lapangan usaha yang memperlihatkan kontribusi trend menurun periode tahun 2021-2025 adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha pengadaan listrik dan gas.

Indikator lain yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro adalah PDRB perkapita yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik.

Tabel 1.5
Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2025

Tahun	NILAI PDRB (Milliar)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan
2021	10.344,30	5.357,13
2022	11.311,31	5.639,38
2023	12.307,76	5.861,32
2024	13.257,86*	6.124,34*
2025	14.288,46**	6.452,38**

Sumber ; BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Ket : * Angka Sementara

**** Angka sangat sementara**

PDRB atas harga konstan menunjukkan peningkatan yang sama dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, nilai capaian berada pada posisi RP. 14.288,46 juta dan pada tahun 2025 meningkat menjadi Rp. 6.452,38 Milliar, selanjutnya PDRB Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada table 1.5

Dilihat dari table diatas, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Toraja Utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

1.4 Bidang Kewenangan

Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara, bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Kabupaten Toraja Utara terdiri atas Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Bukan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintah Pilihan dan Urusan Penunjang.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Tabel 1.6
Urusan Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara

N O	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BUKAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PENUNJANG
1	Pendidikan	Tenaga Kerja	Kelautan dan Perikanan	Penunjang Administrasi Pemerintahan
2	Kesehatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pariwisata	Penunjang Pengawasan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pangan	Pertanian	Penunjang Perencanaan
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pertanahan	Kehutanan	Penunjang Keuangan
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Lingkungan Hidup	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penunjang Kepegawaian
6	Sosial	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perdagangan	
7		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perindustrian	
8		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Transmigrasi	
9		Perhubungan		
10		Komunikasi dan Informatika		
11		Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		
12		Penanaman Modal		
13		Kepemudaan dan Olah Raga		
14		Statistik		
15		Persandian		



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

16		Kebudayaan		
17		Perpustakaan		
18		Kearsipan		

1.5 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Adapun Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1.5.1 Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, fungsi dari Sekretariat Daerah mencakup:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Apatur Sipil Negara dan instansi daerah
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

Sekretaris Daerah

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan
 - 3) Bagian Hukum
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - 1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan
 - 3) Bagian layanan Pengadaan Barang/Jasa
3. Asisten Administrasi Umum
 - 1) Bagian Organisasi
 - 2) Bagian Umum dan Protokol
 - 3) Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 4) Staf Ahli
 - 5) Kelompok Jabatan Fungsional

1.5.2 Sekretariat DPRD



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD

Adapun struktur organisasi sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat DPRD
2. Bagian Umum
3. Bagian Keuangan
4. Bagian Persidangan dan Produk Hukum

1.5.3 Dinas-Dinas Daerah

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Teknis Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah ini melaksanakan tugas dan fungsi operasional untuk bidang-bidang tertentu.

Jumlah dinas yang ada di Kabupaten Toraja Utara ada 22 dengan rincian sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
5. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6. Dinas Sosial
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
14. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19. Dinas Pertanian

1.5.4 Badan-Badan dan Inspektorat



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Badan sebagai Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur. Badan-Badan Daerah di Kabupaten Toraja Utara berjumlah 6 (enam) dan Inspektorat 1 (satu) dengan rincian sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah
3. Badan Pendapatan Daerah
4. Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7. Inspektorat Kabupaten

1.5.5 Kecamatan

Kecamatan merupakan perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Organisasi kecamatan terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Perekonomian
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pembangunan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Jumlah kecamatan di Kabupaten Toraja Utara ada 21 kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kecamatan Awan Rante Karua
2. Kecamatan Balusu
3. Kecamatan Bangkelekila'
4. Kecamatan Baruppu'
5. Kecamatan Buntao'
6. Kecamatan Buntu Pepasan
7. Kecamatan Dende' Piongan Napo
8. Kecamatan Kapala Pitu
9. Kecamatan Kesu'
10. Kecamatan Nanggala
11. Kecamatan Rantebua
12. Kecamatan Rantepao
13. Kecamatan Rinding Allo
14. Kecamatan Sa'dan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

15. Kecamatan Sanggalangi'
16. Kecamatan Sesean
17. Kecamatan Sesean Suloara'
18. Kecamatan Sopai
19. Kecamatan Tallunglipu
20. Kecamatan Tikala
21. Kecamatan Tondon

1.6 Jumlah Aparatur Sipil Negara

Salah satu instrument penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparat Sipil Negara di lingkungan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 sesuai dengan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Toraja Utara sebanyak **7.039** orang.

Tabel 1.7
Jumlah Aparat Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	JUMLAH	
		PNS	PPPK
1	SD/Sederajat	1	21
2	SLTP/Sederajat	6	34
3	SLTA/Sederajat	182	894
4	Diploma I/II/III/IV	280	711
5	Strata I, Strata II, Doktor	2655	2255
	Total	3124	3915

Sumber : BKPSDM Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

1.7 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini memberikan tuntunan kepada semua instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari sistem AKIP bagi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Pemerintah Kabupaten untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem kinerja diawali dengan penyusunan Rencana Strategik yang mendefenisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem Pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* (Gubernur, DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja oleh setiap instansi Pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 mencakup hal-hal berikut ini :

- Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2025 sebagai sarana pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten Toraja Utara atas capaian kinerja yang diperoleh selama tahun tersebut. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama Tahun 2025.
- Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2025 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Kabupaten Toraja Utara bagi upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.8 Sistematika Laporan Kinerja

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara selama Tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) 2025 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini.

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------|--|
| Bab I | Pendahuluan Gambaran Umum, menjelaskan secara ringkas profil Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja 2025 ini |
| Bab II | Perencanaan Kinerja, mendeskripsikan perencanaan jangka menengah dan rencana kinerja untuk Tahun 2025 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

- Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran stratejik Tahun 2025
- Bab IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

RPJMD Kabupaten Toraja Utara 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan dan program pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.1.1 Visi

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi Pemerintah harus dibawah dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi Pemerintah. Oleh karenanya untuk membangun Kabupaten Toraja Utara yang lebih baik di masa mendatang pada RPJMD tahun 2021-2026 memberi prioritas pada upaya untuk mengatasi permasalahan antara lain :

- Kesehatan
- Pendidikan
- Penciptaan Lapangan Kerja
- Pelestarian dan Penyelamatan Lingkungan
- Mengantisipasi Perubahan yang terjadi di masa yang akan datang.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, serta adat dan budaya masyarakat Kabupaten Toraja Utara maka visi yang hendak dicapai dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TORAJA UTARA YANG MANDIRI,
BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING”**

2.1.2 Misi

Dalam rangka perwujudan visi tersebut, maka perlu dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak. Maka rumusan misi Kabupaten Toraja Utara yaitu :

- **Misi 1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan**
- **Misi 2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**
- **Misi 3 Meningkatkan Daya Saing Pariwisata**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

- **Misi 4 Reformasi Birokrasi**
- **Misi 5 Penguatan Pertumbuhan Ekonomi**
- **Misi 6 Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur**
- **Misi 7 Mewujudkan Kedaulatan Pangan**
- **Misi 8 Pembinaan Prestasi Pemuda**
- **Misi 9 Pemberdayaan Masyarakat**
- **Misi 10 Pengendalian Penyakit Sosial Masyarakat**
- **Misi 11 Meningkatkan Kapasitas Lembaga Keagamaan**

Makna Pokok yang terkandung dalam Misi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tersebut, antara lain **Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang didukung partisipasi masyarakat**, adalah wujud hubungan yang bersifat simbiosis mutualistik antara Pemerintah, swasta dan masyarakat dan merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan perkembangan kebutuhan nyata dan perubahan lingkungan strategis yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Toraja Utara. Oleh karena itu manajemen Pemerintahan yang baik dan bijak harus berdasarkan pada nilai-nilai manajemen modern sebagai berikut :

a. Efisiensi dan Efektifitas

Persoalan mendasar yang dihadapi dalam era otonomi dan globalisasi adalah kelangkaan sumber daya, dana, waktu dan kelangkaan kualitas terbaik sumber daya manusia/aparatur, mengoptimalkan berbagai sarana kerja untuk mencapai sasaran kerja dan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu tidaklah berlebihan bahwa efisiensi dan efektifitas menjadi suatu nilai utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

b. Profesional dan Transparan

Setiap aparat birokrasi sesungguhnya adalah seorang profesional terlepas apakah pelaksana teknis operasional ataupun pejabat yang menduduki jabatan puncak pada suatu unit kerja. Profesionalisme adalah upaya sistematis, terprogram dan secara kontinyu memutakhirkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya.

Sejalan dengan profesionalisme, keterbukaan (transparansi) dalam menjalankan profesinya dalam arti kata bahwa dalam interaksinya dengan masyarakat, pemenuhan kewajiban dan perolehan hak harus secara jujur adil, bertanggung jawab dan tetap konsisten dengan pemberantasan KKN serta diterapkan secara konsekuen.

c. Antisipatif, Responsif, dan Inovatif

Selain organisasi dan aparat Pemerintah harus responsif (tanggap) terhadap kebutuhan masyarakat, lebih dari itu diperlukan adanya sikap yang antisipatif, yang mampu memberikan jawaban atau solusi terhadap berbagai kemungkinan munculnya berbagai permasalahan. Pemerintahan yang responsif dan antisipatif sesungguhnya belum mampu menjawab berbagai tantangan eksternal maupun masalah internal, namun diperlukan sikap yang kreatif dan inovatif.

d. Orientasi Pelayanan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Tugas utama Pemerintah dalam era otonomi adalah memfasilitasi, menyusun regulasi berbagai aktifitas masyarakat sehingga tetap berada dalam koridor hukum dan norma yang berlaku. Fungsi utama memberikan pelayanan terbaik (prima) untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya aktivitas masyarakat.

Untuk memenuhi tema tersebut, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara mencanangkan 4 (empat) prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional daerah sebagai berikut :

- 1) Pengarusutamaan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan partisipasi dan mendorong masyarakat dalam arti luas, yang artinya para pejabat pengelola program kegiatan pembangunan dituntut peka terhadap aspirasi masyarakat. Dengan demikian akan tumbuh rasa memiliki yang pada gilirannya mendorong masyarakat berpartisipasi secara aktif.
- 2) Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan dituntut untuk mempertimbangkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kondisi lingkungan dan sumber daya alam harus dikelola agar pembangunan dapat memberikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dari generasi ke generasi.
- 3) Pengarusutamaan gender. Pada hakekatnya hak-hak asasi manusia tidak membedakan perempuan dan laki-laki. Strategi pengarusutamaan gender ditujukan untuk mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Oleh karena itu perempuan dan laki-laki menjadi mitra yang sederajat dan memiliki akses, kesempatan dan manfaat dari pembangunan yang adil dan setara.
- 4) Pengarusutamaan pengelolaan yang baik. Tata pengelolaan meliputi berbagai faktor kelembagaan dan organisasi yang mempengaruhi pembentukan kebijakan baik pemerintahan maupun masyarakat, khususnya kelompok usaha. Dengan tata pengelolaan yang baik harus melandasi pelaksanaan berbagai program kegiatan pembangunan di mana pemerintahan dan perusahaan akan berjalan secara efisien dan efektif.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya yang saling terkait. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

Visi

Terwujudnya Masyarakat Toraja Utara yang Mandiri, Berbudaya dan Berdaya Saing

Misi 1

Meningkatkan Kualitas Pendidikan, meliputi:



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan	Meningkatnya derajat pendidikan dan literasi masyarakat	Memenuhi sarana/prasarana dan tenaga pendidikan diiringi dengan penyadaran masyarakat atas pentingnya pendidikan dan literasi

Misi 2

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, meliputi:

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Memenuhi sarana/prasarana dan tenaga kesehatan serta pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat

Misi 3

Meningkatkan Daya Saing Pariwisata, meliputi:

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan daya saing destinasi wisata	Meningkatnya daya tarik pariwisata	Mengembangkan daya tarik destinasi wisata secara proporsional dengan fasilitas ekonomi wilayah dan perilaku sadar wisata masyarakat

Misi 4

Reformasi Birokrasi, meliputi:

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi	- Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah - Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan akuntabilitas, peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

	3. Meningkatnya kinerja pengelolaan perencanaan dan keuangan daerah	memperhatikan sasaran reformasi birokrasi yaitu : 1). Bersih dan Akuntabel 2). Efektif dan efisien memiliki pelayanan publik yang berkualitas 2. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan akuntabilitas, peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan sasaran Reformasi Birokrasi yaitu 1). Bersih dan akuntabel; 2). Efektif dan efisien;dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas 3. Perbaikan sistem dan pemenuhan standar dokumen perencanaan dan keuangan dengan dukungan SDM dan sarana/prasarana yang sesuai
--	---	---

Misi 5

Penguatan Pertumbuhan Ekonomi, meliputi:

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata	1. Meningkatkan kualitas pertumbuhan sektor-sektor perekonomian daerah	1. Mengoptimalkan kemajuan teknologi dan sarana produksi serta mendorong regenerasi petani dalam peningkatan produktivitas komoditas unggulan secara resilien



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

	2. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja 3. Berkurangnya kemiskinan daerah	2. Mengoptimalkan perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat dan penguatan UMKM seiring dengan pengurangan beban pengeluaran orang miskin 3. Mengoptimalkan perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat dan penguatan UMKM seiring dengan pengurangan beban pengeluaran orang miskin
--	---	---

Misi 6

Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur, meliputi:

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Meningkatkan aksesibilitas dan keterpenuhan infrastruktur yang berkualitas dengan mengarusutamakan peningkatan kualitas SDM kontruksi

Misi 7

Mewujudkan Kedaulatan Pangan, meliputi:

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kemandirian pangan masyarakat	Terpenuhinya kebutuhan pangan utama masyarakat	Meningkatkan produktivitas, diversifikasi dan keamanan produk pangan secara konsisten dengan pemeliharaan lahan pangan berkelanjutan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Misi 8

Pembinaan Prestasi Pemuda, meliputi:

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	Meningkatnya prestasi pemuda	Memberdayakan organisasi pemuda untuk partisipasi dalam pembangunan dan prestasi olahraga

Misi 9

Pemberdayaan Masyarakat, meliputi:

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan lembang (desa)	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi lembang (desa)	Memperkuat pemerintahan lembang, pembangunan lembang, pemberdayaan masyarakat lembang dan kemasyarakatan lembang dalam mendukung ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi lembang

Misi 10

Pengendalian Penyakit Sosial Masyarakat, meliputi:

Tujuan	Sasaran	Strategi
Mengurangi penyakit sosial dalam masyarakat	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum	Mendorong keswadaya masyarakat dalam memelihara ketertiban dan ketentraman secara kolaborasi multipihak dalam mencegah pengurangan angka kriminalitas masyarakat

Misi 11

Meningkatkan Kapasitas Lembaga Keagamaan, meliputi:

Tujuan	Sasaran	Strategi
--------	---------	----------



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Meningkatkan intensitas kegiatan lembaga keagamaan	Berkembangnya kehidupan beragama dalam masyarakat	Menguatkan peranan organisasi keagamaan dalam menggiatkan aktivitas keagamaan
--	---	---

Sebagai dasar pelaksanaan program dalam kegiatan tahun 2025 percepatan kinerja yang termuat dalam RKPD tahun 2025 Pemda Kabupaten Toraja Utara menetapkan program prioritas dengan memperhatikan perubahan kondisi lingkungan strategis daerah, kondisi organisasi, tema pembangunan Kabupaten Toraja Utara, serta dokumen acuan perencanaan lainnya.

Program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara lebih ditekankan pada kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi pemerintah dengan tetap memperhatikan paradigma baru pembangunan yang berbasis pada manusia dan komunitas dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana kinerja 2025 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD Tahun 2021-2026, hasil evaluasi atas pelaksanaan yang dicapai pada tahun 2025, maka prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2025 merupakan tahun ke empat dari RPJMD Kabupaten Toraja Utara. Tema umum pembangunan tahun ini adalah **Pembangunan Kebudayaan dan Peningkatan Daya Saing Pariwisata**, kebijakan pembangunan tahun 2025 diarahkan kepada :

- (1) Penegakan disiplin bagi siswa;
- (2) Peningkatan kompetensi tenaga medis dan para medis;
- (3) Promosi potensi pariwisata secara local, regional, dan nasional ;
- (4) Penguatan system pengawasan internal pada kapabilitas APIP;
- (5) Optimalisasi system pengawasan internal pemerintah daerah;
- (6) pengembangan pusat kerajinan rakyat;
- (7) penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga;
- (8) Penataan sarana/prasarana taman jalan protocol dan ruang terbuka hijau;
- (9) Pengembangan perikanan berbasis kolam dan minapadi;
- (10) Pembinaan kepramukaan dan karang taruna
- (11) Penguatan Badan Usaha Milik Lembang;
- (12) Penegakan Produk Hukum Daerah dan kesadaran hukum masyarakat;
- (13) Pemeliharaan toleransi kehidupan beragama.

2.1.4 Perjanjian Kinerja 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan sesuai agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Didalam Rencana Kerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025.

Dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya.

Adapun Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Pendidikan				
1	Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,23
2	Meningkatkan Derajat Pendidikan dan Literasi Masyarakat	Indeks Pendidikan	Indeks	65,64
Misi 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat				
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	84,43
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Angka Harapan Hidup	%	73,94
Misi 3 : Meningkatkan Daya Saing Pariwisata				
1	Meningkatkan Daya Saing Destinasi Wisata	Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata Terhadap Total PAD	%	8,00
2	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	45,00
Misi 4 : Reformasi Birokrasi				
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	Nilai	69,02 (B)
2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Daerah	Nilai	69,00 (B)
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM	Indeks	83,99



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

4	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan Daerah	IPKD	Indeks	82
Misi 5 : Penguatan Pertumbuhan Ekonomi				
1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Merata	PDRB/kapita (Rp. Juta)	Rupiah	45,03
		Rasio Gini	%	0,366
2	Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Sektor-sektor Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	6-7,5
3	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,60
4	Berkurangnya Kemiskinan Daerah	Angka Kemiskinan (%)	%	11,36
Misi 6 : Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur				
1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Indeks	76,62
		Indeks Resiko Bencana	Indeks	149,6
Misi 7 : Mewujudkan Kedaulatan Pangan				
1	Meningkatkan Kemandirian Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	88,19
2	Terpenuhinya Pangan Utama Masyarakat	Ketersediaan Energi Perkapita (kkal//kapita/hari)	%	2328,53
		Ketersediaan Protein Perkapita (gram/kapita/hari)	%	67,59
Misi 8 : Pembinaan Prestasi Pemuda				
1	Meningkatkan Peran Pemuda Dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	0,72
2	Meningkatnya Prestasi Pemuda	Persentase Peningkatan Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional	%	2,06
Misi 9 : Pemberdayaan Masyarakat				
1	Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Lembang (Desa)	Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten	%	0,6020
2	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Ekologi Lembang (Desa)	Persentase Lembang Kualifikasi Maju	%	2,70
Misi 10 : Pengendalian Penyakit Sosial Masyarakat				



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

1	Mengurangi Penyakit Sosial Dalam Masyarakat	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	%	3,20
2	Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	%	92
Misi 11 : Meningkatkan Kapasitas Lembaga Keagamaan				
1	Meningkatkan Intensitas Kegiatan Lembaga Keagamaan	Cakupan Kegiatan Lembaga Keagamaan	%	100%
2	Berkembangnya Kehidupan Beragama Dalam Masyarakat	Cakupan Kegiatan Lembaga Keagamaan yang Dibina	%	100%

2.2 Rencana Strategis Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Toraja Utara 2025-2029 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan dan program pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.2.1 Visi

Visi RPJMD Kabupaten Toraja Utara merupakan rumusan umum mengenai keadaan atau kondisi daerah yang ingin dicapai selama kurun 5 (lima) tahun perencanaan sampai dengan Tahun 2029. Visi RPJMD Tahun 2025-2029 disusun selaras dengan RPJPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029, dengan memperhatikan masalah utama dan isu strategis pembangunan daerah serta menyerap aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Rumusan Visi RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029 adalah :

“TORAJA UTARA MAJU, MAKMUR DAN MENYENANGKAN MENUJU INDONESIA EMAS”

Berdasarkan visi diatas, ada tiga pokok visi yang ingin diwujudkan pada akhir periode RPJMD, Tahun 2029. Visi ini diharapkan dapat dicapai dengan kolaborasi yang apik diantara semua pemangku kepentingan daerah, baik dari pihak pemerintah, dunia usaha dan masyarakat umum. Adapun penjelasan atas tiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Maju adalah kondisi kehidupan masyarakat yang mampu berdaya saing dikancah domestik, regional maupun global, berketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global, serta pembangunan sosial yang berkeadilan dan merata dan berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan. Kondisi maju ini juga ditandai oleh layanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial yang lebih berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah secara merata, berkeadilan dan inklusif. Kondisi Maju juga ditandai dengan pencapaian pencapaian di bidang ekonomi, diantaranya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terbukanya lapangan kerja, menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatnya pendapatan masyarakat.

Makmur adalah kondisi kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera, khususnya dari sisi pembangunan infrastruktur antar wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan antar wilayah.

Menyenangkan adalah masyarakat Toraja Utara yang berakhlak, berbudaya dan religius, menguatnya sifat dan sikap positif serta moral yang tinggi dalam kehidupan keluarga, komunitas dan masyarakat luas, menerapkan kearifan budaya lokal dan nilai-nilai agama secara konsisten dalam seluruh aspek kehidupan, menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, kejujuran, kesetaraan keadilan, akhlak, adab dan sopan santun. Menyenangkan juga ditandai dari terjaganya kualitas lingkungan hidup serta menguatnya ketahanan energi, air dan pangan (Ekonomi Hijau dan Biru) yang didukung oleh Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang lebih berintegritas, adaptif dan responsive berbasis digital.

2.2.2. Misi

Misi dalam RPJMD ini dipahami sebagai upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan Tahun 2029. Sejalan dengan transformasi yang menjadi pendekatan pembangunan nasional, upaya umum tersebut bersifat menggerakkan perubahan secara transformative, bukan sekedar evolusi ataupun reformasi. Transformasi dilakukan agar Toraja Utara berkontribusi secara signifikan terhadap tercapainya cita-cita nasional untuk menuju Indonesia Emas dan cita-cita Sulawesi Selatan untu Maju dan Berkarakter.

1. Misi 1 Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Sehat, dan Produktif.
2. Misi 2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan
3. Misi 3 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas untuk Mendorong Akselerasi Pembangunan dari Desa
4. Misi 4 Meningkatkan Kualitas Pemerintahan yang Bersih, Inovatif dan Melayani
5. Misi 5 Menciptakan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam, Adat dan Budaya Serta Toleransi Antar Umat Beragama.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

2.2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya yang saling terkait. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

Visi

“TORAJA UTARA MAJU, MAKMUR DAN MENYENANGKAN MENUJU INDONESIA EMAS”

MISI I

Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Sehat, dan Produktif.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	1. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif	Strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif, meliputi : 1. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai hingga ke wilayah pelosok, termasuk penyediaan sarana transportasi dan kelayakan sarana prasarana lingkungan belajar termasuk wc, air bersih, sanitasi dan higienis 2. Perluasan program beasiswa untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kelompok rentan. 3. Dukungan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui layanan pendidikan inklusif 4. Pemerataan tenaga guru yang menjangkau wilayah sulit akses dengan memberikan tunjangan khusus 5. Penguatan pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan. 6. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan berbasis kinerja 7. Pengembangan pembelajaran digital (e-learning) dan penyediaan perangkat TIK di sekolah. 8. Penguatan literasi digital bagi guru dan peserta didik 9. Penyediaan akses informasi dan fasilitasi



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

		kemudahan layanan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi, terutama bagi masyarakat miskin yang masih kurang akses informasinya Pengembangan pendidikan vokasi yang link and match dengan dunia usaha dan industri (DUDI). 11. Fasilitasi pemagangan siswa sekolah vokasi dengan dunia usaha dan industri (DUDI) 12. Penyediaan sarana belajar kreatif bagi anak usia dini, usia sekolah dasar dan menengah melalui Taman Pintar 13. Pengembangan fasilitas penyediaan layanan Pendidikan I tahun pra sekolah (Pendidikan anak usia dini) dengan melibatkan peran aktif pihak terkait secara holistic dan integrative, termasuk integrasi layanan PAUD nonformal ke dalam kegiatan Posyandu Era Baru melalui kegiatan stimulasi dini 14. Peningkatan literasi dan kegemaran membaca di lingkungan Pendidikan formal dan non formal 10. Pengembangan minat dan budaya baca di Masyarakat sejak dini
	2. Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata	Strategi untuk peningkatan kualitas kesehatan secara merata meliputi : 1. Penguatan layanan kesehatan primer melalui pembangunan/perbaikan gedung/fasilitas layanan, serta peningkatan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas, Posyandu, dan klinik kesehatan 2. Penyediaan tenaga kesehatan yang merata dan proporsional, termasuk di daerah sulit akses 3. Peningkatan ketrampilan dan kesejahteraan tenaga kesehatan, dokter, dan kader kesehatan, termasuk penyediaan beasiswa khusus bagi tenaga kesehatan Penguatan kapasitas dan akreditasi fasilitas layanan kesehatan 5. Peningkatan cakupan dan jangkauan jaminan kesehatan masyarakat 6. Fasilitasi kemudahan akses layanan kesehatan bagi masyarakat melalui penyediaan Armada Sehat untuk antar jemput pasien dan pemberian uang saku bagi pasien



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

		kurang mampu yang dirujuk ke luar daerah 7. Intensifikasi kampanye perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), imunisasi, dan skrining penyakit tidak menular. 8. Peningkatan peran kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan lembaga lokal dalam pencegahan penyakit. 9. Optimalisasi Posyandu sebagai pusat edukasi gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pencegahan stunting dan gizi buruk melalui pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi, peningkatan pelayanan Kesehatan bayi dan balita dengan meningkatkan sinergi antara pemerintah, swasta, Masyarakat, pendamping keluarga dan seluruh stakeholder lainnya dengan melibatkan posyandu Era Baru berbasis data akurat dan sesuai dengan kebutuhan; 10. Pengembangan layanan kesehatan digital (telemedicine) untuk menjangkau masyarakat di daerah sulit akses 11. Penguatan kerjasama fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta dengan perangkat daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan anak lahir pulang bawa akta lahir 12. Pengembangan sisten insentif kepada Masyarakat dan pihak terkait sebagai stimulan dalam Upaya percepatan pencegahan penyakit menular dan tidak menular serta penanganan stunting dan gizi buruk;
		1. penyakit menular dan tidak menular, peningkatan kesehatan jiwa serta pengelolaan faktor risiko dan tata laksana penyakit termasuk inovasi teknologi kesehatan untuk perluasan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan;
		2. Pembudayaan pola hidup bersih dan sehat serta penyehatan lingkungan;
		3. Mendukung pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh lapisan masyarakat;

MISI 2



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan inklusif	3. Meningkatnya Produktivitas Ekonomi dan Ketahanan Pangan Daerah	Strategi peningkatan produktifitas ekonomi dan ketahanan pangan daerah, meliputi : 1. Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, dan peternakan dengan pendekatan agribisnis terpadu dan pemanfaatan teknologi, 2. Peningkatan kapasitas petani, pembudidaya ikan, dan peternak melalui pelatihan penyuluhan, dan penguatan kelembagaan 3. Penyediaan sarana produksi pertanian (saprotan) dan peternakan berupa pupuk, benih/bibit pertanian, dan bibit ternak yang murah dan mudah diperoleh, serta alat dan mesin pertanian (alsintan) 4. Pembangunan dan rehabilitasi irigasi, jalan produksi, gudang, cold storage di sentra produksi 5. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan pangan lokal 6. Pengembangan kemitraan dalam rangka peningkatan produksi peternakan, pertanian, dan perikanan 7. Peningkatan pembinaan teknis dan pengawasan produksi dan distribusi hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. 6. Dukungan perizinan, PIRT, dan standar mutu bagi produk lokal 7. Promosi produk unggulan lokal dan perluasan akses pasar melalui penguatan akses UMKM ke portal pengadaan barang /jasa pemerintah, digitalisasi UMKM, serta penguatan branding 8. Penyediaan akses permodalan dan pelatihan bagi petani muda, wirausaha muda, dan UMKM 9. Penguatan manajemen pengelolaan pariwisata melalui pembentukan unit pengelolaan pemandu wisata milenial, pemasaran destinasi wisata berbasis teknologi digital, penataan kawasan pariwisata terpadu, dan penyusunan kalender event pariwisata 10. Pembentukan BUMD Khusus dan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

		pengembangan trading house dalam replantasi ekstensifikasi lahan dan intensifikasi proses produksi 11. Promosi konsumsi pangan lokal bergizi, aman, dan beragam untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu 13. Pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal Optimalisasi distribusi pangan antarwilayah untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan 14. Pengembangan sistem informasi pangan dan cadangan pangan
	4. Berkembangnya Lapangan Kerja dan Peluang Usaha	Strategi Pengembangan Lapangan Kerja dan Peluang Usaha meliputi: 1. Fasilitasi pelatihan kewirausahaan, inkubasi bisnis, dan pendampingan usaha. 2. Kemudahan akses pembiayaan, legalitas, dan perizinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. 3. Pemberdayaan ekonomi kreatif, ekonomi digital, dan usaha berbasis kearifan lokal. 4. Mendorong investasi yang menciptakan lapangan kerja, khususnya di sektor padat karya seperti manufaktur, konstruksi, infrastruktur, dan agrobisnis. 5. Penguatan program pelatihan vokasional dan peningkatan keterampilan (reskilling dan upskilling) sesuai kebutuhan pasar kerja. 8. Pengembangan kemitraan pemerintah daerah dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan kolaborasi dengan dunia industri (link and match). 9. Digitalisasi layanan informasi pasar kerja dan pelatihan berbasis daring. 10. Penyediaan platform digital untuk promosi, transaksi, dan kemitraan usaha. 13. Fasilitasi modal, teknologi sederhana, dan akses pasar bagi pelaku usaha mikro. 14. Perlindungan sosial dan pemberdayaan bagi pekerja sektor informal, termasuk pekerja perempuan dan penyandang disabilitas. 15. Peningkatan layanan penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja.
	5. Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Strategi peningkatan kapasitas fiskal daerah dilakukan melalui : 1. Ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

		sumber PAD, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah berbasis potensi riil 2. Digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi 3. Peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi, simplifikasi layanan, dan insentif kepatuhan 4. Mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur strategis 5. Akselerasi pemanfaatan Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui perencanaan yang sinergis dan tematik 6. Meningkatkan proporsi belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan 7. Koordinasi perencanaan program yang dibiayai melalui transfer pusat (DAU, DAK, DID) agar mendukung prioritas daerah 8. Pemanfaatan transfer fiskal berbasis kinerja untuk mendorong reformasi pengelolaan keuangan daerah 9. Pengendalian inflasi daerah yang terkoordinasi dengan lintas stakeholder dan Kabupaten/Kota
	6. Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif	Strategi peningkatan perlindungan sosial yang adaptif dilakukan melalui: 1. Integrasi program perlindungan sosial dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)/Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan pemanfaatan teknologi digital. 2. Peningkatan kualitas, akurasi, dan pemutakhiran berkala DTKS / Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE). 3. Optimalisasi penambahan cakupan penerima manfaat dengan prioritas kelompok rentan: lansia, penyandang disabilitas, anak, dan keluarga miskin 4. Penyederhanaan mekanisme penyaluran bantuan agar lebih tepat waktu, tepat sasaran, dan minim birokrasi 5. Evaluasi berkala efektivitas bansos melalui pemantauan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

		6. Mendorong peran aktif organisasi sosial, keagamaan, dan lembaga adat dalam membantu kelompok rentan. 7. Peningkatan kapasitas LKS, Karang Taruna, Tagana, dan relawan sosial dalam penanganan kasus sosial dan respons bencana. 7. Penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pemberian bantuan dan layanan sosial.
--	--	--

MISI 3

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas untuk
Mendorong Akselerasi Pembangunan dari Desa

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
3. Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata	7. Meningkatnya kualitas jalan	Strategi peningkatan kualitas jalan dilakukan melalui : 1. Prioritisasi pemeliharaan jalan existing untuk menjaga fungsi layanan dan mengurangi backlog kerusakan 2. Pengawasan mutu pekerjaan konstruksi melalui sistem pengendalian kualitas terpadu 3. Pembangunan dan peningkatan jalan penghubung antar kecamatan, desa, kawasan ekonomi, kawasan pariwisata, dan pusat pelayanan, termasuk bantuan dana khusus ke pemerintah desa untuk peningkatan jalan desa 4. Sinergi pembangunan jalan kabupaten dengan jalan provinsi dan nasional, dan kawasan strategis lainnya 5. Pengembangan skema pembiayaan alternatif seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek strategis bidang jalan 6. Peningkatan kompetensi teknis SDM melalui pelatihan, sertifikasi, dan pemutakhiran pengetahuan bidang jalan
	8. Meningkatnya jangkauan layanan listrik di seluruh wilayah	Strategi peningkatan jangkauan layanan listrik di seluruh wilayah dilakukan melalui : 1. Pemutakhiran data desa berlistrik dan identifikasi titik prioritas pengembangan jaringan 2. Percepatan elektrifikasi desa dan dusun



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

		non- listrik melalui kolaborasi dengan PLN, termasuk pemberian bantuan dana khusus ke pemerintah desa untuk penerangan desa 3. Pemanfaatan energi terbarukan mikrohidro 4. Fasilitasi peningkatan kapasitas daya di wilayah padat penduduk dan kawasan ekonomi produktif 5. Pemanfaatan Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana CSR untuk mendukung perluasan akses listrik Fasilitasi bantuan sambungan listrik gratis bagi keluarga miskin. 7. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pemeliharaan infrastruktur listrik dan pengelolaan pembangkit mandiri.
	9. Meningkatnya luasan area yang terlayani jaringan irigasi	Strategi peningkatan luasan area yang terlayani jaringan irigasi meliputi : 1. Pembangunan jaringan irigasi baru kewenangan kabupaten di wilayah dengan potensi pertanian tinggi 2. Rehabilitasi saluran irigasi kewenangan kabupaten yang rusak akibat usia, bencana, atau sedimentasi 3. Pemberdayaan, pelatihan teknis dan manajerial organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi 4. Pengembangan embung, dan sumur dangkal untuk memperkuat pasokan air irigasi di musim kemarau 5. Optimalisasi pemanfaatan air hujan melalui sistem pemanenan air (rainwater harvesting). Konservasi daerah tangkapan air (catchment area) untuk menjaga kontinuitas sumber air irigasi.
	10. Meningkatnya infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	Strategi peningkatan infratraktur dasar perumahan dan permukiman meliputi : 1. Pembangunan jaringan perpipaan air bersih dan sistem sanitasi komunal di kawasan padat penduduk 3. Pengembangan sistem drainase lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan untuk mengurangi genangan/banjir lokal Penyediaan air bersih dan sanitasi di seluruh wilayah dengan prioritas pada daerah sulit air 4. Peremajaan kawasan, serta penataan kawasan kumuh berbasis masyarakat



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

		5. Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam penanganan kawasan kumuh 6. Peningkatan aksesibilitas terhadap perumahan layak huni bagi MBR melalui bedah rumah dan bagi korban bencana 7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Rumah Jabatan
4. Meningkatnya pembangunan desa	11. Meningkatnya ekonomi desa	Strategi peningkatan ekonomi desa meliputi : 1. Pengembangan dan revitalisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagai motor penggerak ekonomi lokal. 2. Pendampingan dan pelatihan manajemen usaha, pemasaran, dan keuangan bagi pengelola BUM Desa. 3. Fasilitasi kerja sama antar desa dan kemitraan dengan pihak swasta dalam pengembangan usaha desa. 4. Dukungan sarana produksi, teknologi, dan akses pasar untuk pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat 5. Pembinaan wirausaha muda desa dan kelompok perempuan produktif melalui program pelatihan dan inkubasi bisnis serta pemanfaatan platform pemasaran digital 6. Fasilitasi kemitraan dengan lembaga keuangan mikro, koperasi, dan bank untuk memperluas akses permodalan 7. Optimalisasi pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat
	12. Meningkatnya jaringan komunikasi dan informasi desa	Strategi peningkatan jaringan komunikasi dan informasi desa meliputi : 1. Fasilitasi pembangunan infrastruktur komunikasi di desa yang masih blank spot melalui kolaborasi dengan penyedia layanan, 2. Penguatan Balai Desa Digital atau Pusat Layanan Internet Desa untuk akses publik terhadap informasi dan layanan online 3. Dukungan sarana prasarana TIK seperti komputer, jaringan Wi-Fi desa, dan panel informasi digital, termasuk penyediaan internet gratis dan berkualitas pada fasilitas umum di desa . 4. Pelatihan penggunaan teknologi informasi (internet sehat, keamanan siber, dan etika bermedia sosial) bagi perangkat desa, kader



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

		digital, pemuda, dan kelompok perempuan Pengembangan sistem informasi desa (SID) untuk pengelolaan data kependudukan, aset, dan keuangan desa
--	--	--

MISI 4

Meningkatkan Kualitas Pemerintahan yang Bersih, Inovatif dan Melayani

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inovatif	13. Terwujudnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Strategi untuk mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah, meliputi : • Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran (RPJMD, Renstra, RKPD, KUA-PPAS, APBD) agar konsisten, terukur, dan selaras dengan tujuan pembangunan • Pemantapan mekanisme evaluasi kinerja perangkat daerah dan pencapaian sasaran strategis • Penerapan sistem informasi keuangan daerah secara terpadu dan real time • Penguatan pengawasan internal melalui Inspektorat Daerah dengan pendekatan pengawasan berbasis risiko • Evaluasi dan peningkatan maturitas SPIP secara berkelanjutan di seluruh OPD • Pendampingan terhadap OPD dalam menyusun indikator kinerja yang SMART dan selaras dengan RPJMD • Optimalisasi peran evaluator internal dalam memastikan SAKIP OPD meningkat secara konsisten.
	14. Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektornik dan Inovatif	Strategi untuk mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik dan inovatif, meliputi 1. Pengembangan dan pemeliharaan pusat data daerah (data center) dan jaringan intra pemerintah (intranet). 2. Penyediaan dan peningkatan kapasitas server, perangkat lunak, dan jaringan untuk mendukung layanan digital pemerintah 3. Penyusunan arsitektur SPBE daerah sesuai standar nasional. 4. Integrasi antar aplikasi pemerintahan (e-planning, e-budgeting, e-sakip, e-office, e-arsip, e- monev, dll.) agar saling terhubung dan efisien. 5. Peningkatan kompetensi pejabat fungsional



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

		dan teknis dalam pengembangan serta pengelolaan aplikasi pemerintahan Fasilitasi lomba inovasi pembangunan daerah, laboratorium inovasi daerah, dan pemberian insentif inovator ASN. 7. Pembentukan Tim Inovasi Daerah dan penguatan peran perangkat daerah yang membidangi kelitbangan/riset dalam ekosistem inovasi.
	15. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Strategi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, meliputi : 1. Penataan kelembagaan berbasis prioritas kebutuhan daerah 2. Meningkatkan manajemen talenta dan karir ASN yang mengedepankan kompetensi dan dedikasi 3. Meningkatkan kapasitas ASN dalam menghadirkan system pelayanan publik yang cepat dan responsif melalui pelatihan frontliner, petugas pelayanan, dan pejabat struktural tentang etika pelayanan, komunikasi publik, dan manajemen antrian. 4. Penetapan dan pemutakhiran Standar Pelayanan (SP) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik daerah. 5. Penegakan kode etik pelayanan dan pemberian penghargaan bagi aparatur berprestasi dalam layanan. 6. Peningkatan kesejahteraan ASN untuk mendukung pelayanan publik prima 7. Penerapan sistem penilaian kinerja berbasis hasil layanan 6. Digitalisasi proses pelayanan publik (pendaftaran, permohonan, pelacakan, pengaduan, dan evaluasi). Pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) atau loket terpadu berbasis elektronik di kabupaten/kota. 8. Pelayanan publik berbasis inklusi sosial, ramah disabilitas, dan menjangkau masyarakat terpencil dan rentan. 9. Pengembangan layanan jemput bola (mobile service, pelayanan keliling, dan pos pelayanan terpadu). 10. Penyesuaian jam layanan, lokasi, dan kanal komunikasi publik agar sesuai kebutuhan warga. 11. Pengembangan dan penguatan kanal aduan masyarakat (SP4N-LAPOR, layanan pengaduan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

		langsung, call center daerah)
--	--	-------------------------------

Misi 5

Menciptakan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam, Adat dan Budaya Serta Toleransi Antar Umat Beragama.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
6. Meningkatkan Kehidupan Sosial Budaya yang Harmonis	16. Berkembangnya kebudayaan daerah	Strategi untuk mengembangkan kebudayaan daerah meliputi : 1. Inventarisasi dan dokumentasi aset budaya tak benda dan benda (tradisi, situs, cagar budaya, manuskrip, dll.). 2. Pemugaran, perawatan, dan perlindungan situs budaya, bangunan bersejarah, dan kawasan adat. 3. Pemberdayaan sanggar seni, komunitas budaya, lembaga adat, dan budayawan lokal 4. Penyelenggaraan festival budaya, pentas seni, lomba tradisional, dan pekan budaya daerah. 5. Pembangunan pusat kesenian dan budaya Toraja 6. Pemberdayaan generasi muda dalam pengembangan seni kontemporer berbasis kearifan lokal 7. Pemanfaatan media sosial, website, dan platform digital untuk memperkenalkan budaya lokal, termasuk olaborasi dengan media, influencer budaya, dan institusi seni untuk memperluas jangkauan promosi 8. Pengembangan desa wisata budaya dan jalur wisata sejarah yang menonjolkan kekayaan budaya lokal. 9. Penetapan ikon budaya sebagai bagian dari identitas daerah dan daya tarik investasi ekonomi kreatif 10. Revitalisasi Kawasan Tongkonan
	17. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama	Strategi untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama, meliputi : 1. Fasilitasi dialog lintas agama, forum kerukunan umat beragama (FKUB), dan kegiatan lintas iman di tingkat daerah



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

		2. Pencegahan radikalisme dan penyebaran ujaran kebencian berbasis agama melalui penguatan literasi keagamaan yang damai 3. Pelatihan bagi tokoh agama dan pendakwah agar mampu menyampaikan pesan keagamaan yang mencerahkan dan toleran. 4. Penguatan peran rumah ibadah sebagai pusat pendidikan moral, sosial, dan kemasyarakatan 5. Dukungan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan rumah ibadah secara adil dan proporsional 6. Dukungan terhadap lembaga pendidikan keagamaan (madrasah, pesantren, sekolah minggu, dll.) dalam bentuk sarana, pelatihan guru, dan pembinaan kurikulum 7. Integrasi nilai-nilai agama dan karakter ke dalam pendidikan umum melalui muatan lokal atau kegiatan ekstrakurikuler. 8. Peningkatan pelayanan keagamaan dan ibadah di daerah terpencil dan kelompok rentan (disabilitas, lansia, dan warga di lembaga pemasyarakatan, dan daerah pasca bencana) 9. Peningkatan kesejahteraan guru sekolah minggu, pendeta dan imam masjid
	18. Meningkatkan kesetaraan gender pada berbagai aspek kehidupan	Strategi untuk meningkatkan kesetaraan gender pada berbagai aspek kehidupan, meliputi : 1. Integrasi isu gender dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD) dan penganggaran melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). 2. Penguatan kelembagaan focal point gender di OPD 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG secara berkala untuk menilai dampaknya terhadap laki-laki dan perempuan 4. Mendorong keterwakilan perempuan dalam jabatan struktural, politik, dan kelembagaan publik. 5. Pelatihan kepemimpinan dan penguatan kapasitas perempuan di bidang politik, pemerintahan, dan komunitas masyarakat. 6. Pemberdayaan organisasi perempuan dan forum masyarakat sebagai mitra pembangunan yang setara 7. Pengembangan kegiatan afirmatif untuk perempuan miskin, penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, dan kelompok



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

		rentan lainnya. 9. Dukungan pelatihan keterampilan kerja, kewirausahaan, dan akses modal bagi perempuan Penyediaan sarana prasarana pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan spesifik perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas 10. Peningkatan layanan terpadu bagi korban kekerasan (P2TP2A, rumah aman, layanan psikososial dan hukum). 11. Penguatan sistem pelaporan, perlindungan saksi/korban, serta penegakan hukum secara adil dan cepat.
	19. Meningkatkan kualitas kepemudaan dan keolahragaan	Strategi untuk meningkatkan kualitas kepemudaan dan keolahragaan , meliputi : 1. Peningkatan akses pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, dan keterampilan digital bagi pemuda 2. Fasilitasi organisasi kepemudaan, forum pemuda, dan komunitas kreatif dalam kegiatan sosial, budaya, dan lingkungan 3. Pemberian ruang partisipasi pemuda dalam perencanaan pembangunan daerah dan pengambilan keputusan publik 4. Kolaborasi dengan dunia usaha dan pendidikan vokasi untuk peningkatan keterampilan kerja pemuda 5. Pemberian dukungan modal usaha bagi entrepreneur muda 6. Penguatan sistem pembinaan olahraga dari usia dini hingga tingkat prestasi (klub, sekolah olahraga, PPLP, dll.) dan olahraga masyarakat Fasilitasi kompetisi olahraga antar pelajar, antar kecamatan, dan event daerah untuk menjaring bibit atlet 8. Penyediaan fasilitas olahraga publik yang mudah diakses masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan perempuan. 9. Integrasi ruang terbuka hijau dan fasilitas olahraga di kawasan permukiman dan perkotaan
7. Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup berkelanjutan dan berketahanan iklim	20. Meningkatkan kualitas air, udara, dan tutupan lahan	Strategi untuk meningkatkan kualitas air, udara, dan tutupan lahan. meliputi : 1. Penguatan sistem pemantauan kualitas air dan udara secara berkala di wilayah rawan pencemaran. 2. Penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan, khususnya dari kegiatan industri, pertambangan, dan limbah domestik.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

		3. Pengembangan sistem pengelolaan limbah cair dan padat yang ramah lingkungan 4. Rehabilitasi lahan kritis dan daerah aliran sungai (DAS) melalui penghijauan, pembuatan sumur resapan, dan teknologi konservasi tanah-air. 5. Perlindungan sumber mata air dan kawasan lindung dengan pendekatan berbasis masyarakat. 6. Penguatan kolaborasi multipihak dalam menjaga keberlanjutan DAS dan kawasan penyangga 7. Penanaman pohon dan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan, sekolah, perkantoran, dan permukiman. 8. Perlindungan hutan dan ekosistem alami dari alih fungsi lahan 9. Insentif kepada masyarakat dan pelaku usaha yang berkontribusi dalam penghijauan dan konservasi lingkungan.
	21. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana	terhadap risiko bencana, meliputi : 1. Mendorong penyediaan rumah tahan bencana dan penanganan bencana yang terintegrasi di lokasi rawan bencana 2. Penguatan system peringatan dini yang akurat dan andal di daerah-daerah yang rawan bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; 3. Mendorong pengelolaan hutan berbasis risiko bencana dan memperhatikan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan 4. Peningkatan implementasi pembangunan rendah karbon 5. Pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan bencana serta peningkatan kapasitas, ketahanan dan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan simulasi
	22. Meningkatnya ketahanan energi	Strategi untuk meningkatkan ketahanan energi, meliputi : 1. Konservasi daerah aliran sungai sebagai sumber potensi energi baru dan terbarukan PLTMH Ma'dong dan PLTMH Maiting dan potensi PLTMH lainnya 2. Peningkatan pemanfaatan EBT untuk desa/dusun yang belum terjangkau listrik PLN 3. Efisiensi penggunaan energi pada gedung pemerintah 4. Mendorong penggunaan kendaraan bermotor energi listrik



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

		5. Peningkatan kemitraan dengan sektor swasta dan akademisi untuk inovasi dan pengembangan energi berkelanjutan 6. Penanganan sampah yang optimal dari hulu ke hilir termasuk pemanfaatan sampah sebagai sumber bahan bakar alternatif dengan melibatkan partisipasi masyarakat
--	--	---

2.2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja seiring dengan berlangsungnya masa transisi perencanaan pembangunan daerah. Penyesuaian tersebut berdampak pada perubahan sebagian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten, agar selaras dengan arah kebijakan nasional, dokumen perencanaan daerah terbaru, serta penyelarasan dengan indikator pada RPD dan Renstra Perangkat Daerah.

Perubahan IKU dimaksud dilakukan untuk memastikan kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, dan pengukuran kinerja, serta meningkatkan relevansi indikator terhadap sasaran pembangunan yang ingin dicapai. Penyesuaian ini tidak mengubah tujuan dan sasaran pembangunan daerah, namun lebih menitikberatkan pada penyempurnaan definisi, satuan pengukuran, serta metode perhitungan indikator agar lebih akurat dan dapat diukur secara objektif.

Dengan dilakukannya Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, diharapkan pelaksanaan pembangunan daerah tetap berjalan secara efektif dan akuntabel, serta hasil pengukuran kinerja dapat memberikan gambaran yang lebih tepat terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara pada masa transisi.

Adapun Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 berdasarkan RPJMD 2025-2029 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya kualitas dan Daya saing sumberdaya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	72,73
2	Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif	Rata-rata Lama Sekolah	8,66
		Harapan Lama Sekolah	13,44
3	Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata	Usia Harapan Hidup	75,14
4	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berdaya saing dan inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	4,67
		Pendapatan Perkapita	49,96
		Tingkat Kemiskinan	10,32-9,73
		Rasio Gini	0,310
		Tingkat Pengangguran Terbuka	2,35



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

5	Meningkatnya Produktivitas Ekonomi dan Ketahanan Pangan Daerah	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	7,36
		Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	16,92
		Kontribusi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	3,31
		Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	4,74
		Indeks Ketahanan Pangan	81,09
6	Berkembangnya Lapangan Kerja dan Peluang Usaha	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	73,44
7	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Rasio Pajak dan Retribusi Terhadap APBD	4,95
8	Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	0,39
9	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Merata	Indeks Layanan Infrastruktur	3,15
10	Meningkatnya Kualitas Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	58,96
11	Meningkatnya Jangkauan Layanan Listrik di seluruh wilayah	Rasio Elektrifikasi Kabupaten	99,48
12	Meningkatnya luasan area yang terlayani jaringan irigasi	Rasio Jaringan Irigasi	46,04
13	Meningkatnya infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaian	26
		RT dengan Akses Sanitasi Layak	94,05
14	Meningkatnya Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	0,6141
15	Meningkatnya Ekonomi Desa	Bumdes dengan Kategori Berkembang	4,50
16	Meningkatnya Jaringan Komunikasi Dan Informasi Desa	Lembang/Kelurahan yang Memiliki Akses Jaringan Internet	80,93
17	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Adaptif dan Inovatif	IT5. Indeks Reformasi Birokrasi	62,32
18	Terwujudnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	62,36



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

19	Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Inovatif	Indeks SPBE	2,42
		Indeks Inovasi Daerah	27,73
20	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	2,61
21	Meningkatnya kehidupan sosial budaya yang harmonis	Persentase Lembang/Kelurahan yang Memiliki Lembaga Adat yang Aktif	65,03
22	Berkembangnya kebudayaan daerah	Kelembagaan kebudayaan yang berperan dalam pemajuan kebudayaan daerah	100
23	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama	Kelembagaan Keagamaan yang efektif berfungsi	100
24	Meningkatnya kesetaraan gender pada berbagai aspek Kehidupan	Indeks Ketimpangan Gender	0,185
25	Meningkatnya kualitas pemuda dan keolahragaan	Persentase Wirausaha Muda	0,28
		Persentase atlet kabupaten yang memperoleh peringkat dalam kejuaraan regional dan nasional	13,86
26	Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup berkelanjutan dan berketahanan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,38
		Penurunan Intensitas Emisi GRK	29,72
27	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	76,98
		Indeks Kualitas Udara	79,98
		Indeks Tutupan Lahan	73,24
29	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	139,93
29	Meningkatnya Ketahanan Energi	Konsumsi Listrik Perkapita	209,63

Catatan : Target yang diperjanjikan adalah target RPJMD tahun ke-1 (satu).



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

PROGRAM DAN ANGGARAN

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
Program Pengelolaan pendidikan	162,176,703,327.35
Program pendidikan dan tenaga kependidikan	142,990,400.00
Program Pembinaan Perpustakaan	709,749,599.00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat	107,053,534,031.40
Program Peningkatan kapasitas Sumber daya manusia kesehatan	1,198,446,000.00
Program sediaan farmasi dan alat kesehatan dan makanan dan Minuman	640,257,000.00
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan	396,198,150.00
Program Pembinaan Keluarga Berencana	7,022,967,786.00
Program peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	287,831,170.00
Program penanganan kerawanan pangan	6,012,500.00
Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	-
Program peningkatan Daya tarik Destinasi Pariwisata	1,853,985,850.00
Program pemasaran pariwisata	79,756,800.00
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	676,803,600.00
program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	1,298,115,600.00
Program pengendalian dan penannggulangan bencana pertanian	2,903,768,667.80
Program penyulu pertanian	215,200,000.00
Program pengelolaan perikanan budidaya	388,996,678.00
Program pemberdayaan usaha menengah, Usaha kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	132,566,160.00
program pengembangan UMKM	-
program perizinan dan pendaftaran perusahaan	21,423,000.00
Program pengembangan iklim penanaman iklim penanaman modal	184,465,500.00
Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	1,602,806,999.20
Program penempatan Tenaga Kerja	51,964,000.00
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	873,818,660.00
Program perlindungan dan jaminan sosial	99,627,550.00
program pemberdayaan sosial	179,164,600.00
Program Rehabilitasi sosial	825,814,650.00
Program Penyelenggaraan Jalan	77,129,658,367.00
Program penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan jalan	
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	17,725,095,594.00
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	381,016,500.00
Program Penataan bangunan Gedung	6,315,450,949.00
Program Penataan Desa	764,445,000.00



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Program Administrasi Pemerintahan Desa	501,007,798.90
Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	292,346,000.00
Program Perencanaan, pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	757,535,601.00
Program Penyelenggaraan Pengawasan	3,301,805,320.00
Program Perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi	223,701,000.00
Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	3,140,643,180.01
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	163,399,277,840.00
Program pengelolaan aplikasi informatika	1,695,269,536.00
Program Penelitian dan Pengembangan	337,086,850.00
Program Pengelolaan Barang Milik daerah	437,611,740.00
Program pendaftaran penduduk	65,363,000.00
Program pencatatan sipil	66,583,800.00
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	92,747,730.00
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1,350,468,153.90
Program Pengembangan Kebudayaan	170,897,400.00
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	185,838,200.00
Program pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	137,330,000.00
Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	22,420,000.00
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	138,780,600.00
Program Pengembangan Daya saing Keolahragaan	9,095,895,419.00
Program Pengelolaan Sampah	4,473,066,880.00
Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	7,847,867,750.00
Program Penanggulangan Bencana	21,209,951,218.00
Program pencegahan, Penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	379,973,706.00
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1,330,700,000.00

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.019.031.674.737,56 Untuk mencapai target kinerja sasaran pembangunan pada tahun 2025, dicapai melalui program prioritas yaitu :

- (1) Penegakan disiplin bagi siswa;
- (2) Peningkatan kompetensi tenaga medis dan para medis;
- (3) Promosi potensi pariwisata secara local, regional, dan nasional ;
- (4) Penguatan system pengawasan internal pada kapabilitas APIP;
- (5) Optimalisasi system pengawasan internal pemerintah daerah;
- (6) pengembangan pusat kerajinan rakyat;
- (7) penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga;



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

- (8) Penataan sarana/prasarana taman jalan protocol dan ruang terbuka hijau;
- (9) Pengembangan perikanan berbasis kolam dan minapadi;
- (10) Pembinaan kepramukaan dan karang taruna
- (11) Penguatan Badan Usaha Milik Lembang;
- (12) Penegakan Produk Hukum Daerah dan kesadaran hukum masyarakat;
- (13) Pemeliharaan toleransi kehidupan beragama.

2.6 Rencana Anggaran Tahun 2025

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025, belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan. Mengingat kondisi kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas, Belanja Daerah Tahun 2025 sebesar Rp 160.571.156.800,00 Belanja Operasi sebesar Rp 817.808.410.554,60 atau 91,46% dari total anggaran Tahun 2025, Belanja Modal Rp 168.898.753.548,76 atau 88,72% dari total anggaran Tahun 2025, Belanja Tidak Terduga Rp 950.000.000,00 atau 58,21% dan Belanja Transfer Rp 160.571.156.800,00 atau 81,58%.

Tabel
Target Belanja Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Target (Rp)	%
1	Belanja Operasi	817.808.410.554,60	91,46
2	Belanja Modal	168.898.753.548,76	88,72
3	Belanja Tidak Terduga	950.000.000,00	58,21
4	Belanja Transfer	160.571.156.800,00	81,58
Jumlah		1.099.081.786.981,54	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Dalam rangka penyusunan laporan kinerja dilakukan pengumpulan data kinerja dari satuan-satuan kerja. Berdasarkan data tersebut pengukuran keberhasilan setiap indikator dengan membandingkan antara target dan realisasi. Keberhasilan pencapaian sasaran digolongkan sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	$\geq 91\%$	Sangat Tinggi
II	76% s.d 90%	Tinggi
III	66% s.d 75%	Sedang
IV	51% s.d 65%	Rendah
V	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber Data : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Untuk perhitungan pencapaian kinerja sasaran mencapai lebih dari 100% penghitungan kinerjanya disesuaikan dengan capaian rill.

- (1) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}^{**})}{\text{Rencana}^{**})} \times 100\%$$

- (2) semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{(\text{Rencana}^{**}) - (\text{Realisasi}^{**}) - \text{Rencana}^{**})}{\text{Rencana}^{**})} \times 100\%$$

3.1 Capaian IKU Tahun 2025

Pencapaian indikator kinerja utama pembangunan Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2024 semakin menunjukkan perbaikan kinerja, sebagaimana pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,23	73,24	102,82	Sangat Tinggi
2	Indeks Pendidikan	Angka	65,64	66,65	101,53	Sangat Tinggi
3	Indeks Kesehatan	Angka	84,43	84,98	100,65	Sangat Tinggi
4	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,94	75,24	101,7	Sangat Tinggi



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

5	% Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap Total PAD	%	8	1,31	16,4	Sangat Rendah
6	% Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	45	50,24	116,64	Sangat Tinggi
7	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	Angka	69,02	64,88	94	Sangat Tinggi
8	Nilai SAKIP Daerah	Angka	69,00	61,95	89,8	Tinggi
9	IKM	Angka	83,99	84,74	100,9	Sangat Tinggi
10	IPKD	Angka	82	Belum Rilis	-	-
11	PDRB/Kapita (Rp. Juta)	Rp. Juta	45,03	50,63	112,43	Sangat Tinggi
12	Rasio Gini	Angka	0,366	0,285	122,13	Sangat Tinggi
13	Pertumbuhan Ekonomi	%	6-7,5	5,36	89,3	Tinggi
14	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,60	2,01	122,69	Sangat Tinggi
15	Angka Kemiskinan (%)	%	11,36	10,05	111,53	Sangat Tinggi
16	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Angka	76,62	56,39	73	Sedang
17	Indeks Resiko Bencana	Angka	149,6	144,97	103,09	Sangat Tinggi
18	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	88,19	88,69	100,5	Sangat Tinggi
19	Ketersediaan Energi/Kapita	(kkl/kapita/hari)	2328,53	1.954	83,91	Tinggi
20	Ketersediaan Protein/kapita	(gram/kapita/hari)	67,59	61,30	90,69	Sangat Tinggi
21	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	0,72	2,01	279	Sangat Tinggi
22	% Peningkatan Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional	%	2,06	1,62	78,04	Tinggi
23	Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten	Angka	0,6020	0,6101	101,3	Sangat Tinggi
24	% Lembang Kualifikasi Maju	%	2,70	4,50	166,66	Sangat Tinggi
25	% Penurunan Angka Kriminalitas	%	3,20	3,2	100	Sangat Tinggi
26	% Gangguan Ketenteraman dan	%	92	100	108,69	Sangat Tinggi



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

	Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan					
27	Cakupan Kegiatan Lembaga Keagamaan	%	100	99	99	Sangat Tinggi
28	Cakupan Kegiatan Lembaga Keagamaan yang Dibina	%	103,13	99	95,99	Sangat Tinggi

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Toraja Utara sebanyak 29 (dua puluh sembilan) indikator. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 22 indikator memenuhi capaian kinerja di atas 103,23 atau kriteria “**Sangat Tinggi**”.

3.2 Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara

Tujuan 1 Meningkatkan Kualitas SDM melalui Pendidikan

Keberhasilan sasaran Meningkatnya kualitas SDM melalui pendidikan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Capaian atas masing-masing indikator tersebut dapat terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3.1
Analisis Pencapaian Tujuan 1
Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Pendidikan

Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,00	72,31	101,8	71,23	73,24	102,82
Rata-rata capaian Kinerja				101,8			103,14

Sumber Data : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Dari tabel diatas pencapaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan.

IPM Toraja Utara pada tahun 2025 adalah 73,24% dan dibandingkan dengan target sebesar 71,01 maka capaian indikator ini adalah sebesar 102,82%. Sedangkan dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu 72,31 dari target 71 dengan capaian 101,8% maka IPM Toraja Utara mengalami peningkatan realisasi sebesar 1,02%.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Sasaran 1 Meningkatkan Derajat Pendidikan dan Literasi

Capaian kinerja sasaran 1 Meningkatkan Derajat Pendidikan dan Literasi Masyarakat sebagai berikut:

Tabel 3.3.2
Analisis Pencapaian Sasaran Strategi 1
Meningkatnya Derajat Pendidikan dan Literasi Masyarakat

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Indeks Pendidikan	Angka	64,5	65,77	101,9	65,64	66,65	101,53
Rata-rata capaian Kinerja				101,9			101,53

Sumber Data : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Sektor pendidikan merupakan salah satu faktor yang mendapat prioritas utama dalam pembangunan di Kabupaten Toraja Utara. Hal ini disadari bahwa faktor pendidikan akan menjadi investasi penting untuk meningkatkan daya saing daerah di masa yang akan datang dan merupakan unsur dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan adalah Indeks Pendidikan. Realisasi Indeks Pendidikan kabupaten toraja utara tahun 2025 sebesar 66,55.

Tujuan 2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.3
Analisis Pencapaian Sasaran Strategi 2
Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Indeks Kesehatan	Angka	82,86	84,66	102,1	84,43	84,98	100,65
Rata-rata capaian Kinerja				102,1			100,65

Sumber Data : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Dari tabel diatas Indeks Kesehatan Toraja Utara 2025 mengalami penigkatan dari tahun 2024 yaitu sebesar 84,98. Walaupun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

namun tetap memerlukan upaya peningkatan lebih lanjut dengan terus menerus dan berkelanjutan.

Sasaran 2 Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Keberhasilan sasaran 2 Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan dengan indikator yaitu persentase Angka Harapan Hidup tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.4
Analisis Pencapaian Sasaran Strategi 2
Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Angka Harapan Hidup	Angka	73,83	75,03	100,2	73,94	75,24	101,75
Rata-rata capaian Kinerja							

Sumber Data : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Indikator Angka Harapan Hidup adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan yang telah dicapai dalam suatu masyarakat dan digunakan untuk mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat. Angka harapan hidup kabupaten toraja utara menyentuh 75,24.

Tujuan 3 Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Wisata

Keberhasilan tujuan Meningkatkan Daya Tarik Pariwisata dengan indikator Kontribusi PAD sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

a. Perbandingan antara target dan realisasi 2025

Tabel perbandingan antara target dan realisasi (2025)			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
% Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap total PAD	8	1,31	16,38

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir			
Indikator Kinerja	2023	2024	2025
% Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap total PAD	31,8 3	21,7	16,38

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir Renstra dan Nasional



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Target Nasional
% Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap total PAD	16,38	8	-

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp 3,997,048,756	Rp 3,078,270,549	77.01%
2	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp 170,897,400	Rp 83,749,235	49.01%
3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp 383,287,600	Rp 177,858,600	46.40%
4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp 255,806,600	Rp 117,795,335	46.05%
5	Program pengelolaan Permuseuman	Rp 419,033,000	Rp 88,637,836	21.15%
6	Program Peningkatan daya tarik Destinasi Pariwisata	Rp 1,853,985,850	Rp 105,966,050	5.72%
7	Program Pemasaran Pariwisata	Rp 4,430,500	Rp 4,320,500	97.52%
8	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp 702,130,088	Rp 540,151,667	76.93%
TOTAL				

e. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Tabel Program dan Kegiatan (2025)		
No	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
		Administrasi Keuangan Prangkat daerah
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat daerah
		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah
		Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

		Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
2	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya
3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya
4	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya peringkat Kabupaten /Kota
5	Program Pengelolaan Permuseuman	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten /Kota
6	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Kawasan Strategi Pariwisata
7	Program Pemasaran Pariwisata.	Program Pariwisata dalam dan luar Negeri Daya Destinasi dan Kawasan strategis Pariwisata Kab/Kota
8	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Pengukuran kinerja Tujuan 3 “*Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata*” menggunakan indikator persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata terhadap total PAD. Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2025, realisasi persentase kontribusi PAD sektor pariwisata menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan target yang telah ditetapkan. Kondisi ini tercermin pula dari realisasi kinerja dalam tiga tahun terakhir yang mengalami penurunan secara persentase. Penurunan nilai persentase kontribusi tersebut tidak semata-mata menunjukkan penurunan kinerja sektor pariwisata. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya total Pendapatan Asli Daerah, PAD kabupaten Toraja Utara tahun 2025 adalah Rp69.421.724.879,56 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp.46.326.186.172,05 sementara kontribusi pariwisata terhadap PAD tahun 2025 adalah Rp909.098.950 dibandingkan tahun sebelumnya Rp.736.173.000,-, sehingga secara proporsional persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap total PAD menjadi lebih kecil. Dengan kata lain, meskipun pendapatan dari sektor pariwisata tetap mengalami peningkatan, laju kenaikan total PAD yang lebih tinggi menyebabkan capaian indikator berbasis persentase belum mencapai target yang direncanakan. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini dipengaruhi oleh dinamika pertumbuhan PAD secara keseluruhan. Hasil evaluasi ini menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan perencanaan ke depan, khususnya dalam penetapan target indikator agar lebih mencerminkan kondisi pertumbuhan PAD lintas sektor serta tetap mendorong peningkatan kontribusi sektor pariwisata secara berkelanjutan.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Sasaran 3 Meningkatkan Daya Saing Destinasi Wisata

Hasil pengukuran kinerja terhadap indikator tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

a. Perbandingan antara target dan realisasi 2025

Tabel perbandingan antara target dan realisasi (2025)			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
%Peningkatan Kunjungan wisatawan	45	50,24	116

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir			
Indikator Kinerja	2023	2024	2025
%Peningkatan Kunjungan wisatawan	15,6	71,1	116

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir Renstra dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Target Nasional
%Peningkatan Kunjungan wisatawan	116	55	-

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp 3,997,048,756	Rp 3,078,270,549	77.01%
2	Program Pengembanagan Kebudayaan	Rp 170,897,400	Rp 83,749,235	49.01%
3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp 383,287,600	Rp 177,858,600	46.40%
4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp 255,806,600	Rp 117,795,335	46.05%
5	Program pengelolaan Permuseuman	Rp 419,033,000	Rp 88,637,836	21.15%
6	Program Peningkatan daya tarik Destinasi Pariwisata	Rp 1,853,985,850	Rp 105,966,050	5.72%
7	Program Pemasaran Pariwisata	Rp 4,430,500	Rp 4,320,500	97.52%
8	Program Pengembangan Sumber	Rp 702,130,088	Rp 540,151,667	76.93%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

	Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
	TOTAL			

e. Program dan Kegiatan

Tabel Program dan Kegiatan (2025)		
No	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat daerah
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat daerah
		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah
		Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
2	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya
3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya
4	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya peringkat Kabupaten /Kota
5	Program Pengelolaan Permuseuman	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten /Kota
6	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Kawasan Strategi Pariwisata
7	Program Pemasaran Pariwisata.	Program Pariwisata dalam dan luar Negeri Daya Destinasi dan Kawasan strategis Pariwisata Kab/Kota
8	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Sumber Data : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2025



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Dampak dari peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara adalah lama tinggal wisatawan di Kabupaten Toraja Utara pada Tahun 2025 seperti pada Tabel dibawah ini

No	Bulan	Tamu Asing	Tamu Domestik
1.	Januari	3	2
2.	Februari	3	2
3.	Maret	3	2
4.	April	3	2
5.	Mei	3	2
6.	Juni	3	2
7	Juli	3	2
8	Agustus	3	2
9	September	3	2
10	Oktober	3	2
11	November	3	2
12	Desember	3	2
Rata-rata Lama Tinggal Tahun 2025		3	2

Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

Keberhasilan tujuan ini diukur melalui capaian atas 1 indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Hasil pengukuran kinerja terhadap indikator tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi 2025

Tabel perbandingan antara target dan realisasi (2025)			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Reformasi Birokrasi	69,02	64,88	94

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir			
Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Indeks Reformasi Birokrasi	54,90	60,71	64,88

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir Renstra dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Target Nasional



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Indeks Reformasi Birokrasi	63,08	73,56	-
----------------------------	-------	-------	---

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	32.480.400	32.480.400	100
TOTAL				

e. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Tabel Program dan Kegiatan (2025)		
N o	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Sumber Data : Bagian Organisasi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Indeks Reformasi Birokrasi yaitu indeks yang menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Untuk meningkatkankualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu penyederhanaan birokrasi serta digitalisasi birokrasi.

Dari tabel diatas nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Toraja Utara untuk Tahun 2025 adalah sebesar 64,88 dengan total capaian 94%. Capaian ini meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya (2024) 60,71 .Peningkatan nilai ini dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu:

- Adanya komitmen pimpinan yang semakin tinggi dan kerjasama yang baik oleh seluruh perangkat daerah.
- Ketersediaan bukti dukung termasuk adanya dokumen RB Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 yang telah disesuaikan dengan dokumen RPJMD.
- Pengiputan data rencana aksi Road Map Tematik dan RB General yang semakin banyak.
- Terlaksananya evaluasi Triwulan terhadap pelaksanaan rencana aksi.
- Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara Bagian Organisasi dan Inspektorat Daerah selaku evaluator internal.
- Terlaksananya rapat evaluasi terhadap realisasi capaian rencana aksi baik RB Tematik pun RB General.

Walaupun ada peningkatan nilai yang positif tetapi masih banyak yang perlu dibenahi pada tahun mendatang antara lain sesuai rekomendasi Menpan RB antara lain:

1. Mereviu kembali penetapan target indikator kegiatan utama agar lebih berorientasi peningkatan kinerja dan memenuhi kriteria "Baik" berdasarkan KepmenpanRB no



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

182 tahun 2024. Mereviu Kembali rencana aksi agar lebih relevan dan logis untuk memenuhi kebutuhan pencapaian sasaran RB General. Mereviu kembali indikator output agar lebih relevan dan cukup untuk menjadi indikator menghitung keberhasilan capaian rencana aksi. Mereviu kembali target indikator output agar lebih berorientasi peningkatan kinerja.

2. Mereviu kembali sasaran dan indikator keberhasilan agar lebih relevan untuk mengukur dan mencapai keberhasilan RB Tematik. Menyusun rencana aksi secara etail untuk mendukung capaian keberhasilan RB Tematik

Sasaran	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4	

Keberhasilan Sasaran ini diukur melalui 1 indikator yaitu Nilai SAKIP Daerah dan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

f. Perbandingan antara target dan realisasi 2025

Tabel perbandingan antara target dan realisasi (2025)			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP Daerah	69,00	61,95	89,8

g. Perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir			
Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Nilai SAKIP Daerah	60,36	61,24	61,95

h. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir Renstra dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
Nilai SAKIP Daerah	61,95	71,50	-

i. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	25.354.200	25.354.200	100
TOTAL				

j. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Tabel Program dan Kegiatan (2025)		
No	PROGRAM	KEGIATAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

1	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
---	--	--

Sumber Data : Bagian Organisasi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Klasifikasi nilai laporan kinerja berdasarkan Permenpan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP penilaian SAKIP mempunyai kategori sebagai berikut:

1. AA Nilai > 90 - 100 (Sangat Memuaskan)
2. A Nilai > 80 – 90 (Memuaskan)
3. BB Nilai > 70 – 80 (Sangat Baik)
4. B Nilai > 60 -70 (Baik)
5. CC Nilai > 50 – 60 (Cukup)
6. C Nilai > 30 – 50 (Kurang)
7. D Nilai > 0 – 30 (Sangat Kurang)

Untuk tahun 2025, nilai hasil evaluasi/penilaian terhadap SAKIP Tahun 2025 Kabupaten Toraja Utara mendapat Nilai B 61,95 dengan kategori B, nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 61,24. Belum tercapainya target disebabkan antara lain yaitu penetapan sasaran pada dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah dan Pemda belum seluruhnya berorientasi hasil dan belum dilengkapi dengan indikator yang SMART. Oleh karena itu, pada tahun 2025 dilakukan pelatihan sistem perencanaan untuk meningkatkan kemampuan SDM melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan menyusun laporan kinerja.

Agar penerapan akuntabilitas kinerja, lebih efektif maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

Catatan :

- Masih ditemukan tujuan dan sasaran kinerja misalnya "Meningkatnya Jaringan Komunikasi dan Informasi Desa" pada perencanaan level pemerintah daerah yang belum berorientasi hasil. Formulasi tujuan/sasaran cenderung bersifat output–activity oriented dan belum menggambarkan perubahan yang ingin dicapai pada level outcome. Kondisi ini menunjukkan bahwa logika perencanaan belum sepenuhnya mengarahkan instansi pada pencapaian manfaat nyata bagi masyarakat.
- Identifikasi Critical Success Factors (CSF) pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara belum berbasis data dan bukti yang relevan dengan kondisi atau isu strategis yang dihadapi. Penetapan CSF cenderung bersifat normatif atau sekadar menyalin dari contoh umum, sehingga tidak mencerminkan faktor pengungkit spesifik yang benar-benar mempengaruhi pencapaian hasil akhir dari kabupaten Toraja Utara.
- Masih ditemukan penetapan target kinerja pada perencanaan kinerja level pemerintah daerah belum sepenuhnya didasarkan pada data dan tren capaian periode sebelumnya. Target tidak memperlihatkan keterkaitan logis dengan performa historis sehingga tidak menggambarkan proyeksi peningkatan kinerja yang akurat dan berbasis bukti.
- Indikator Kinerja Utama (IKU) pada perencanaan level pemerintah daerah belum memenuhi prinsip SMART-C. Sebagian indikator belum relevan dalam mengukur sasaran hasil, contohnya indikator "Persentase Lembaga/Kelurahan yang memiliki lembaga adat



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

yang aktif" dalam mengukur sasaran kinerja "Meningkatnya kehidupan sosial budaya yang harmonis", sebagian lagi tidak cukup mencerminkan capaian yang ingin diwujudkan, contohnya indikator kinerja "Persentase kelembagaan keagamaan yang efektif dan berfungsi" dalam mengukur sasaran kinerja "Meningkatnya kualitas kehidupan beragama". Kondisi ini mengurangi kemampuan IKU untuk menggambarkan pencapaian outcome secara akurat.

- Sebagian indikator kinerja di tingkat pemerintah daerah maupun tingkat OPD belum memiliki penanggung jawab pengukuran (PIC) yang ditetapkan secara jelas. Ketiadaan PIC menyebabkan proses pengumpulan data, verifikasi, dan pelaporan kinerja menjadi tidak terkoordinasi serta menimbulkan potensi ketidakkonsistenan dalam hasil pengukuran.
- Instansi belum memiliki dashboard monitoring kinerja yang dapat menampilkan perkembangan capaian secara berkala. Ketiadaan dashboard ini membuat proses pemantauan, deteksi dini deviasi, serta pengambilan keputusan berbasis data menjadi kurang optimal.
- Pelaporan kinerja masih bersifat deskriptif dan hanya memuat uraian kegiatan atau capaian angka tanpa analisis evaluatif. Pada beberapa ketercapaian kinerja, baik di level pemerintah daerah maupun OPD, tidak terdapat penjelasan mengenai penyebab keberhasilan atau kegagalan, dampak terhadap sasaran hasil, maupun langkah korektif yang diperlukan. Hal ini membuat laporan tidak dapat berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan dan pembelajaran kinerja.
- Pada beberapa OPD, masih ditemukan pelaporan kinerja yang tidak konsisten dengan dokumen perencanaan. Beberapa indikator yang tercantum dalam rencana kinerja tidak muncul dalam laporan tanpa penjelasan ataupun keterangan. Ketidakhadiran indikator ini menimbulkan celah dalam akuntabilitas dan menyulitkan penelusuran kontribusi kinerja secara utuh.
- Instansi belum memiliki SOP atau pedoman baku yang mengatur pelaksanaan evaluasi internal kinerja. Ketiadaan standar ini membuat proses evaluasi berjalan tidak seragam antar unit, tidak terdokumentasi dengan baik, dan sulit memastikan kualitas evaluasi yang konsisten dari tahun ke tahun.
- Proses Evaluasi Internal pada kabupaten Toraja Utara masih lemah kualitasnya. Belum terdapat laporan hasil evaluasi sebagai media untuk menyajikan temuan kritis yang menggambarkan akar masalah dan area kinerja yang perlu diperbaiki. Sehingga tidak ada rekomendasi perbaikan yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi.
- Evaluator internal pada Kabupaten Toraja Utara belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai metodologi evaluasi kinerja. Keterbatasan ini menyebabkan proses evaluasi kurang tajam, tidak konsisten dengan prinsip evaluasi berbasis hasil, dan berisiko menghasilkan analisis yang tidak akurat sebagai dasar pengambilan keputusan.

Rekomendasi :

- Instansi perlu melakukan perbaikan terhadap tujuan dan sasaran agar berorientasi pada outcome, dengan memastikan formulasi kinerja mencerminkan perubahan yang ingin diwujudkan. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja agar selaras dengan hasil yang menjadi mandat dan kewenangan instansi.
- Instansi disarankan mengidentifikasi ulang CSF dengan mempertimbangkan bukti empiris, tren kinerja, akar masalah, dan variabel-variabel kritis yang mempengaruhi pencapaian outcome. Perbaikan ini diperlukan untuk memastikan CSF benar-benar menjadi dasar fokus intervensi.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

- Instansi disarankan melakukan penyesuaian target dengan menimbang capaian historis dan dinamika kondisi aktual. Proyeksi kinerja yang lebih berbasis bukti diperlukan untuk menjaga konsistensi antara tren kinerja dan target yang ditetapkan.
- Instansi disarankan meninjau kembali kualitas IKU untuk memastikan keterukuran, relevansi, dan kecukupannya dalam menggambarkan capaian sasaran hasil. Penyesuaian indikator perlu dilakukan agar IKU benar-benar mencerminkan perubahan yang ingin dicapai dan dapat dipantau secara konsisten.
- Instansi perlu menetapkan PIC untuk setiap indikator kinerja secara eksplisit, lengkap dengan tugas, kewenangan, dan mekanisme pelaporan yang harus dipatuhi. Pengukuran indikator hanya dapat diterima apabila dilaporkan oleh PIC yang ditugaskan secara formal.
- Instansi disarankan menyusun mekanisme pemantauan yang lebih terstruktur dengan menampilkan ringkasan capaian indikator dalam format visual. Kehadiran dashboard, meskipun sederhana, diperlukan agar perkembangan kinerja dapat dipantau secara lebih cepat dan terarah.
- Instansi disarankan memperkuat struktur pelaporan dengan memasukkan unsur analisis seperti tren capaian, faktor pendorong dan penghambat, serta risiko terhadap pencapaian akhir. Penambahan elemen evaluatif ini diperlukan agar laporan dapat memberikan gambaran utuh mengenai kualitas pencapaian kinerja.
- Instansi disarankan melakukan pengecekan silang antara dokumen perencanaan dan laporan kinerja sebelum finalisasi laporan. Setiap indikator yang hilang atau berubah harus dijelaskan melalui keterangan resmi agar alur akuntabilitas tetap jelas dan dapat ditelusuri.
- Instansi disarankan merumuskan panduan evaluasi internal yang lebih terstruktur, termasuk alur kerja, kriteria penilaian, dan tata cara dokumentasi hasil. Pedoman ini akan membantu memastikan bahwa setiap evaluasi dilakukan secara konsisten dan dapat ditelusuri.
- Instansi disarankan meninjau ulang proses evaluasi internal hingga penyusunan laporan evaluasi agar mencakup identifikasi masalah utama, penyebab deviasi, serta rekomendasi perbaikan yang relevan dan realistis. Penguatan konten ini akan membantu memastikan bahwa laporan evaluasi benar-benar memberikan arah perbaikan kinerja.
- Instansi disarankan memperkuat kapasitas evaluator internal dengan memberikan pemahaman yang jelas mengenai prinsip evaluasi berbasis hasil, cara membaca indikator, teknik analisis capaian, serta standar mutu evaluasi. Penguatan ini penting agar proses evaluasi menghasilkan analisis yang valid dan dapat ditindaklanjuti.

Sasaran 5 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui 1 indikator yaitu Nilai IKM dan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

a. Perbandingan antara target dan realisasi 2025

Tabel perbandingan antara target dan realisasi (2025)			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	83,99	84,74	100,89

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir			
Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Indeks Kepuasan Masyarakat	82,15	82,32	84,74

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir Renstra dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja dan target akhir RPJMD			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
Indeks Kepuasan Masyarakat	84,74	84,96	-

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	337.086.850	316.297.285	93,83
TOTAL				

e. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Tabel Program dan Kegiatan (2025)		
No	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum

Sumber Data : BAPPERIDA Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Hanya sebagian kecil OPD yang disurvei sampel yang dipilih sangat minim hanya 21 responden untuk setiap OPD. Sebaiknya semua OPD disurvei dan jumlah responden ditingkatkan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hasil survei 3 tahun terakhir membuktikan presentase kepuasan masyarakat semakin baik/meningkat. Tahun 2023 indeks kepuasan masyarakat 82,15 persen; tahun 2024 meningkat menjadi 82,32 persen dan tahun 2025 menjadi 84,74 dengan klasifikasi baik. Interpretasi bahwa semakin tinggi nilai indikator menunjukkan semakin banyak masyarakat yang puas terhadap pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara yang diterima.

Untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah melakukan survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan pada 21 unit kerja. Hasil survey pada Masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

No	Nama Instansi	IKM	
		Nilai	Klasifikasi



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

1	Kecamatan Sopai	80,16	Baik
2	Kecamatan Kesu	83,63	Baik
3	Kecamatan Sanggalangi	83,19	Baik
4	Kecamatan Tondon	81,93	Baik
5	Kecamatan Tallunglipu	89,42	Sangat Baik
6	Kecamatan Rantepao	83,14	Baik
7	Kecamatan Sesean	86,77	Baik
8	Kecamatan Kapala Pitu	80,22	Baik
9	Dinas PTSP	89,92	Sangat Baik
10	Dinas Kesehatan	88,07	Baik
11	Dinas Pendidikan	85,34	Baik
12	Dinas PUTR	84,61	Baik
13	Dinas Perkimtan	87,05	Baik
14	Dinas Pariwisata	84,84	Baik
15	Dinas Dukcapil	84,07	Baik
16	Dinas Tenaga Kerja	88,03	Baik
17	Dinas Perpustakaan	80,48	Baik
18	SATPOL-PP	87,31	Baik
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	84,72	Baik
20	Dinas Sosial	87,59	Baik
21	Dinas Pertanian	81,07	Baik
Pemerintah Daerah (Overall)		84,74	Baik

Sumber Data: Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Nilai rata-rata IKM dari hasil survey tersebut adalah sebesar 84,84 sehingga dibandingkan dengan target sebesar 83,99 maka capaian indikator ini adalah mencapai 101,10.

Sasaran 6 Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan Daerah

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui 1 indikator yaitu Nilai IPKD dan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

a. Perbandingan antara target dan realisasi 2025

Tabel perbandingan antara target dan realisasi (2025)			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
IPKD	82	Belum rilis	-

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir			
Indikator Kinerja	2023	2024	2025
IPKD	76,42 23	76,4233	Belum Rilis



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir RPJMD dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja, Target Akhir RPJMD			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Target Nasional
IPKD	Belum Rilis	85	-

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Program Pengelolaan Keuangan daerah	163.399.277.840	133.449.341.272	81,67
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	437.611.740	353.663.200	80,82
TOTAL				

e. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Tabel Program dan Kegiatan (2025)		
No	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Pengelolaan Keuangan daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sumber Data : BKAD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Berdasarkan tabel perbandingan antara target dan realisasi tahun 2025, target IPKD ditetapkan sebesar 82, namun realisasi kinerja masih belum dirilis, sehingga capaian terhadap target belum dapat dihitung.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dalam tiga tahun terakhir, nilai IPKD pada tahun 2023 tercatat sebesar 76,42, kemudian pada tahun 2024 sebesar 76,4233, sedangkan untuk tahun 2025 masih belum dirilis. Hal ini menunjukkan bahwa nilai IPKD relatif stabil pada dua tahun sebelumnya, sementara hasil penilaian tahun 2025 masih menunggu rilis resmi.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Tujuan 5 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Merata

Keberhasilan sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat merata Indikator yaitu PDRB. Hasil Pengukuran Kinerja terhadap masing-masing Indikator tersebut

**Analisis Pencapaian Tujuan Strategi 5
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Merata**

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
PDRB/kapita	Rp.juta	42,12	47,73*	113,3	45,03	50,63**	112,43
Rasio Gini	Angka/ Skor	0,367	0,316	113,8	0,366	0,285	122,13
Rata-rata capaian Kinerja							

Sumber Data : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Ket : * Angka Sementara

**** Angka Sangat Sementara**

Analisis pencapaian Tujuan Strategis 5, yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara merata, yang diukur melalui dua indikator utama: PDRB per kapita dan Rasio Gini pada tahun 2024 dan 2025. Secara umum, kinerja kedua indikator menunjukkan capaian yang melampaui target.

- PDRB per kapita mengalami peningkatan dari target Rp42,12 juta pada 2024 menjadi realisasi Rp47,73 juta, dengan capaian kinerja 113,3%. Pada tahun 2025, target meningkat menjadi Rp45,03 juta dan realisasinya kembali lebih tinggi yaitu Rp50,63 juta, dengan capaian 112,43%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata masyarakat terus meningkat dan melampaui target yang ditetapkan.
- Rasio Gini (indikator ketimpangan) menunjukkan hasil yang lebih baik dari target. Pada 2024, target 0,367 berhasil ditekan menjadi 0,316 dengan capaian 113,8%. Pada 2025, target 0,366 turun lebih jauh menjadi 0,285 dengan capaian 122,13%. Karena semakin rendah nilai Rasio Gini semakin baik, ini berarti tingkat ketimpangan pendapatan semakin menurun.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya meningkat dari sisi pendapatan, tetapi juga semakin merata, ditunjukkan oleh peningkatan PDRB per kapita dan penurunan ketimpangan (Rasio Gini) yang keduanya melampaui target.

Nilai Rasio Gini	Distribusi Pendapatan
...< 0,40	Tingkat Ketimpangan Rendah
0,40-0,50	Tingkat Ketimpangan Sedang
...>0,50	Tingkat Ketimpangan Tinggi



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Toraja Utara, Rasio Gini Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 sebesar 0,285 menandakan bahwa ketimpangan pendapatan berada pada Tingkat ketimpangan rendah.

**Sasaran 7 Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Sektor-sektor
Perekonomian Daerah**

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Hasil pengukuran Kinerja terhadap masing-masing indikator tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Analisis Pencapaian Tujuan Strategi 5
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Merata**

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Pertumbuhan Ekonomi	Angka/ Skor	6-7,5	4,49	74,8	6-7,5	5,36	89,3
Rata-rata capaian Kinerja							

Sumber Data : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator pertumbuhan ekonomi dengan satuan angka/skor (persentase). Target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 ditetapkan pada kisaran 6–7,5 persen. Namun realisasinya hanya mencapai 4,49 persen, sehingga capaian kinerja tahun 2024 sebesar 74,8 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, target pertumbuhan ekonomi tetap berada pada kisaran 6–7,5 persen. Realisasi tahun 2025 sebesar 5,36 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Capaian kinerja tahun 2025 mencapai 89,3 persen. Meskipun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi tersebut masih berada di bawah batas minimal target sebesar 6 persen.

Secara keseluruhan, terjadi perbaikan nilai pertumbuhan ekonomi dari 4,49 persen pada tahun 2024 menjadi 5,36 persen pada tahun 2025. Namun capaian tersebut masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan upaya lanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar sesuai dengan sasaran yang direncanakan.

Sasaran 8 Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja

Keberhasilan sasaran meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja. Hasil pengukuran kinerja terhadap masing-masing indikator tersebut sebagaimana terlihat pada table berikut

Analisis Pencapaian sasaran Strategi 8



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	3,02	2,44	119,2	2,60	2,01	122,69
Rata-rata capaian Kinerja							

Sumber Data : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan satuan angka (persentase). Perlu dipahami bahwa untuk indikator ini semakin rendah nilainya maka semakin baik, karena menunjukkan semakin sedikit penduduk yang menganggur dan semakin banyak tenaga kerja yang terserap.

Pada tahun 2024, target Tingkat Pengangguran Terbuka ditetapkan sebesar 3,02 persen, sedangkan realisasinya sebesar 2,44 persen. Karena realisasi lebih rendah dari target, maka capaian kinerja mencapai 119,2 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan lebih baik dari yang direncanakan, dengan tingkat pengangguran yang lebih rendah dari target.

Pada tahun 2025, target ditetapkan sebesar 2,60 persen dan realisasinya sebesar 2,01 persen. Capaian kinerja tahun 2025 mencapai 122,69 persen. Realisasi yang semakin rendah ini menunjukkan penyerapan tenaga kerja yang semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dari 2,44 persen pada tahun 2024 menjadi 2,01 persen pada tahun 2025. Karena indikator ini bersifat negatif (semakin kecil semakin baik), maka penurunan tersebut menggambarkan peningkatan kinerja dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di daerah.

Sasaran 9 Berkurangnya Kemiskinan Daerah

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator Angka Kemiskinan (%). Hasil pengukuran kinerja terhadap indikator ini sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Analisis Pencapaian sasaran Strategi 8
Berkurangnya Kemiskinan Daerah**

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Angka Kemiskinan	%	11,41	10,73	105,9	11,36	10,05	113
Rata-rata capaian Kinerja							

Sumber Data : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator Angka Kemiskinan (%). Untuk indikator ini, semakin rendah persentasenya maka semakin baik, karena menunjukkan jumlah penduduk miskin semakin berkurang.

Pada tahun 2024, target angka kemiskinan ditetapkan sebesar 11,41 persen, sedangkan realisasinya sebesar 10,73 persen. Karena realisasi lebih rendah dari target, capaian kinerja tahun 2024 mencapai 105,9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penurunan kemiskinan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, target angka kemiskinan sebesar 11,36 persen dan realisasinya sebesar 10,05 persen. Capaian kinerja tahun 2025 mencapai 113 persen. Realisasi yang lebih rendah dari tahun sebelumnya menunjukkan kondisi kemiskinan yang semakin membaik.

Secara keseluruhan, angka kemiskinan menurun dari 10,73 persen pada tahun 2024 menjadi 10,05 persen pada tahun 2025. Karena indikator ini bersifat negatif (semakin kecil semakin baik), maka penurunan tersebut mencerminkan peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran 10 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah

Keberhasilan sasaran Meningkatkan kualitas infrastruktur Daerah melalui 2 Indikator yaitu Indeks Daya saing Infrastruktur dan Indeks Rasio Bencana. Hasil pengukuran kinerja terhadap masing-masing indikator tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi 2025

Tabel perbandingan antara target dan realisasi (2025)			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Daya Saing Infrastruktur	76,62	56,39	73
Indeks Resiko Bencana	149,6	144,97	103,09

Indikator Kinerja Utama Indeks Risiko Bencana mengalami penurunan dari nilai 143,14 di tahun 2024 menjadi 143,97 di tahun 2025 atau naik 1,93 poin. (Berdasarkan surat dari BNPB Nomor B-56/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026, tanggal 30 Januari 2026, perihal Penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025 dari Provinsi Sulawesi Selatan, dimana hasil penilaian Indeks Resiko Bencana mengalami peningkatan, dalam artian bahwa kinerja BPBD Kab. Toraja Utara mengalami penurunan, hal ini dikarenakan mekanisme penilaian indeks Resiko bencana dihitung dengan menggunakan baseline terbaru yang telah dimutakhirkan dengan menggunakan komponen jenis bencana atau kerentanan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

mengalami kenaikan dari 8 jenis menjadi 11 jenis bencana, sehingga target indeks resiko bencana yang direncanakan mengalami kenaikan. Menurut BNPB hasil perhitungan IRB pada periode 2015 sampai 2024 tidak bisa dibandingkan karena cara perhitungannya mengalami perubahan)..

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir			
Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Indeks Daya Saing Infrastruktur	76,62	69,27	56,39
Indeks Resiko Bencana	150	143,14	144,97

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir RPJMD dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja dan Target akhir RPJMD			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
Indeks Daya Saing Infrastruktur	56,39	76,8	-
Indeks Resiko Bencana	143,04	149,5	

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Program Penanggulangan Bencana	21.209.951.218	20.449.444.269	96,41%
2	Program Pengembangan Perumahan	225,000,000	210,000,000	93.33%
3	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	266,360,000	261,600,400	98.21%
4	Program Penyelenggaraan Jalan	77,129,658,367	69,560,597,298	90.19%
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1,330,700,000	1,330,578,700	99.99%
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	466,213,584	466,121,960	99.98%
7	Program Pengembangan Perumahan	225,000,000	210,000,000	93.33%
TOTAL				

e. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Tabel Program dan Kegiatan (2025)		
No	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
2	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
3	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
4	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Data : Disperkimtan-LH DAN PUTR Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Indikator	%	Bobot (%)	Indeks (%)
Kemantapan Jalan Kabupaten	53.52	25.00	13.38
Akses Air Minum Layak	60.77	17.50	10.63
6Akses Sanitasi Layak	41.81	17.50	7.32
Pemukiman Layak Huni (Tidak Kumuh)	68.77	17.50	12.03
Rumah Layak Huni	66.15	17.50	11.58
Persentase Panjang Jalan yang memenuhi kriteria jalan yang berke4selamatan	29.02	5.00	1.45
Indeks Daya Saing Infrastruktur		100.00	56,39

Indeks Resiko Bencana adalah dasar untuk memahami ancaman bencana, kerentanan, dan kapasitas suatu daerah. Perhitungan Tingkat risiko di setiap kabupaten dilakukan dengan memperhatikan factor Hazard (bahaya), Vulnerability (Kerentanan) dan Capacity (Kapasitas).

Sesuai dengan buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2025 yang diterbitkan oleh Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Toraja Utara berada pada posisi 143,04 dengan kategori tinggi.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Dari data tersebut diatas maka data tersebut sejalan dengan kejadian bencana di Toraja Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tidak tercapai karena : pengisian indicator menyesuaikan 8 jenis bencana sementara dari mengisi 11 jenis bencana (kurang informasi tentang pengisian nilai IKD

Solusi yang sdh dilakukan : konsultasi ke BNPB PUSAT via whatsapp
BPBD memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektifitas dalam penanggulangan bencana yaitu :

1. Keterbatasan Sumber Daya baik sumber daya manusia, peralatan, dan Anggaran
2. Kurangnya kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana

Solusi :

1. BPBD melaksanakan beberapa Bimtek/Pelatihan dalam menangani bencana
2. Melaksanakan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti : BPBD Kabupaten Toraja Utara, Destana PMI dan Komunitas lainnya
3. BPBD telah melakukan pelatihan dengan melibatkan masyarakat/sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesiapan dan kesadaran masyarakat

NO	JENIS BENCANA	JUMLAH KEJADIAN	WILAYAH TERDAMPAK (KECAMATAN)
1	Longsor	73	21
2	Angin Putting Beliung	18	8
3	Kebakaran	9	4
4	Banjir (Air Sungai Meluap)	2	1
TOTAL TITIK KEJADIAN		102	-

Sasaran 10 Meningkatkan Kemandirian Pangan Masyarakat

a. Perbandingan antara target dan realisasi 2025

Tabel perbandingan antara target dan realisasi (2025)			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Skor Pola Pangan Harapan	88,19	88,69	100,6

Pada tahun 2025, target Skor Pola Pangan Harapan ditetapkan sebesar 88,19, sedangkan realisasinya mencapai 88,69. Dengan capaian sebesar 100,6%, artinya kinerja tahun 2025 melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam upaya peningkatan kualitas dan keberagaman konsumsi pangan masyarakat.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir			
Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Skor Pola Pangan Harapan	81,10	81,09	88,69

Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2023–2024 nilai relatif stabil, kemudian terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2025. Kenaikan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam pola konsumsi pangan masyarakat dibandingkan dua tahun sebelumnya



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir RPJMD dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja dan target akhir RPJMD			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
Skor Pola Pangan Harapan	88,69	81,09	92,5

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	15.008.200	13.757.364	91,67
TOTAL				

penggunaan anggaran cukup efisien karena tidak seluruh anggaran terserap, namun capaian kinerja tetap melampaui target. Hal ini menunjukkan bahwa program berjalan efektif dengan pemanfaatan sumber daya yang optimal.

e. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Tabel Program dan Kegiatan (2025)		
No	PROGRAM	KEGIATAN
1	Pemanfaatan Pangan Sumber Daya Lokal	1. Pembinaan/pendampingan Kelompok Wanita Tani Memanfaatkan Lahan Pekarangan sebagai Sumber Pangan dan Gizi Masyarakat
		2. Festival Lomba B2SA Pangan Lokal Tingkat Provinsi
		3. Himbauan Mengonsumsi Pangan Sumber Daya Lokal pada Setiap Kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat serta pengelola Hotel, Restoran dan Rumah Makan

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Skor Pola Pangan Harapan adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energy dari kelompok pangan utama pada Tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrument untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk Menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan dengan mempertimbangkan aspek social, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Dan juga dapat di jadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. PPH juga merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan kondisi keberagaman ketersediaan pangan suatu wilayah (makro).

Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi masyarakat mengalami peningkatan pada tahun 2025. Hal ini didukung dengan oleh pola konsumsi pangan yang sudah mulai seimbang baik itu konsumsi pangan sumber protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral dengan memanfaatkan sumber daya pangan lokal.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Sasaran 11 Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Utama Masyarakat

Untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2025, disajikan tabel perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan. Tabel ini memuat informasi mengenai target yang direncanakan, realisasi yang dicapai, serta persentase capaian kinerja sebagai bentuk pengukuran atas pelaksanaan program dan kegiatan

a. Perbandingan antara target dan realisasi 2025

Tabel perbandingan antara target dan realisasi (2025)			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Ketersediaan Energi Perkapita (kkal/kapita/hari)	2328,53	1.954	83,91
Ketersediaan Protein Perkapita (gram/kapita/hari)	62.87	61.30	97.50%

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir			
Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Ketersediaan Energi Perkapita (kkal/kapita/hari)	2.100	1.819	1.954
Ketersediaan Protein Perkapita (gram/kapita/hari)	60.00	54.70	61.30

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir RPJMD dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPJMD			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
Ketersediaan Energi Perkapita (kkal/kapita/hari)	1.954	2.323	-
Ketersediaan Protein Perkapita (gram/kapita/hari)	62.87	62.87	

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Rp 5,667,400	Rp 5,667,400	100.00%
2	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Rp 3,248,400	Rp 3,248,400	100.00%
TOTAL				

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Tujuan 8 Meningkatkan Peran Pemuda Dalam Pembangunan

Dalam rangka mengukur capaian kinerja pada Tujuan 8 “Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan”, dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi ini disajikan melalui beberapa tabel yang menggambarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025, perkembangan realisasi kinerja dalam tiga tahun terakhir, serta perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target akhir Rencana Strategis dan target nasional. Selain itu, disajikan pula analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk memberikan gambaran keterkaitan antara capaian kinerja dengan pemanfaatan anggaran.

e. Perbandingan antara target dan realisasi 2025

Tabel perbandingan antara target dan realisasi (2025)			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	0.72	2,01	279

f. Perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir			
Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	0.06	0,17	2,01

g. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir RPJMD dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja dan target akhir RPJMD			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	1,04	0,9	-

h. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,143,143,819	2,110,177,883	98.46%
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	429,730,732	429,250,241	99.89%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	9,095,895,413	8,894,009,118	97.78%
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	105,620,000	105,620,000	100.00%
TOTAL				

i. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Tabel Program dan Kegiatan (2025)		
No	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kab/ Kota
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah- Kab/Kota.
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah

Sumber Data : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan Ekonomi mandiri dapat di hitung dengan formula sbb

$$\begin{aligned}
 \text{partisipasi pemuda} &= \frac{\text{jumlah pemuda (16-30 tahun) berwirausaha}}{\text{jumlah pemuda di kabupaten Toraja Utara}} \times 100\% \\
 \text{partisipasi pemuda} &= \frac{1436}{71116} \times 100\% \\
 &= 2,01
 \end{aligned}$$



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Penyebab kenaikan ini didorong oleh dominasi sektor pertanian, perikanan, dan pengolahan yang menyerap 746 pemuda, serta kuatnya sektor perdagangan dan jasa di wilayah perkotaan seperti Rantepao dan Tallunglipu. Namun, tantangan utama yang harus diatasi adalah ketimpangan partisipasi yang sangat tajam di wilayah pelosok, seperti Denpina yang hanya mencatat 1 orang Wirausaha muda dan tiga orang di Awan Rantekarua, sehingga fokus perbaikan ke depan adalah pemerataan akses informasi serta pendampingan kewirausahaan ke kecamatan-kecamatan dengan angka partisipasi rendah guna menciptakan pertumbuhan ekonomi mandiri yang lebih inklusif di seluruh Toraja Utara.

USIA PEMUDA 16-30 TAHUN
KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	PR	LK2	JUMLAH
1	RANTEPAO	3859	3769	7628
2	SESEAN	1867	1645	3512
3	NANGGALA	1345	1158	2503
4	RINDINGALLO	1309	1142	2451
5	BUNTAO	1429	1417	2846
6	SA'DAN	2920	2704	5624
7	SANGGALANGI	1759	1706	3465
8	SOPAI	2180	2104	4284
9	TIKALA	1853	1751	3604
10	BALUSU	1117	994	2111
11	TALLUNGLIPU	2843	2814	5657
12	DENDE' PIONGAN NAPO	1202	1198	2400
13	BUNTU PEPASAN	2350	2235	4585
14	BARUPPU	1055	945	2000
15	KESU	2511	2462	4973
16	TONDON	1645	1551	3196
17	BANGKELEKILA	1145	1057	2202
18	RANTEBUA	1268	1073	2341
19	SESEAN SULOARA	1055	976	2031
20	KAPALA PITU	1094	984	2078
21	AWAN RANTE KARUA	819	806	1625
	TORAJA UTARA	36625	34491	71116

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2025

Sasaran 12 Meningkatkan Prestasi Pemuda



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

a. Perbandingan antara target dan realisasi 2025

Tabel perbandingan antara target dan realisasi (2025)			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
% Peningkatan Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional	2.06	1.62	78.64 %

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir			
Indikator Kinerja	2023	2024	2025
% Peningkatan Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional	2.8	1.05	1.62

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir Renstra dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja Dan target akhir RPJMD			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
% Peningkatan Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional	1.62	2,21	-

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,143,143,819	2,110,177,883	98.46%
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	429,730,732	429,250,241	99.89%
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	9,095,895,413	8,894,009,118	97.78%
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	105,620,000	105,620,000	100.00%
TOTAL				

e. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Tabel Program dan Kegiatan (2025)		
No	PROGRAM	KEGIATAN
1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kab/ Kota
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah- Kab/Kota.
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah

Sumber Data : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Permasalahan/ Kendala

1. Jumlah pemuda yang mampu menembus prestasi tingkat nasional masih terbatas
2. Kejuaraan tingkat nasional tidak dilaksanakan secara rutin setiap tahun
3. Pembinaan dan pendampingan belum merata di seluruh cabang olahraga
4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung latihan dan kompetisi
5. Keterbatasan anggaran pembinaan prestasi nasional
6. Keterbatasan Pelatih untuk beberapa Cabang Olahraga.
7. Masih Kurangnya minat Pemuda pada cabang olahraga Tertentu

Solusi yang telah dilakukan :

1. Melakukan seleksi dan pembinaan terfokus pada pemuda dan atlet potensial berprestasi
2. Memaksimalkan keikutsertaan pada kejuaraan regional sebagai ajang persiapan dan seleksi menuju tingkat nasional
3. Memprioritaskan pembinaan pada cabang olahraga yang memiliki potensi dan rekam jejak prestasi
4. Mengoptimalkan fasilitas yang tersedia serta menjalin kerja sama dengan pihak terkait untuk mendukung kebutuhan latihan
5. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan KONI, cabang olahraga, dan mitra terkait untuk optimalisasi sumber daya
6. Melakukan Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Bakat sejak Usia Dini..



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Tujuan 9 Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Lembang (desa)

Keberhasilan tujuan Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Lembang (desa) melalui Pembangunan desa terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten dalam kegiatan Pembangunan desa. Capaian atas pada indikator tersebut dapat terlihat dalam tabel berikut ini:

a. Perbandingan antara target dan realisasi 2025

Tabel perbandingan antara target dan realisasi (2025)			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks desa membangun (IDM) kabupaten	0,6020	0.6101	101,3

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir			
Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Indeks desa membangun (IDM) kabupaten	0.6020	0.6082	0.6101

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir Renstra dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Target Nasional
Indeks desa membangun (IDM) kabupaten	0.6101	0.6222	-

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.305.706.638,20	3.193.594.569,00	96,61%
2	Program Penataan Desa	764.455.000,00	746.301.000,00	97,63%
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	-	-	-
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	501.007.798,90	489.735.420,00	97,75%
5	Program Pemberdayaan,	1.350.468.153,90	1.349.139.350,00	99,91%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

	Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat			
	TOTAL			

e. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Tabel Program dan Kegiatan (2025)		
No	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Penataan Desa	Penyelenggara an Penataan Desa
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerja sama antar Desa
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
		Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
4	Program Pemberdayaan, Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Dalam Upaya menyejahterakan rakyat, pemerintah membuat beberapa Langkah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang positif dan sustainable, salah satunya adalah melalui program Pembangunan desa. Untuk melaksanakan program tersebut diperlukan ketersediaan data dasar yang dipetakan dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun (IDM) ini nantinya dapat digunakan untuk menetapkan status kemajuan suatu desa dan merupakan indikator penting untuk menetapkan status kemajuan suatu desa dan merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan suatu desa dalam melakukan pembangunannya,

Permasalahan yang dihadapi Adalah Terjadi keterlambatan dan ketidaksesuaian dalam pelaporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pihak ketiga selaku rekanan. Laporan pertanggungjawaban tersebut tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan serta tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kendala dalam proses administrasi, pengendalian keuangan, serta menghambat pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan oleh pihak terkait. Selain itu, ketidaktepatan dalam tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban dapat



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

menyebabkan ketidakakuratan data, risiko temuan administrasi, serta berpengaruh terhadap akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan.

Solusi : Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Melakukan Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban

Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pihak ketiga, baik dari aspek kelengkapan dokumen, kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku, maupun ketepatan perhitungan dan penggunaan anggaran. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh laporan telah disusun secara benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Melakukan Konfirmasi Terkait Waktu dan Tata Cara Pertanggungjawaban

Melakukan konfirmasi secara resmi kepada pihak rekanan mengenai batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban serta tata cara dan prosedur penetapan pertanggungjawaban yang harus dipatuhi. Konfirmasi ini dilakukan untuk memberikan kejelasan dan pemahaman yang sama antara para pihak, sehingga diharapkan ke depan laporan pertanggungjawaban dapat disampaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dengan dilaksanakannya langkah-langkah tersebut, diharapkan proses pelaporan pertanggungjawaban oleh pihak ketiga dapat berjalan lebih tertib, tepat waktu, dan sesuai prosedur, serta mendukung terciptanya tata kelola administrasi yang baik, transparan, dan akuntabel.

Sasaran 13 Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Ekologi Lembang (Desa)

Capaian kinerja sasaran 13 Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Ekologi Lembang (Desa) sebagai berikut:

:

a. Perbandingan antara target dan realisasi 2025

Tabel perbandingan antara target dan realisasi (2025)			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
% Lembang Kualifikasi Maju	4,50	4,50	100%

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir			
Indikator Kinerja	2023	2024	2025
% Lembang Kualifikasi Maju	2,70	4,50	4,50

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir Renstra dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir			
---	--	--	--



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Target Nasional
% Lembang Kualifikasi Maju	4,50	5,40	

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.305.706.638,20	3.193.594.569,00	96,61%
2	Program Penataan Desa	764.455.000,00	746.301.000,00	97,63%
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	-	-	-
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	501.007.798,90	489.735.420,00	97,75%
5	Program Pemberdayaan, Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat	1.350.468.153,90	1.349.139.350,00	99,91%
TOTAL				

e. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Tabel Program dan Kegiatan (2025)		
No	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerja sama antar Desa
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
		Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
4	Program Pemberdayaan, Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Toraja Utara Tahun 2025



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Masih sedikitnya desa yang mampu berkembang dan maju disebabkan oleh berbagai permasalahan yang saling berkaitan. Salah satu masalah utama adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sebagian besar masyarakat desa memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang terbatas, sehingga sulit beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan ekonomi. Pola pikir yang masih tradisional juga membuat masyarakat kurang berani berinovasi dan mencoba peluang baru.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur menjadi penghambat utama pembangunan desa. Kondisi jalan yang rusak, akses transportasi yang sulit, serta keterbatasan jaringan internet dan listrik menyebabkan aktivitas ekonomi dan pelayanan publik tidak berjalan optimal. Hal ini membuat desa semakin tertinggal dibandingkan dengan wilayah perkotaan.

Permasalahan lain terletak pada pengelolaan dana desa yang belum maksimal. Kurangnya perencanaan yang matang, transparansi, dan pendampingan menyebabkan dana desa belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, pembangunan desa sering kali bersifat jangka pendek dan tidak berkelanjutan.

Dari sisi ekonomi, desa masih bergantung pada sektor primer seperti pertanian tradisional yang memiliki nilai tambah rendah. Produk hasil desa umumnya dijual dalam bentuk mentah, sehingga keuntungan yang diperoleh masyarakat sangat terbatas. Ditambah lagi, minimnya akses modal dan pasar membuat usaha masyarakat sulit berkembang. Kondisi ini mendorong generasi muda untuk merantau ke kota demi mencari pekerjaan yang lebih menjanjikan, sehingga desa kehilangan tenaga produktif dan ide-ide kreatif.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan upaya terpadu dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi langkah awal yang penting melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan kewirausahaan. Pembangunan infrastruktur juga harus dilakukan secara merata agar desa memiliki akses yang sama terhadap transportasi, teknologi, dan layanan publik.

Pengelolaan dana desa perlu dilakukan secara transparan dan tepat sasaran dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan BUMDes, UMKM, dan produk unggulan desa dapat meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja. Dukungan terhadap generasi muda serta kepemimpinan desa yang visioner dan inovatif juga menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa.

Dengan pengelolaan yang baik dan dukungan semua pihak, desa memiliki potensi besar untuk berkembang dan menjadi mandiri. Kemajuan desa pada akhirnya akan berkontribusi pada pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sasaran 13 Mengurangi Penyakit Sosial Dalam Masyarakat

Keberhasilan tujuan mengurangi penyakit sosial dalam masyarakat melalui pengendalian gangguan ketentraman dan ketertiban terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase penurunan angka kriminalitas dalam kegiatan Rasia, Patroli dan Pengawasan. Capaian atas pada indikator tersebut dapat terlihat dalam tabel berikut ini:



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

a. Perbandingan antara target dan realisasi 2025

Tabel perbandingan antara target dan realisasi (2025)			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
% Penurunan Angka Kriminalitas	3,20	3.2	100

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir			
Indikator Kinerja	2023	2024	2025
% Penurunan Angka Kriminalitas	1,43	0,99	3.2

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir RPJMD dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja dan target akhir RPJMD			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Target Nasional
% Penurunan Angka Kriminalitas	3,2	3,10	3,10

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7,647,185,451	Rp 7,418,788,210	97.01%
2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp 974,323,500	Rp 939,627,452	96.44%
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 379,973,706	Rp 379,571,778	99.89%
TOTAL				

e. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

TABEL PROGRAM DAN KEGIATAN (2025)		
NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

	Daerah Kabupaten/Kota	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Sumber Data : SATPOL PP Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Untuk Menghitung penurunan angka kriminalitas, dilakukan terlebih dahulu perhitungan terhadap indeks kriminalitas. Adapun perhitungan indeks kriminalitas terdapat pada rumus dibawah ini

$$\text{indeks kriminalitas} = \frac{\text{tindak kriminal yang tertangani 1 tahun}}{\text{jumlah penduduk}} \times 10.000$$

$$\text{indeks kriminalitas} = \frac{403}{268.717} \times 10.000$$

$$= 15$$

Untuk mengitung persentase penurunan angka kriminalitas Adalah

$$\text{Penurunan} = \frac{\text{indeks lama} - \text{indeks Baru}}{\text{indeks lama}} \times 100$$

Indeks kriminalitas tahun 2024 adalah 15,51 dan indeks kriminalitas tahun 2025 adalah 15 maka diperoleh nilai sebagai berikut:

$$\text{Penurunan} = \frac{15,51 - 15}{15,51} \times 100$$

$$= 3.2$$

Sasaran 14 Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Capaian kinerja sasaran 14 Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Perbandingan antara target dan realisasi 2025

Tabel perbandingan antara target dan realisasi (2025)			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
% Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir			
Indikator Kinerja	2023	2024	2025
% Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	91%	100%	100%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir Renstra dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Target Nasional
% Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7,647,185,451	7,418,788,210	97.01
2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	974,323,500	939,627,452	96.44
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	379,973,706	379,571,778	99.89
TOTAL				

e. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Tabel Program Dan Kegiatan (2025)		
No	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		2. Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Kab/Kota



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota
		2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
		3. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran
		4. Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

Sumber Data : SATPOLKabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Pencapaian indikator kinerja persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan sebesar 100% pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah telah berjalan secara optimal. Keberhasilan tersebut didukung oleh meningkatnya koordinasi lintas sektor dengan aparat keamanan dan perangkat wilayah, pelaksanaan patroli rutin dan terpadu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta dukungan kebijakan dan penganggaran daerah yang selaras dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana operasional yang belum sepenuhnya memadai, belum meratanya kompetensi teknis seluruh personel, serta sistem pendataan dan pelaporan gangguan ketertiban yang masih bersifat manual. Selain itu, dinamika sosial masyarakat yang semakin kompleks turut meningkatkan potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang memerlukan penanganan lebih komprehensif.

Sebagai tindak lanjut atas kendala tersebut, perangkat daerah telah dan terus melakukan berbagai upaya perbaikan, antara lain melalui pengusulan penambahan personel secara bertahap, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana operasional, peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis, penyusunan dan penerapan standar pelaporan kinerja penanganan gangguan ketertiban, serta penguatan upaya preventif melalui sosialisasi peraturan daerah dan pembinaan kepada masyarakat. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan pencapaian kinerja serta meningkatkan kualitas pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum pada tahun-tahun berikutnya..

Sasaran 15 Meningkatnya intensitas kegiatan lembaga keagamaan

Capaian kinerja sasaran 15 Meningkatnya intensitas kegiatan lembaga keagamaan

a. Perbandingan antara target dan realisasi 2025

Tabel perbandingan antara target dan realisasi (2025)			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Cakupan Kegiatan Lembaga Keagamaan	6	6	100

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir			
Indikator Kinerja	2023	2024	2025



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Cakupan Kegiatan Lembaga Keagamaan	115	115	99
------------------------------------	-----	-----	----

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir Renstra dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Target Nasional
Cakupan Kegiatan Lembaga Keagamaan	99	100	

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 2,824,727,200	Rp 2,744,727,200	97.17
TOTAL				

e. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Tabel Program dan Kegiatan (2025)		
No	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Sumber Data : Bagian KESRA Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Untuk mengetahui capaian kinerja pada Sasaran 15 “Meningkatnya Intensitas Kegiatan Lembaga Keagamaan”, dilakukan pengukuran dan evaluasi terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penyajian capaian kinerja dilakukan melalui perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025, analisis perkembangan realisasi kinerja dalam tiga tahun terakhir, serta perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target akhir Rencana Strategis dan target nasional. Selain itu, disajikan pula analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta uraian program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja

Sasaran 15 Berkembangnya Kehidupan Beragama dalam Kehidupan Bermasyarakat

Capaian kinerja sasaran 15 Meningkatkan intensitas kegiatan lembaga keagamaan

a. Perbandingan antara target target dan realisasi 2025

Tabel perbandingan antara target target dan realisasi (2025)			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Cakupan kegiatan Lembaga keagamaan yang dibina	103,13	99	95,99

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Cakupan kegiatan Lembaga keagamaan yang dibina	100	100	99

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir RPJMD dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja dan target akhir RPJMD			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
Cakupan kegiatan Lembaga keagamaan yang dibina	99	100	-

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 2,824,727,200	Rp 2,744,727,200	97.17
TOTAL				

e. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Tabel Program dan Kegiatan (2025)		
No	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Sumber Data : Bagian KESRA Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

DAFTAR NAMA PENERIMA HIBAH

NO	NAMA PENERIMA HIBAH	JUMLAH
	Belanja Hibah Pengadaan Mobil	Rp767.000.000
	- Hewan Kurban Pada Kegiatan Hari Raya Idul Adha Berupa Hewan Kurban	Rp55,200,000.00
	Hibah Penataan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Toraja Utara	Rp50,000,000.00
	Belanja Hibah Penataan Halaman Gereja Toraja Jemaat Rantepao	Rp100,000,000.00
	- Pembangunan Sekolah Alkitab Pantekosta 01 Filadelfia Rantepao	Rp50,000,000.00
	- Kegiatan HARKAMTIBNAS Polres Toraja	Rp400,000,000.00
	- Untuk Palang Merah Indonesia Kabupaten Toraja Utarah	Rp150,000,000.00
	- Kegiatan Ibadah Perayaan Natal Organisasi Persatuan Wanita Kristen Indonesia	Rp15,000,000.00



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

	- Kegiatan Perayaan HUT Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja (PKBGT) ke 17 Klasik Pangala',	Rp45,000,000.00
	- Pengadaan Bangku/Kursi Umat di Gereja Stasi Santa Maria Diangkat Ke Surga Bolu	Rp50,000,000.00
	- Sinode Wilayah Ke-20 Gereja Toraja Wilayah 2 Rantepao	Rp50,000,000.00
	- Pengadaan Alat Musik Gereja Kerapatan Pantekosta Jemaat El-Shaddai Darra'	Rp10,000,000.00
	- Kegiatan Pembangunan Gereja Segala Bangsa (Gesba) Jemaat	Rp10,000,000.00
	- Pengadaan Alat Musik Gereja Kerapatan Pantekosta Jemaat Samaria Randanan	Rp10,000,000.00
	- Kegiatan Pembangunan Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia (GPSDI) Jemaat Yarden Poton	Rp10,000,000.00
	- Kegiatan Pembangunan Gereja Kerapatan Pantekosta (GKP) Jemaat Getsemani To'rea,	Rp10,000,000.00
	- Pembangunan Gedung Gereja Gerakan Pantekosta (GGP) Jemaat Ratte	Rp10,000,000.00
	- Pengadaan Alat Musik dan Soudsystem Gereja Pantekosta di Indonesia Tikala,	Rp20,000,000.00
	- Pembangunan Gedung Gereja Gerakan Pantekosta (GGP) Jemaat Benteng Batu,	Rp10,000,000.00
	- Kegiatan Pembangunan Gereja Segala Bangsa (GESBA) Jemaat Palimbangan	Rp10,000,000.00
	- Pengadaan Alat Musik Gereja Pantekosta Kharismatik di Indonesia Tikala	Rp10,000,000.00
	- Pembangunan Gedung Gereja Kerapatan Pantekosta (GKP) Jemaat Kampung Baru	Rp20,000,000.00
	- Kegiatan Pengadaan Speaker dan Kursi Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Lempo,	Rp10,000,000.00
	- Pembangunan Gereja Pantekosta Tabernakel Jemaat Alfa Omega Ponding Baruppu'	Rp10,000,000.00
	Pembayaran LS Belanja Hibah Pengadaan Kursi Gereja Kerapatan Pantekosta Jemaat Imanuel Sarambu	Rp10,000,000.00
	- Kegiatan Pembangunan Gedung Pastori Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Perjanjian Baru Lo'ko'uru	Rp10,000,000.00
	- Kerapatan Pantekosta Jemaat Buntuminanga	Rp10,000,000.00
	- Pengadaan Kursi dan Mimbar Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Tonga Riu,	Rp10,000,000.00
	- Gereja Kerapatan Pantekosta Jemaat Solo Pangala'	Rp10,000,000.00
	- Pembangunan Gedung Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia Jemaat To'saruran Lempo Sangbua	Rp10,000,000.00
	- Pengadaan Kursi Gereja Kerapatan Pantekosta Jemaat To'angka'	Rp10,000,000.00



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

	- Gereja Kerapatan Pantekosta Jemaat Rante Sulu'	Rp10,000,000.00
	- Kegiatan Pembangunan Gereja Kerapatan Pantekosta (GKP) Jemaat Lempo Poton	Rp10,000,000.00
	- Pembangunan Gedung Gereja Segala Bangsa (GESBA) Jemaat Pewaian Sangkaropi'	Rp10,000,000.00
	- Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Moria Kambisa	Rp10,000,000.00
	Hibah Kegiatan Pembangunan Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI) Jemaat Bakan	Rp10,000,000.00
	- Pembangunan Gedung Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia Jemaat Buntu Kesan	Rp10,000,000.00
	- Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Kasih Karunia Pangden	Rp10,000,000.00
	- Gedung Gereja Segala Bangsa Jemaat Kanan	Rp10,000,000.00
	- Operasional Baznas Kabupaten Toraja Utara	Rp50,000,000.00
	- Gereja Kerapatan Pantekosta Jemaat Ne'bako	Rp10,000,000.00
	- Pengadaan Alat Musik Gereja Kerapatan Pantekosta Jemaat Patua	Rp10,000,000.00
	- Pembangunan Gereja Sidang Jemaat Allah Eklesia Barana'	Rp10,000,000.00
	- Pembangunan Gereja Pantekosta Serikat Di Indonesia Jemaat Kanaan Pemanukan	Rp10,000,000.00
	- Gedung Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia Jemaat Efata Awan Rantekarua,	Rp10,000,000.00
	- Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia Jemaat Imanuel Dumbia	Rp10,000,000.00
	Rp	2,142,200,000

B. Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029

Dalam rangka penyusunan laporan kinerja dilakukan pengumpulan data kinerja dari satuan-satuan kerja. Berdasarkan data tersebut pengukuran keberhasilan setiap indikator dengan membandingkan antara target dan realisasi. Keberhasilan pencapaian sasaran digolongkan sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	$\geq 91\%$	Sangat Tinggi
II	76% s.d 90%	Tinggi
III	66% s.d 75%	Sedang
IV	51% s.d 65%	Rendah
V	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber Data : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Untuk perhitungan pencapaian kinerja sasaran mencapai lebih dari 100% penghitungan kinerjanya disesuaikan dengan capaian rill.

(1) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}^{**})}{\text{Rencana}^{**})} \times 100\%$$

(2) semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{(\text{Rencana}^{**}) - (\text{Realisasi}^{**}) - \text{Rencana}^{**})}{\text{Rencana}^{**})} \times 100\%$$

3.1 Capaian IKU Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029

Pencapaian indikator kinerja utama pembangunan Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2025 Setelah Perubahan

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
2.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	72,73	73,24	100,70	Sangat Tinggi
2	Rata-rata Lama Sekolah	Angka	8,66	8,72	100,69	Sangat tinggi
3	Harapan Lama Sekolah	Angka	13,44	13,53	100,66	Sangat tinggi
4	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,14	75,24	100,13	Sangat tinggi
5	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,67	5,36	114,77	Sangat tinggi
6	Pendapatan Perkapita	Rp.Juta	49,96	50,63	101,34	Sangat tinggi
7	Tingkat Kemiskinan	%	10,32 -9,73	10,05	102,61	Sangat tinggi
8	Rasio Gini	Angka	0,310	0,285	108,06	Sangat tinggi
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,35	2,01	114,46	Sangat tinggi
10	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	%	7,36	7,35	99,86	Sangat tinggi
11	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	16,92	17,06	100,82	Sangat tinggi
12	Kontribusi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	%	3,31	3,21	96,97	Sangat tinggi
13	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	%	4,74	3,8	80,17	tinggi



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

14	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	81,09	75	92,48	Sangat tinggi
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	73,44	67,65	92,11	Sangat tinggi
16	Rasio Pajak dan Retribusi Terhadap APBD	%	4,95	5,09	102,83	Sangat Tinggi
17	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	%	-	0,49(2024)	-	-
18	Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	3,15	2,60	82,54	Tinggi
19	Rasio Kemantapan Jalan	%	58,96	34,08	57,80	Rendah
20	Rasio Elektrifikasi Kabupaten	%	99,48	99,99	100,51	Sangat Tinggi
21	Rasio Jaringan Irigasi	%	46,04	35,54	77,19	tinggi
22	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	26	60,77	233	Sangat tinggi
23	RT dengan Akses Sanitasi Layak	%	94,05	95,19	101,21	Sangat tinggi
24	Indeks Desa	Angka	0,6141	0,6101	99,34	Sangat tinggi
25	Bumdes dengan Kategori Berkembang	%	4,50	NA	NA	-
26	Lembang/Kelurahan yang Memiliki Akses Jaringan Internet	%	80,93	103	127,27	Sangat tinggi
27	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	62,32	64,88	104,10	Sangat tinggi
28	Nilai SAKIP	Angka	62,36	61,95	99,34	Sangat tinggi
29	Indeks SPBE	Angka	2,42	2,31	95,45	Sangat tinggi
30	Indeks Inovasi Daerah	Skor	27,73	44	158,67	Sangat tinggi
31	Indeks Pelayanan Publik	Angka	2,61	2.30 (C-)	88,12	tinggi
32	Persentase Lembang/Kelurahan yang Memiliki Lembaga Adat yang Aktif	%	65,03	100	153,77	Sangat tinggi
33	Kelembagaan kebudayaan yang berperan dalam pemajuan kebudayaan daerah	%	100	70	70	Rendah
34	Kelembagaan Keagamaan yang efektif berfungsi	%	100	100	100	Sangat tinggi
35	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,185	Belum Rilis	-	-
36	Persentase Wirausaha Muda	%	0,28	6,01	2.146	Sangat Tinggi
37	Persentase atlet kabupaten yang	%	13,86	3,07	22,15	Sangat Rendah



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

	memperoleh peringkat dalam kejuaraan regional dan nasional					
38	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	77,38	81,45	105,25	Sangat Tinggi
39	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	29,72	0	0	0
40	Indeks Kualitas Air	Angka	76,98	77,22	100,31	Sangat tinggi
41	Indeks Kualitas Udara	Angka	79,98	89,89	112,39	Sangat tinggi
42	Indeks Tutupan Lahan	Angka	73,24	73,45	100,28	Sangat tinggi
43	Indeks Risiko Bencana	Angka	139,93	144,97	99,33	Sangat tinggi
44	Konsumsi Listrik Perkapita	Kwh/Jjiwa	209,63	296,55	141,41	Sangat tinggi

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Toraja Utara setelah perubahan sebanyak 44 (empat puluh empat) indikator.

Pada indikator Bumdes dengan Kategori Berkembang, realisasi tahun 2025 tidak memiliki data karena pada tahun tersebut tidak dilakukan pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Oleh karena itu, capaian indikator tidak dapat dihitung atau ditampilkan pada tahun pelaporan. Pemeringkatan BUMDes direncanakan akan kembali dilaksanakan pada tahun 2026, setelah adanya surat pemberitahuan dari Direktorat Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal yang menyampaikan pelaksanaan kembali kegiatan penilaian atau pemeringkatan BUMDes tersebut. Dengan demikian, data capaian indikator ini diharapkan dapat tersedia kembali pada periode pelaporan berikutnya.

Pada indikator Tingkat Kemiskinan Ekstrem, nilai realisasi tahun 2025 tidak lagi dirilis secara resmi, sehingga dalam penyajian data digunakan nilai terakhir yang tersedia yaitu tahun 2024 sebesar 0,49 persen. Namun demikian, karena dokumen RPJMD Tahun 2025–2029 tidak mencantumkan target untuk tahun 2024, maka pada tabel kinerja kolom target dan capaian tidak dapat dihitung. Oleh karena itu, indikator ini disajikan hanya sebagai informasi nilai terakhir yang tersedia, sementara capaian kinerjanya tidak ditampilkan pada tahun pelaporan.

3.2 Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja tahun 2025 Setelah Perubahan

Tujuan 1 Meningkatkan Kualitas Dan daya Saing sumberdaya Manusia

Keberhasilan sasaran Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Capaian atas masing-masing indikator tersebut dapat terlihat dalam tabel berikut ini:

a. Analisis Pencapaian Tujuan 1



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi	
Indeks Pembangunan Manusia	Angka	72,73	73,24	100,70
Rata-rata capaian Kinerja				

Sumber Data : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Dari tabel diatas pencapaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan.

IPM Toraja Utara pada tahun 2025 adalah 73,24% dan dibandingkan dengan target sebesar 72,73 maka capaian indikator ini adalah sebesar 100,70%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir RPJMD dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPJMD			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
Indeks Pembangunan Manusia	73,24	75,27	

Sasaran 1.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif

Keberhasilan sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu Rata-rata lama sekolah dan Harapan lama sekolah. Capaian atas masing-masing indikator tersebut dapat terlihat dalam tabel berikut ini:

a. Analisis Pencapaian Sasaran 1 (Meningkatnya Kulaitas Pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif)

Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi	
Rata-rata Lama Sekolah	Angka	8,66	8,72	100,69
Harapan Lama Sekolah		13,44	13,53	100,67
Rata-rata capaian Kinerja				100,68

Sumber Data : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Berdasarkan data capaian Indikator Tujuan Tahun 2025, Rata-rata Lama Sekolah ditetapkan dengan target 8,66 dan terealisasi sebesar 8,72, dengan capaian kinerja 100,69 persen. Sementara itu, Harapan Lama Sekolah memiliki target 13,44 dan terealisasi sebesar 13,53, dengan capaian kinerja 100,67 persen. Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja kedua indikator



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

tersebut mencapai 100,68 persen, yang menunjukkan bahwa target yang ditetapkan telah tercapai dan melampaui perencanaan. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir Rpjmd dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPJMD			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Target Nasional
Rata-rata Lama Sekolah	8,72	9,21	
Harapan Lama Sekolah	13,53	13,49	

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pendidikan Daerah Kab/Kota	214.283.986.510	212.298.213.532	99,07%
2	Program Pengelolaan Pendidikan	162.176.703.327	55.323.274.146	34,11%
3	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	142.990.400	139.222.858	97,37%
4	Program Penunjang Urusan Pendidikan Daerah Kab/Kota	214.283.986.510	212.298.213.532	99,07%
TOTAL				

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Berdasarkan Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TA 2025, Program Penunjang Urusan Pendidikan dan Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan menunjukkan realisasi anggaran tinggi (99,07% dan 97,37%), mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang efektif. Meskipun Program Pengelolaan Pendidikan memiliki realisasi rendah (34,11%), capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tetap melampaui target, menunjukkan bahwa peningkatan indikator tersebut lebih dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan program dan dukungan tenaga kependidikan daripada besaran anggaran semata.

c. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Tabel Program dan Kegiatan (2025)		
No	PROGRAM	KEGIATAN
1	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Dasar
		Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2	Pengelolaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

	Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
--	---

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Berdasarkan Tabel Program dan Kegiatan Tahun 2025, pelaksanaan urusan pendidikan didukung oleh dua program utama, yaitu Pengelolaan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Program Pengelolaan Pendidikan mencakup layanan pendidikan pada jenjang dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan anak usia dini (PAUD), serta pendidikan nonformal/kesetaraan, yang berperan langsung dalam peningkatan akses dan mutu pendidikan. Sementara itu, Program Pengelolaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan difokuskan pada pemerataan kuantitas dan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, yang menjadi faktor penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja pendidikan seperti Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Secara keseluruhan, kedua program tersebut menjadi pilar utama dalam mendukung pencapaian target kinerja pendidikan, sekaligus menjadi acuan evaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan.

Sasaran 1.2 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Secara Merata

Keberhasilan sasaran 2 Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan dengan indikator yaitu persentase Angka Harapan Hidup tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

a. Analisis Pencapaian Sasaran Strategi 2 (Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan)

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi	
Usia Harapan Hidup	Tahun	75,14	75,24	99,84%
Rata-rata capaian Kinerja				

Sumber Data : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Indikator Usia Harapan Hidup adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan yang telah dicapai dalam suatu masyarakat dan digunakan untuk mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat.

Realisasi Indikator Angka Harapan Hidup Kabupaten Toraja Utara tahun 2025 sebesar 75,25 yang menunjukkan bahwa angka harapan hidup penduduk Kabupaten Toraja Utara tercatat mencapai 100 sehingga dapat dikatakan bahwa setiap bayi yang lahir tahun 2025 di Kabupaten Toraja Utara diperkirakan dapat hidup hingga usia 73 – 74 tahun. Dibandingkan dengan target sebesar 75,37 maka capaian indikator ini adalah mencapai sebesar 99,84%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir Renstra dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Target Nasional
Usia Harapan Hidup	75,24	75,7	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

c. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	89.108.193.422	88.720.609.117	
2	Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	107.018.072.531,40	95.474.213.483,25	
3	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan	1.198.446.000	521.730.350	
4	Program sediaan Farmasi, alat Kesehatan makanan minuman	640.257.000	233.605.400	
TOTAL				

d. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Tabel Program dan Kegiatan (2025)		
No	PROGRAM	KEGIATAN
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Pencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
		Administrasi keuangan perangkat daerah
		Administrasi Kepegawaian perangkat daerah
		Administrasi umum perangkat daerah
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Penyediaan Fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah kabupaten
		Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah kabupaten
		Penyelenggaraan system informasi Kesehatan secara terintegrasi
		Penerbitan izin rumah sakit kelas C,D dan Fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat daerah kabupaten
	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan	Perencanaan kebutuhan dan pendayaan sumber daya manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilaya kabupaten kota
		Pengembangan Mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumberdaya Kesehatan Tingkat kabupaten kota



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

	Program sediaan Farmasi, alat Kesehatan makanan minuman	Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat Kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional(UMOT)
		Penerbitan sertifikat produksi pangan industry rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industry rumah tangga

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Tujuan 2 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berdaya saing dan inklusif

Keberhasilan tujuan 2 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berdaya saing dan inklusif dengan indikator yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Tingkat Kemiskinan, Rasio Gin, Tingkat Pengangguran Terbuka tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

a. Analisis Pencapaian Tujuan 2 (Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berdaya saing dan inklusif)

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi	
Pertumbuhan Ekonomi	%	4,67	5,36	114,77
Pendapatan Perkapita	Rp.Juta	49,96	50,63	101,34
Tingkat Kemiskinan	%	10,32-9,73	10,05	102,61
Rasio Gini	Angka	0,310	0,285	108,06
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,35	2,01	114,46
Rata-rata capaian Kinerja				108,248

Sumber Data : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

capaian Tujuan 2: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing dan Inklusif Tahun 2025 berdasarkan lima indikator utama. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 4,67% dan terealisasi 5,36% dengan capaian 114,77%, menunjukkan kinerja yang melampaui target. Pendapatan per kapita juga melebihi target, dari Rp49,96 juta menjadi Rp50,63 juta atau tercapai 101,34%, yang mengindikasikan adanya peningkatan rata-rata kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan terealisasi sebesar 10,05%, berada dalam rentang target yang ditetapkan, dengan capaian 102,61%, menandakan upaya pengentasan kemiskinan berjalan sesuai harapan. Rasio Gini sebesar 0,285 lebih rendah dari target 0,310 dengan capaian 108,06%, yang berarti ketimpangan pendapatan semakin menurun. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka terealisasi 2,01% dari target 2,35% dengan capaian 114,46%, menunjukkan kondisi ketenagakerjaan yang membaik. Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja mencapai 108,248%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Tujuan 2 pada tahun 2025 berjalan sangat baik dan seluruh indikator berhasil melampaui target yang ditetapkan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir RPJMD dan Nasional



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPJMD			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
Pertumbuhan Ekonomi	5,36	7,37	
Pendapatan Perkapita	50,63	68,66	
Tingkat Kemiskinan	10,05	6,66-6,05	
Rasio Gini	0,285	0,278	
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,01	1,89	

Sasaran 2.1 Meningkatnya Produktivitas Ekonomi dan Ketahanan Pangan Daerah

Sasaran 2.1 “Meningkatnya Produktivitas Ekonomi dan Ketahanan Pangan Daerah” diukur melalui beberapa indikator yang mencerminkan kinerja sektor-sektor utama perekonomian daerah. Indikator tersebut meliputi kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, kontribusi penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB, persentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil, serta indeks ketahanan pangan. Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai pada masing-masing indikator.

a. Analisis Pencapaian Tujuan 2 (Meningkatnya Produktivitas Ekonomi dan Ketahanan Pangan Daerah)

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi	
Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	%	7,36	7,35	99,86
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	16,92	17,06	100,82
Kontribusi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	%	3,31	3,21	96,97
Presentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	%	4,74	3,8	80,16
Indeks Ketahanan Pangan	%	81,09	75	92,4
Rata-rata capaian Kinerja				94,042

Sumber Data : BPS, DISPERINDAGKOP, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

a. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir RPJMD dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja dan Target akhir RPJMD			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Target Nasional



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	7,35	7,79	
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	17,06	18,63	
Kontribusi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	3,21	3,72	
Presentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	3,8	5,24	
Indeks Ketahanan Pangan	75	85,3	

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Pemberdayaan usaha menengah, kecil dan usaha mikro	132.566.160	116.878.128	88%
2	Perencanaan dan Pembangunan Industri	499.885.400	476.626.519	95,34
3	Pengendalian izin usaha Industri	7.253.000	7.232.850	99,72
4	Pengelolaan system informasi Industri	11.675.000	11.652.500	99,8
5				
TOTAL				

c. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Tabel Program dan Kegiatan (2025)		
No	PROGRAM	KEGIATAN
1	Pemberdayaan usaha menengah, kecil dan usaha mikro	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
2		Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro
		Penyusunan Basis data usaha mikro
		- Penyusunan dan evaluasi rencana Pembangunan industry kabupaten/kota
		- Penyusunan rencana Pembangunan industry kabupaten kota
		- Koordinasi sinkronasi dan pelaksanaan sumberdaya industri
		- Penertiban izin usaha industry (IUI), izin perluasan usaha industry(IPUI), izin usaha kawasan industry (IUKI) dan izin perluasan Kawasan industry (IPKI) kewenangan Kabupaten



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

		- Penyediaan informasi industri untuk informasi industri IUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten
--	--	--

Dalam upaya meningkatkan kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB sebagaimana tertuang pada Sasaran 2.1, terdapat beberapa kendala yang dihadapi di lapangan. Subsektor industri pengolahan yang berkembang di daerah meliputi kopi, olahan lombok/cabai, anyaman bambu, tenun, serta berbagai produk kerajinan dan ukiran. Namun demikian, pengembangannya belum optimal.

Pada industri tenun, kendala utama terletak pada keterbatasan bahan baku berupa benang yang sulit diperoleh, serta belum tersedianya dukungan anggaran yang memadai untuk penyediaan sarana produksi. Saat ini dukungan yang tersedia masih sebatas penyediaan gedung, sementara aspek produksi belum sepenuhnya difasilitasi. Adapun solusi yang ditempuh adalah melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan para pengrajin guna mengidentifikasi kebutuhan prioritas.

Untuk komoditas kopi, tantangan yang dihadapi lebih pada aspek pasar. Produk tenun memiliki segmen pasar tertentu, sedangkan kopi cenderung memiliki peluang pasar yang lebih luas, namun tetap sangat bergantung pada permintaan. Selain itu, kendala pemasaran masih terbatas pada pasar lokal dan belum menjangkau pasar yang lebih luas. Sebagai langkah perbaikan, dilakukan pelatihan teknis yang berhubungan dengan peningkatan kualitas produksi serta pelatihan pengawetan produk. Dari sisi pemasaran, strategi yang dilakukan adalah mendorong promosi berbasis digital serta keikutsertaan dalam pameran guna memperluas akses pasar.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk industri pengolahan sehingga berkontribusi lebih besar terhadap PDRB daerah.

Sasaran 2.2 Berkembangnya Lapangan Kerja dan Peluang Usaha

Keberhasilan sasaran 1.2 Berkembangnya Lapangan Kerja dan Peluang Usaha dengan indikator yaitu persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

a. Analisis Pencapaian Sasaran Strategi 2 (Berkembangnya Lapangan Kerja dan Peluang Usaha)

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	73,44	67,65	92,11
Rata-rata capaian Kinerja				92,11

Sumber Data : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Indikator ini menggambarkan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Pada Tahun 2025, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Toraja Utara ditargetkan sebesar 74,35 persen, yang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mendorong keterlibatan penduduk usia produktif dalam kegiatan ekonomi. Pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan berbagai program peningkatan kualitas tenaga kerja, pengembangan kewirausahaan, serta perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha. Tingkat Partisipasi



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Angkatan Kerja menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan dan efektivitas kebijakan ekonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Realisasi Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir RPJMD dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPJMD			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,65	78	

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Program Penempatan Tenaga Kerja	523.644.000-	516.636.000	93
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	51.964.000	48.205.042	98
TOTAL				

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Tabel Program dan Kegiatan (2025)		
No	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi

Sumber Data : Disnakertrans Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Tingkat Pengangguran terbuka menurun karena adanya perluasan kesempatan kerja seperti UMKM yang semakin berkembang dan sektor industri dan jasa yang bertumbuh ,serta peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja dan penempatan tenaga kerja yang efektif melalui bursa kerja yang diselenggarakan SMK kerjasama dengan Dina Tenaga Kerja,system informasi pasar kerja dan kerjasama dengan dunia usaha/industri

Sasaran 2.3 Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Keberhasilan sasaran 1.2 Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah dengan indikator yaitu persentase Rasio Pajak dan Retribusi Terhadap APBD tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

a. Analisis Pencapaian Sasaran Strategi 2.2 (Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah)

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi	
Rasio Pajak dan Retribusi Terhadap APBD	%	4,95	5,09	102,83
Rata-rata capaian Kinerja				102,83

Sumber Data : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Keberhasilan Sasaran 2.2 *Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah* diukur melalui indikator Rasio Pajak dan Retribusi terhadap APBD yang menggambarkan kontribusi pendapatan daerah dari pajak dan retribusi terhadap total APBD. Pada Tahun 2025, rasio ini ditargetkan sebesar 5,21 persen, sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah. Pencapaian indikator tersebut didukung oleh upaya peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, perbaikan kualitas pelayanan pendapatan daerah, serta penguatan pengelolaan dan pengawasan penerimaan. Indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai kemampuan fiskal daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Adapun untuk menghitung indikator tersebut digunakan Rumus sebagai berikut

$$\text{Rasio Pajak dan Retribusi Terhadap APBD} = \frac{\text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah}}{\text{Total APBD}} \times 100$$

$$\text{Rasio Pajak dan Retribusi APBD} = \frac{26.773.222.640,73 + 10.885.539.609}{739.683.447.278,50} \times 100$$

$$= 5,09$$

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir Renstra dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
Rasio Pajak dan Retribusi Terhadap APBD	100,55 %	100%	

Tabel perbandingan realisasi kinerja menunjukkan bahwa indikator % Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan pada tahun 2025 mencapai angka 101,55. Capaian ini telah berhasil melampaui Target Akhir Renstra dan Target Nasional yang keduanya ditetapkan sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja kemandirian pendapatan daerah pada tahun 2025 telah melampaui standar yang ditetapkan baik di tingkat rencana strategis maupun nasional.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	4.849.692.392	4.677.061.820	96,44
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	873.818.660	867.538.360	99,28
TOTAL		5.723.511.052	5.544.600.180	96,87

Berdasarkan Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada Tahun Anggaran 2025 bersifat Efisien. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 96,87% dari total pagu. Adanya selisih anggaran (efisiensi) sebesar 3,13% atau senilai Rp178.910.872 merupakan hasil dari optimalisasi belanja operasional dan penghematan tanpa mengurangi kualitas maupun kuantitas capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

c. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Tabel Program dan Kegiatan (2025)		
No	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat daerah
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah
		Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sumber Data : BAPENDA kabupaten Toraja Utara 2025

Secara keseluruhan, tabel tersebut menunjukkan bahwa strategi Bapenda dalam mencapai target kinerjanya dilakukan melalui penguatan tata kelola internal yang



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

mendukung pelaksanaan fungsi teknis di lapangan. Seluruh kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (seperti perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian, hingga pemeliharaan sarana) berfungsi sebagai pondasi operasional agar Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat berjalan optimal tanpa hambatan logistik maupun administratif. Dengan kata lain, keberhasilan pencapaian target pendapatan sangat bergantung pada kesiapan dukungan administrasi dan sarana prasarana yang dikelola secara terintegrasi, di mana kegagalan pada salah satu aspek penunjang akan berdampak langsung pada efektivitas pemungutan pendapatan daerah.

Indikator Persentase Kenaikan Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kemandirian fiskal daerah melalui penguatan pemungutan pajak dan retribusi secara efektif, transparan, dan akuntabel. Indikator ini menjadi dasar evaluasi efektivitas kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, ketepatan strategi penggalan potensi pajak, serta kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan sumber pendanaan pembangunan daerah yang mandiri dan berkelanjutan.

Sasaran 2.4 Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif

Keberhasilan sasaran 1.2 Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dengan indikator yaitu Tingkat Kemiskinan Ekstrem tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

a. Analisis Pencapaian Sasaran Strategi 2.2 (Perlindungan Sosial yang Adaptif)

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi	
Tingkat Kemiskinan Ekstrem	%	-	0,49	-
Rata-rata capaian Kinerja				

Sumber Data : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Sasaran 2.4: Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif diukur melalui indikator Tingkat Kemiskinan Ekstrem. Pada indikator Tingkat Kemiskinan Ekstrem, nilai realisasi tahun 2025 tidak lagi dirilis secara resmi, sehingga dalam penyajian data digunakan nilai terakhir yang tersedia yaitu tahun 2024 sebesar 0,49 persen. Namun demikian, karena dokumen RPJMD Tahun 2025–2029 tidak mencantumkan target untuk tahun 2024, maka pada tabel kinerja kolom target dan capaian tidak dapat dihitung. Oleh karena itu, indikator ini disajikan hanya sebagai informasi nilai terakhir yang tersedia, sementara capaian kinerjanya tidak ditampilkan pada tahun pelaporan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir RPJMD dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja Dan Target Akhir RPJMD			
Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
Tingkat Kemiskinan Ekstrem	0,49	0	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Tujuan 3 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang merata

Keberhasilan Tujuan 3 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Merata dengan indikator yaitu Indeks Layanan Infrastruktur tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

a. Analisis Pencapaian Tujuan 3 (Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Merata)

Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi	
Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	3,15	2,60	82,54
Rata-rata capaian Kinerja				82,54

Sumber Data : Dinas PUTR Kabupaten Toraja Utara 2025

Tujuan 3 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Merata diukur melalui indikator Indeks Layanan Infrastruktur yang menggambarkan tingkat ketersediaan, kualitas, dan pemerataan layanan infrastruktur di wilayah Kabupaten Toraja Utara. Pada Tahun 2025, Indeks Layanan Infrastruktur ditetapkan dengan target sebesar 3,87, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dalam meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur dasar secara merata antarwilayah..

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir RPJMD dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja Dan Target Akhir RPJMD			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
Indeks Layanan Infrastruktur	2,60	7,75	

Sasaran 3.1 Meningkatnya Kualitas Jalan

Keberhasilan Sasaran 3.1 Meningkatnya Kualitas Jalan dengan indikator yaitu Rasio Kemantapan Jalan tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

a. Analisis Pencapaian Tujuan 3 (Meningkatnya Kualitas Jalan)

Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi	
Rasio Kemantapan Jalan	%	42,73	34,08	79,76
Rata-rata capaian Kinerja				79,76

Sumber Data : Dinas PUTR

Sasaran 3.1: Meningkatnya Kualitas Jalan diukur melalui indikator Rasio Kemantapan Jalan, yaitu persentase panjang jalan kabupaten yang berada dalam kondisi mantap (baik dan sedang) dibandingkan dengan total panjang jalan kabupaten.

Pada tahun 2025, target Rasio Kemantapan Jalan ditetapkan sebesar 42,73%, sedangkan realisasinya hanya mencapai 34,08%. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 79,76%, yang berarti belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

menunjukkan bahwa masih terdapat ruas jalan yang belum dalam kondisi mantap sehingga perlu peningkatan penanganan dan pemeliharaan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir RPJMD dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPJMD			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
Rasio Kemantapan Jalan	34,08	72,92	

c. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Program Penyelenggaraan Jalan	77.129.658.367,00	69.560.597.298,00	
TOTAL				

d. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Tabel Program dan Kegiatan (2025)		
No	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Sumber Data : Dinas PUTR Kabupaten Toraja Utara 2025

Sasaran 3.2 Meningkatnya Jangkauan Layanan Listrik di Seluruh Wilayah

Keberhasilan Sasaran 3.2 Meningkatnya Jangkauan Layanan Listrik di Seluruh Wilayah dengan indikator yaitu Rasio Elektrifikasi Kabupaten tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

a. Analisis Pencapaian Sasaran 3.2 (Meningkatnya Jangkauan Layanan Listrik di Seluruh Wilayah)

Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi	
Rasio Elektrifikasi Kabupaten	%	99,48	99,99	100,51
Rata-rata capaian Kinerja				100,51

Sumber Data : PLN Toraja Utara 2025

Sasaran 3.3 Meningkatnya Jangkauan Layanan Listrik di Seluruh Wilayah diukur melalui indikator Rasio Elektrifikasi Kabupaten yang menunjukkan persentase rumah tangga yang telah terlayani akses listrik. Rasio Elektrifikasi Kabupaten Toraja Utara telah mencapai 99,99%, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga telah menikmati akses listrik. Capaian ini mencerminkan keberhasilan program pemerataan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

akses energi dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan daerah.

Dari total capaian tersebut, RE PLN sebesar 94,70% merupakan persentase rumah tangga yang telah memperoleh akses listrik yang bersumber dan dilayani langsung melalui jaringan PT PLN (Persero). Angka ini menunjukkan dominasi peran PLN dalam menyediakan pasokan listrik yang andal, berkelanjutan, serta terstandar, melalui pembangunan jaringan distribusi, gardu, dan penyambungan pelanggan baru hingga ke wilayah pelosok.

Sementara itu, RE Non-PLN sebesar 5,29% merupakan kontribusi elektrifikasi yang dipenuhi melalui sumber listrik di luar jaringan PLN. Akses ini berasal dari pembangkit seperti PLTMH (mikrohidro), PLTS (tenaga surya), genset komunal, maupun sistem energi mandiri lainnya yang dikelola oleh masyarakat, swasta, atau pemerintah daerah. Peran ini umumnya menjangkau wilayah terpencil atau kondisi geografis yang belum memungkinkan pembangunan jaringan PLN secara optimal.

Secara keseluruhan, kombinasi antara layanan PLN dan sumber listrik non-PLN menghasilkan cakupan elektrifikasi hampir 100%, yang menunjukkan kolaborasi dan sinergi berbagai pihak dalam memastikan seluruh masyarakat Toraja Utara mendapatkan akses energi listrik sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir RPJMD dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja Dan Target Akhir RPJMD			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
Rasio Elektrifikasi Kabupaten	99,99	100	

Kekurangan-Kekurangan Yang Harus Diperbaiki Serta Solusi Yang Telah Dilakukan:

a) Faktor Keberhasilan

1. Perluasan Jaringan dan Penyambungan Pelanggan Baru
Ekspansi jaringan distribusi oleh PT PLN (Persero) hingga ke wilayah pelosok menjadi faktor utama meningkatnya RE PLN (94,70%). Pembangunan gardu distribusi, JTM, dan JTR mempercepat akses listrik rumah tangga.
2. Program Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL)
Program penyambungan listrik bagi masyarakat kurang mampu serta dukungan pemerintah daerah mendorong peningkatan jumlah rumah tangga berlistrik.
3. Sinergi dengan Sumber Non-PLN
Kontribusi RE Non-PLN (5,29%) dari PLTMH, PLTS, dan energi mandiri membantu menjangkau daerah dengan kondisi geografis sulit (perbukitan, wilayah terpencil).
4. Dukungan Kebijakan Nasional Elektrifikasi 100%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Target nasional pemerataan akses listrik memperkuat komitmen investasi infrastruktur kelistrikan di daerah.

5. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Meningkatnya kebutuhan listrik untuk rumah tangga, UMKM, pendidikan, dan layanan kesehatan mendorong permintaan sambungan listrik baru.

b) Potensi Kendala / Faktor yang Menghambat

Walaupun capaian sangat tinggi, masih terdapat selisih kecil 0,01% yang menunjukkan tantangan seperti:

1. Lokasi rumah sangat terpencil dan sulit dijangkau jaringan.
2. Kondisi geografis ekstrem (pegunungan, akses jalan terbatas).
3. Keterbatasan kemampuan ekonomi sebagian masyarakat.
4. Status lahan atau administrasi kependudukan yang belum lengkap.
5. Keterbatasan Anggaran untuk pembangunan jaringan listrik.

c) Solusi yang Telah dan Dapat Dilakukan

1. Percepatan pembangunan jaringan Listrik
2. Optimalisasi pemanfaatan pembangkit EBT skala kecil (PLTS/PLTMH)
3. Program bantuan pasang baru/listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera

d) Kesimpulan:

Capaian RE 99,99% menunjukkan kinerja sangat baik dan hampir mencapai elektrifikasi penuh. Keberhasilan ini merupakan hasil kombinasi ekspansi jaringan PLN, kontribusi energi non-PLN, serta dukungan kebijakan dan kolaborasi multipihak. Tantangan yang tersisa bersifat teknis dan geografis, sehingga memerlukan pendekatan inovatif dan fleksibel untuk mencapai elektrifikasi 100% secara berkelanjutan.

Sasaran 3.3 Meningkatnya Luasan Area yang Terlayani Jaringan Irigasi

Keberhasilan Sasaran Strategi 3.3 Meningkatnya Luasan Area yang Terlayani Jaringan Irigasi dengan indikator yaitu Rasio Jaringan Irigasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

a. Analisis Pencapaian Sasaran 3.3 (Meningkatnya Luasan Area yang Terlayani Jaringan Irigasi)

Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi	
Rasio Jaringan Irigasi	%	35,305	35,54	100,67
Rata-rata capaian Kinerja				100,67

Sumber Data : Dinas PUTR Kabupaten Toraja Utara 2025

Sasaran 3.4 Meningkatnya Luasan Area yang Terlayani Jaringan Irigasi diukur melalui indikator Rasio Jaringan Irigasi yang menunjukkan persentase luas area pertanian yang telah terlayani jaringan irigasi terhadap total potensi layanan. Pada Tahun 2025, rasio jaringan irigasi Kabupaten Toraja Utara ditetapkan dengan target sebesar 48,39 persen sebagai bagian dari upaya peningkatan dukungan infrastruktur irigasi terhadap produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir RPJMD dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja dan target akhir RPJMD			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
Rasio Jaringan Irigasi	35,54	46.04	

c. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	381.016.500,00	371.124.500,00	
TOTAL				

d. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Tabel Program dan Kegiatan (2025)		
No	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

Sasaran 3.4 Meningkatnya Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman

Keberhasilan Tujuan 3 Meningkatnya Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman dengan indikator yaitu Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan dan Persentase RT dengan Akses Sanitasi Layak tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

a. Analisis Pencapaian Sasaran 3.4 (Meningkatnya Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman)

Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi	
Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	26	60,77	233
RT dengan Akses Sanitasi Layak	%	94,05	95,19	101,21
Rata-rata capaian Kinerja				167,16

Sumber Data : Dinas PUTR Kabupaten Toraja Utara

Sasaran 3.4 Meningkatnya Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman diukur melalui indikator Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan dan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak. Pada Tahun 2025,



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

masing-masing indikator ditetapkan dengan target sebesar 30 persen untuk akses air siap minum perpipaan dan 95,24 persen untuk akses sanitasi layak, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir RPJMD dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja dan target akhir RPJMD			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	60,77	62,54	
RT dengan Akses Sanitasi Layak	41,81	100	

c. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.330.700.000,00	1.330.578.700,00	
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	466.213.584,00	466.121.960,00	
TOTAL				

d. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Tabel Program dan Kegiatan (2025)		
No	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Data : Dinas PUTR Kabupaten Toraja Utara 2025

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum memiliki anggaran sebesar Rp1.330.700.000,00 dengan realisasi Rp1.330.578.700,00, yang berarti hampir seluruh anggaran dapat direalisasikan. Sementara itu, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah memiliki anggaran Rp466.213.584,00 dengan realisasi Rp466.121.960,00, yang juga menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang sangat tinggi. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta pengelolaan dan pengembangan sistem air



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

limbah domestik di daerah kabupaten/kota guna meningkatkan layanan dasar kepada masyarakat.

Tujuan 4 Meningkatnya Pembangunan Desa

Keberhasilan Tujuan 4 Meningkatnya Pembangunan Desa dengan indikator yaitu Indeks Desa Membangun tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

a. Analisis Pencapaian Tujuan 4 (Meningkatnya Pembangunan Desa)

Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi	
Indeks Desa	Angka	0.6141	0.6101	99%
Rata-rata capaian Kinerja				

Sumber Data : DPML Kabupaten Toraja Utara 2025

Tujuan 4 Meningkatnya Pembangunan Desa diukur melalui indikator Indeks Desa Membangun (IDM) yang mencerminkan tingkat kemandirian dan kemajuan desa berdasarkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pada Tahun 2025, nilai IDM Kabupaten Toraja Utara ditetapkan dengan target sebesar 0.6141 persen, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan desa dalam rangka memperkuat kapasitas desa dan pemerataan pembangunan wilayah.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir RPJMD dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja Dan Akhir RPJMD			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
Indeks Desa Membangun	0.6101	0.6222	

c. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	76.035.000	63.937.600	84,09
TOTAL				

d. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Tabel Program dan Kegiatan (2025)		
No	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Sumber Data : DPML Kabupaten Toraja Utara 2025

Sasaran 4.1 Meningkatnya Ekonomi Desa



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Keberhasilan Sasaran 4.1 Meningkatnya Ekonomi Desa dengan indikator yaitu Persentase Bumdes dengan Kategori Berkembang tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

a. Analisis Pencapaian Sasaran 4.1 (Meningkatnya Ekonomi Desa)

Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi	
Bumdes dengan Kategori Berkembang	%	3%	NA	NA
Rata-rata capaian Kinerja				

Sumber Data :

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran 4.1 Meningkatnya Ekonomi Desa, Pemerintah Kabupaten menetapkan indikator kinerja Persentase BUMDes dengan Kategori Berkembang. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu pilar penguatan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada Tahun 2025, target persentase BUMDes dengan kategori berkembang ditetapkan sebesar 3%. Target ini disusun berdasarkan asumsi adanya mekanisme pemeringkatan atau klasifikasi BUMDes (rintis, tumbuh, berkembang, dan maju) sebagaimana diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga capaian dapat diukur secara kuantitatif berdasarkan hasil penilaian resmi.

Namun demikian, pada Tahun 2025 terjadi perubahan kebijakan di tingkat nasional, dimana pemeringkatan atau klasifikasi BUMDes tidak lagi dilaksanakan. Dengan tidak adanya mekanisme penilaian kategori berkembang, maka data yang menjadi dasar penghitungan indikator tersebut tidak tersedia. Oleh karena itu, realisasi indikator pada Tahun 2025 dinyatakan Tidak Ada (NA).

Kondisi ini bukan menunjukkan tidak adanya perkembangan BUMDes, melainkan semata-mata disebabkan oleh perubahan sistem pengukuran yang tidak lagi menggunakan pendekatan pemeringkatan. Ke depan, diperlukan penyesuaian indikator kinerja agar tetap relevan dan terukur, misalnya melalui indikator alternatif seperti peningkatan omzet BUMDes, jumlah unit usaha aktif, kontribusi terhadap PAD, atau tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan usaha desa.

Dengan demikian, meskipun realisasi indikator Tahun 2025 tercatat NA, komitmen Pemerintah Kabupaten dalam mendorong penguatan ekonomi desa melalui pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi pengembangan BUMDes tetap menjadi prioritas pembangunan daerah

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir RPJMD dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja Dan Target Akhir RPJMD			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
Bumdes dengan Kategori Berkembang	NA	25%	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

c. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	116.215.799	115.970.020	99,79
TOTAL				

d. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Tabel Program dan Kegiatan (2025)		
No	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa

Sumber Data : DPML Kabupaten Toraja Utara 2025

Sasaran 4.2 Meningkatnya Jaringan Komunikasi dan Informasi Desa

Keberhasilan Sasaran 4.2 Meningkatnya Jaringan Komunikasi dan Informasi Desa dengan Indikator Lembang/Kelurahan yang memiliki Akses Jaringan Internet tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

a. Analisis Pencapaian Sasaran 4.2 (Meningkatnya Jaringan Komunikasi dan Informasi Desa)

Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi	
Lembang/Kelurahan yang memiliki Akses Jaringan Internet	%	80,93	103	127,27
Rata-rata capaian Kinerja				127,27

Sumber Data : Diskominfo-SP Kabupaten Toraja Utara 2025

Dalam rangka mendukung Sasaran 4.2 Meningkatnya Jaringan Komunikasi dan Informasi Desa, Pemerintah Kabupaten menetapkan indikator kinerja Persentase Lembang/Kelurahan yang memiliki Akses Jaringan Internet. Pada Tahun 2025, target indikator ini ditetapkan sebesar 80,93. Pencapaian indikator tersebut mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan akses informasi dan komunikasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan transformasi digital di desa dan kelurahan. Indikator ini menjadi dasar evaluasi dalam perencanaan kebijakan lanjutan guna mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir RPJMD dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPJMD			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Target Nasional



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Lembang/Kelurahan yang memiliki Akses Jaringan Internet	103	115	
---	-----	-----	--

c. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 40,850,000	39,516,000	96.73
2	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,654,419,536	1,495,320,682	90.38
TOTAL				

d. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Tabel Program dan Kegiatan (2025)		
No	PROGRAM	KEGIATAN
1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
2	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda
		2. Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
		3. Koordinasi Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
		4. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan :

- 1.Adanya sinergi antara pemerintah pusat (Kemenkominfo), pemerintah daerah, dan pihak swasta,
2. Memetakan area yang sudah memiliki sinyal (4G/5G) vs area yang sama sekali tidak terjangkau.
3. Bekerja sama dengan operator seluler untuk menambah kapasitas pemancar agar koneksi tidak lambat saat jam sibuk.

Faktor Penghambat :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

1. Wilayah Lembang yang berada di pegunungan atau lembah seringkali mengalami blank spot karena sinyal terhalang kontur alam.
2. Biaya perawatan infrastruktur di daerah terpencil seringkali lebih besar daripada pendapatan yang dihasilkan, membuat penyedia layanan enggan masuk.
- 3 Perangkat pemancar internet memerlukan daya yang konsisten; pemadaman bergilir seringkali mematikan akses internet di pedesaan

Tujuan 5 Meningkatnya Kualitas tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan Inovatif

Keberhasilan Tujuan 5 Meningkatnya Kualitas tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan Inovatif dengan Indikator Indeks Reformasi Birokrasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

a. Analisis Pencapaian Tujuan 5 (Meningkatnya Jaringan Komunikasi dan Informasi Desa)

Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi	
Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	62,32	64,88	104,10
Rata-rata capaian Kinerja				104,10

Sumber Data : Menpan RI 2025

Dalam rangka mendukung Tujuan 5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif, Pemerintah Kabupaten menetapkan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi. Pada Tahun 2025, target indikator ini ditetapkan sebesar 64,49. Indikator tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, akuntabilitas kinerja, serta kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir RPJMD dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja dan target akhir RPJMD			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Target Nasional
Indeks Reformasi Birokrasi	64,88	73,17	

c. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32.480.400	32.480.400	100
TOTAL				

d. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Tabel Program dan Kegiatan (2025)		
No	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Sumber Data : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara 2025

Sasaran 5.1 Terwujudnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Keberhasilan Sasaran 5.1 Terwujudnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah dengan Indikator Nilai Sakip tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

a. Analisis Pencapaian Sasaran 5.1 (Terwujudnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah)

Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi	
Nilai Sakip	Angka	62,36	61,95	99,34
Rata-rata capaian Kinerja				99,34

Sumber Data :

Sasaran 5.1 diukur melalui indikator Nilai SAKIP. Pada Tahun 2025, target Nilai SAKIP ditetapkan sebesar 62,36. Penetapan target tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penguatan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja perangkat daerah. Pencapaian sasaran ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik yang lebih efektif dan berkelanjutan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir RPJMD dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPJMD			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
Nilai Sakip	61,95	69,35	

c. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	25.354.200	25.354.200	100
TOTAL				

d. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Tabel Program dan Kegiatan (2025)		
No	PROGRAM	KEGIATAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

1	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
---	--	--

Sumber Data : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara 2025

Klasifikasi nilai laporan kinerja berdasarkan Permenpan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP penilaian SAKIP mempunyai kategori sebagai berikut:

1. AA Nilai > 90 -100 (Sangat Memuaskan)
2. A Nilai > 80 – 90 (Memuaskan)
3. BB Nilai > 70 – 80 (Sangat Baik)
4. B Nilai > 60 -70 (Baik)
5. CC Nilai > 50 – 60 (Cukup)
6. C Nilai > 30 – 50 (Kurang)
7. D Nilai > 0 – 30 (Sangat Kurang)

Untuk tahun 2025, nilai hasil evaluasi/penilaian terhadap SAKIP Tahun 2025 Kabupaten Toraja Utara mendapat Nilai B 61,95 dengan kategori B, nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 61,24. Belum tercapainya target disebabkan antara lain yaitu penetapan sasaran pada dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah dan Pemda belum seluruhnya berorientasi hasil dan belum dilengkapi dengan indikator yang SMART. Oleh karena itu, pada tahun 2025 dilakukan pelatihan sistem perencanaan untuk meningkatkan kemampuan SDM melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan menyusun laporan kinerja.

Agar penerapan akuntabilitas kinerja, lebih efektif maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

Catatan :

- Masih ditemukan tujuan dan sasaran kinerja misalnya "Meningkatnya Jaringan Komunikasi dan Informasi Desa" pada perencanaan level pemerintah daerah yang belum berorientasi hasil. Formulasi tujuan/sasaran cenderung bersifat output-activity oriented dan belum menggambarkan perubahan yang ingin dicapai pada level outcome. Kondisi ini menunjukkan bahwa logika perencanaan belum sepenuhnya mengarahkan instansi pada pencapaian manfaat nyata bagi masyarakat.
- Identifikasi Critical Success Factors (CSF) pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara belum berbasis data dan bukti yang relevan dengan kondisi atau isu strategis yang dihadapi. Penetapan CSF cenderung bersifat normatif atau sekadar menyalin dari contoh umum, sehingga tidak mencerminkan faktor pengungkit spesifik yang benar-benar mempengaruhi pencapaian hasil akhir dari kabupaten Toraja Utara.
- Masih ditemukan penetapan target kinerja pada perencanaan kinerja level pemerintah daerah belum sepenuhnya didasarkan pada data dan tren capaian periode sebelumnya. Target tidak memperlihatkan keterkaitan logis dengan performa historis sehingga tidak menggambarkan proyeksi peningkatan kinerja yang akurat dan berbasis bukti.
- Indikator Kinerja Utama (IKU) pada perencanaan level pemerintah daerah belum memenuhi prinsip SMART-C. Sebagian indikator belum relevan dalam mengukur sasaran hasil, contohnya indikator "Persentase Lembaga/Kelurahan yang memiliki lembaga adat



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

yang aktif" dalam mengukur sasaran kinerja "Meningkatnya kehidupan sosial budaya yang harmonis", sebagian lagi tidak cukup mencerminkan capaian yang ingin diwujudkan, contohnya indikator kinerja "Persentase kelembagaan keagamaan yang efektif dan berfungsi" dalam mengukur sasaran kinerja "Meningkatnya kualitas kehidupan beragama". Kondisi ini mengurangi kemampuan IKU untuk menggambarkan pencapaian outcome secara akurat.

- Sebagian indikator kinerja di tingkat pemerintah daerah maupun tingkat OPD belum memiliki penanggung jawab pengukuran (PIC) yang ditetapkan secara jelas. Ketiadaan PIC menyebabkan proses pengumpulan data, verifikasi, dan pelaporan kinerja menjadi tidak terkoordinasi serta menimbulkan potensi ketidakkonsistenan dalam hasil pengukuran.
- Instansi belum memiliki dashboard monitoring kinerja yang dapat menampilkan perkembangan capaian secara berkala. Ketiadaan dashboard ini membuat proses pemantauan, deteksi dini deviasi, serta pengambilan keputusan berbasis data menjadi kurang optimal.
- Pelaporan kinerja masih bersifat deskriptif dan hanya memuat uraian kegiatan atau capaian angka tanpa analisis evaluatif. Pada beberapa ketercapaian kinerja, baik di level pemerintah daerah maupun OPD, tidak terdapat penjelasan mengenai penyebab keberhasilan atau kegagalan, dampak terhadap sasaran hasil, maupun langkah korektif yang diperlukan. Hal ini membuat laporan tidak dapat berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan dan pembelajaran kinerja.
- Pada beberapa OPD, masih ditemukan pelaporan kinerja yang tidak konsisten dengan dokumen perencanaan. Beberapa indikator yang tercantum dalam rencana kinerja tidak muncul dalam laporan tanpa penjelasan ataupun keterangan. Ketidakhadiran indikator ini menimbulkan celah dalam akuntabilitas dan menyulitkan penelusuran kontribusi kinerja secara utuh.
- Instansi belum memiliki SOP atau pedoman baku yang mengatur pelaksanaan evaluasi internal kinerja. Ketiadaan standar ini membuat proses evaluasi berjalan tidak seragam antar unit, tidak terdokumentasi dengan baik, dan sulit memastikan kualitas evaluasi yang konsisten dari tahun ke tahun.
- Proses Evaluasi Internal pada kabupaten Toraja Utara masih lemah kualitasnya. Belum terdapat laporan hasil evaluasi sebagai media untuk menyajikan temuan kritis yang menggambarkan akar masalah dan area kinerja yang perlu diperbaiki. Sehingga tidak ada rekomendasi perbaikan yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi.
- Evaluator internal pada Kabupaten Toraja Utara belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai metodologi evaluasi kinerja. Keterbatasan ini menyebabkan proses evaluasi kurang tajam, tidak konsisten dengan prinsip evaluasi berbasis hasil, dan berisiko menghasilkan analisis yang tidak akurat sebagai dasar pengambilan keputusan.

Rekomendasi :

- Instansi perlu melakukan perbaikan terhadap tujuan dan sasaran agar berorientasi pada outcome, dengan memastikan formulasi kinerja mencerminkan perubahan yang ingin diwujudkan. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja agar selaras dengan hasil yang menjadi mandat dan kewenangan instansi.
- Instansi disarankan mengidentifikasi ulang CSF dengan mempertimbangkan bukti empiris, tren kinerja, akar masalah, dan variabel-variabel kritis yang mempengaruhi pencapaian outcome. Perbaikan ini diperlukan untuk memastikan CSF benar-benar menjadi dasar fokus intervensi.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

- Instansi disarankan melakukan penyesuaian target dengan menimbang capaian historis dan dinamika kondisi aktual. Proyeksi kinerja yang lebih berbasis bukti diperlukan untuk menjaga konsistensi antara tren kinerja dan target yang ditetapkan.
- Instansi disarankan meninjau kembali kualitas IKU untuk memastikan keterukuran, relevansi, dan kecukupannya dalam menggambarkan capaian sasaran hasil. Penyesuaian indikator perlu dilakukan agar IKU benar-benar mencerminkan perubahan yang ingin dicapai dan dapat dipantau secara konsisten.
- Instansi perlu menetapkan PIC untuk setiap indikator kinerja secara eksplisit, lengkap dengan tugas, kewenangan, dan mekanisme pelaporan yang harus dipatuhi. Pengukuran indikator hanya dapat diterima apabila dilaporkan oleh PIC yang ditugaskan secara formal.
- Instansi disarankan menyusun mekanisme pemantauan yang lebih terstruktur dengan menampilkan ringkasan capaian indikator dalam format visual. Kehadiran dashboard, meskipun sederhana, diperlukan agar perkembangan kinerja dapat dipantau secara lebih cepat dan terarah.
- Instansi disarankan memperkuat struktur pelaporan dengan memasukkan unsur analisis seperti tren capaian, faktor pendorong dan penghambat, serta risiko terhadap pencapaian akhir. Penambahan elemen evaluatif ini diperlukan agar laporan dapat memberikan gambaran utuh mengenai kualitas pencapaian kinerja.
- Instansi disarankan melakukan pengecekan silang antara dokumen perencanaan dan laporan kinerja sebelum finalisasi laporan. Setiap indikator yang hilang atau berubah harus dijelaskan melalui keterangan resmi agar alur akuntabilitas tetap jelas dan dapat ditelusuri.
- Instansi disarankan merumuskan panduan evaluasi internal yang lebih terstruktur, termasuk alur kerja, kriteria penilaian, dan tata cara dokumentasi hasil. Pedoman ini akan membantu memastikan bahwa setiap evaluasi dilakukan secara konsisten dan dapat ditelusuri.
- Instansi disarankan meninjau ulang proses evaluasi internal hingga penyusunan laporan evaluasi agar mencakup identifikasi masalah utama, penyebab deviasi, serta rekomendasi perbaikan yang relevan dan realistis. Penguatan konten ini akan membantu memastikan bahwa laporan evaluasi benar-benar memberikan arah perbaikan kinerja.
- Instansi disarankan memperkuat kapasitas evaluator internal dengan memberikan pemahaman yang jelas mengenai prinsip evaluasi berbasis hasil, cara membaca indikator, teknik analisis capaian, serta standar mutu evaluasi. Penguatan ini penting agar proses evaluasi menghasilkan analisis yang valid dan dapat ditindaklanjuti.

Sasaran 5.2 Terwujudnya Pemerintah Berbasis Elektronik dan Inovatif

Keberhasilan Sasaran 5.2 Terwujudnya Pemerintah Berbasis Elektronik dan Inovatif dengan Indikator Indeks SPBE dan Indeks Inovasi Daerah tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

a. Analisis Pencapaian Sasaran 5.2 (Terwujudnya Pemerintah Berbasis Elektronik dan Inovatif)

Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi	
Indeks SPBE	Angka	2.6	2.31	88.85
Indeks Inovasi Daerah	Skor	27,73	44	158,67



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Rata-rata capaian Kinerja				123,76
----------------------------------	--	--	--	--------

Sumber Data : DisKomindo-SP, Bapperida Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Sasaran 5.2 diukur melalui indikator Indeks SPBE dan Indeks Inovasi Daerah. Pada Tahun 2025, target Indeks SPBE ditetapkan sebesar 2,6 dan target Indeks Inovasi Daerah sebesar 27,73 sebagai arah pencapaian terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik dan inovatif. Penetapan target tersebut menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penguatan tata kelola SPBE serta pengembangan inovasi daerah guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir RPJMD dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPJMD			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Target Nasional
Indeks SPBE	2.31	2.6	3.0
Indeks Inovasi Daerah	27,73	37,63	

c. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40,850,000	39,516,000	96.73%
2	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,654,419,536	1,495,320,682	90.38%
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	337,086,850	316,297,285	93.83%
TOTAL				

d. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Tabel Program dan Kegiatan (2025)		
No	PROGRAM	KEGIATAN
1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
2	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda
		Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

		Koordinasi Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
		Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
		Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Sumber Data : DisKomindo-SP, Bapperida Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Indeks SPBE

Faktor Penyebab Belum Tercapainya Target Integrasi Domain Layanan: Masih terdapat beberapa aplikasi yang bersifat sektoral (silogisme data) sehingga belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu portal layanan terpadu. Kematangan Manajemen SPBE: Aspek manajemen risiko TIK dan audit teknologi informasi masih dalam tahap rintisan, yang secara signifikan mempengaruhi bobot penilaian total. Kesenjangan Infrastruktur & SDM: Dinamika perubahan teknologi yang cepat belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur yang merata hingga ke level terbawah serta kompetensi digital aparatur yang masih perlu ditingkatkan.

Langkah Strategis ke Depan (Solusi) Untuk mengejar ketertinggalan instansi telah menetapkan langkah-langkah strategis: Penyederhanaan Aplikasi: Melakukan konsolidasi aplikasi guna meningkatkan nilai pada domain Layanan SPBE. Penguatan Tata Kelola: Mempercepat penyusunan kebijakan internal mengenai manajemen data, keamanan informasi, dan arsitektur SPBE. Kolaborasi Lintas Unit: Menghilangkan ego sektoral dalam pengelolaan data untuk mendukung satu data Indonesia.

Sasaran 5.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Keberhasilan Sasaran 5.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Indeks Pelayanan Publik tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

a. Analisis Pencapaian Sasaran 5.3 (Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik)

Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi	
Indeks Pelayanan Publik	Angka	2.61	2.30	88,12
Rata-rata capaian Kinerja				88,12

Sumber Data :

Sasaran 5.3 diukur melalui indikator Indeks Pelayanan Publik. Pada Tahun 2025, target Indeks Pelayanan Publik ditetapkan sebesar 2,61. Penetapan target ini mencerminkan arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh perangkat daerah secara berkelanjutan.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir RPJMD dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja dan target Akhir RPJMD			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
Indeks Pelayanan Publik	2.30	3.51	-

c. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	-	-	-
TOTAL				

d. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Tabel Program dan Kegiatan (2025)		
No	PROGRAM	KEGIATAN
1	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Tujuan 6 Meningkatnya Kehidupan Sosial Budaya Yang Harmonis

Keberhasilan Tujuan 6 Meningkatnya Kehidupan Sosial Budaya Yang Harmonis dengan Indikator Persentase Lembang/Kelurahan yang Memiliki Lembaga Adat Aktif tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

a. Analisis Pencapaian Tujuan 6 (Meningkatnya Kehidupan Sosial Budaya Yang Harmonis)

Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi	
Persentase Lembang/ Kelurahan yang Memiliki Lembaga Adat Aktif	%	65,03	100	153,77
Rata-rata capaian Kinerja				

Sumber Data : DPML Kabupaten Toraja Utara 2025

Tujuan 6 diukur melalui indikator Persentase Lembang/Kelurahan yang Memiliki Lembaga Adat Aktif. Pada Tahun 2025, target indikator tersebut ditetapkan sebesar 65,03 persen. Penetapan target ini mencerminkan arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendukung terpeliharanya kehidupan sosial budaya yang harmonis melalui keberadaan dan peran lembaga adat di tingkat lembang/kelurahan.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir Renstra dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Target Nasional
Persentase Lembang/ Kelurahan yang Memiliki Lembaga Adat Aktif	100	100	

c. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Program pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	1.350.468.154	1.349.319.350	99,91
TOTAL				

d. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Tabel Program dan Kegiatan (2025)		
No	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran 6.1 Berkembangnya Kebudayaan Daerah

Keberhasilan Sasaran 6.1 Berkembangnya Kebudayaan Daerah dengan Indikator Persentase Kelembagaan Kebudayaan yang Berperan dalam Kemajuan Kebudayaan Daerah tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

a. Analisis Pencapaian Sasaran 6.1 (Berkembangnya Kebudayaan Daerah)

Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi	
Persentase Kelembagaan Kebudayaan yang Berperan dalam Kemajuan Kebudayaan Daerah	%	100	70	70
Rata-rata capaian Kinerja				70



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Sumber Data :

Sasaran 6.1 diukur melalui indikator Persentase Kelembagaan Kebudayaan yang Berperan dalam Kemajuan Kebudayaan Daerah. Pada Tahun 2025, target indikator tersebut ditetapkan sebesar 100 persen. Penetapan target ini mencerminkan arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendorong peran kelembagaan kebudayaan guna mendukung kemajuan dan pelestarian kebudayaan daerah.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir RPJMD dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja dan Target akhir RPJMD			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
Persentase Kelembagaan Kebudayaan yang Berperan dalam Kemajuan Kebudayaan Daerah	70	100	

c. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Pengembangan kesenian tradisional	155.000.000	153.840.000	99,25
2	Pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	702.130.088	668.519.092	95,21
TOTAL				

d. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Tabel Program dan Kegiatan (2025)		
No	PROGRAM	KEGIATAN
1	Pengembangan kesenian tradisional	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga kesenian tradisional Hari Tari, Toraja Highland Festival
2	Pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	Peelaksanaan peningkatan kapasitas sdm pariwisata dan ekraf Tingkat dasar(Geopark, Fam Trip)

Sumber Data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara 2025

Kendala tidak ada anggaran daerah solusinya DAU Pendidikan dari pusat dialihkan untuk kegiatan yang dapat mendukung pemajuan kebudayaan. Disisi lain anggaran untuk program khusus pembinaan Lembaga kebudayaan tidak tersedia karena DAU Pendidikan sudah ada juknisnya. Lembaga kebudayaan selain sanggar kesenian belum dijangkau padahal masih banyak Lembaga kebudayaan yang dapat dibentuk, karena kurangnya anggaran



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Sasaran 6.2 Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama

Keberhasilan Sasaran 6.2 Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama dengan Indikator Persentase Kelembagaan Keagamaan yang Efektif Berfungsi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

a. Analisis Pencapaian Sasaran 6.2 (Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama)

Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi	
Kelembagaan Keagamaan yang Efektif Berfungsi	%	100	100	100
Rata-rata capaian Kinerja				100

Sumber Data : Bagian KESRA Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara 2025

Sasaran 6.2 diukur melalui indikator Persentase Kelembagaan Keagamaan yang Efektif Berfungsi. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat keberfungsian kelembagaan keagamaan dalam mendukung terciptanya kehidupan beragama yang harmonis di masyarakat. Pada Tahun 2025, target indikator ditetapkan sebesar 100 persen, yang menunjukkan arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam memastikan seluruh kelembagaan keagamaan dapat menjalankan peran dan fungsinya secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir RPJMD dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPJMD			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
Kelembagaan Keagamaan yang Efektif Berfungsi	100	100	

c. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 2,824,727,200	Rp 2,744,727,200	97.17%
TOTAL				

d. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Tabel Program dan Kegiatan (2025)		
No	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Sumber Data : Bagian KESRA Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara 2025



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Sasaran 6.3 Meningkatnya Kesenjangan Gender pada Berbagai Aspek Kehidupan

Keberhasilan Sasaran 6.3 Meningkatnya Kesenjangan Gender pada Berbagai Aspek Kehidupan dengan Indikator Indeks Ketimpangan Gender tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

a. Analisis Pencapaian Sasaran 6.3 (Meningkatnya Kesenjangan Gender pada Berbagai Aspek Kehidupan)

Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi	
Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,185	Belum Rilis	-
Rata-rata capaian Kinerja				

Sumber Data : DP3AP2KB Kabupaten Toraja Utara 2025

Sasaran 6.3 diukur menggunakan indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan gender pada berbagai aspek kehidupan. Pada Tahun 2025, target Indeks Ketimpangan Gender ditetapkan sebesar 0,185 sebagai tolok ukur dalam memantau pelaksanaan kebijakan terkait kesetaraan gender di daerah.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir RPJMD dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPJMD			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
Indeks Ketimpangan Gender	Belum Rilis	0,088	

c. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Program PUG dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 138,780,600	Rp 137,614,000	99.16%
2	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp 20,247,000	Rp 18,706,200	92.39%
TOTAL				

d. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Tabel Program dan Kegiatan (2025)		
No	PROGRAM	KEGIATAN
1		1. Sosialisasi Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA)



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Program PUG dan Pemberdayaan Perempuan	2. Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus Organisasi Wanita
	3. Peringatan Hari Kartini
	4. Peringatan Hari Ibu
	5. Rapat Kerja Daerah Dharma Wanita Persatuan Kab. Toraja Utara
	6. Sosialisasi dan Diskusi Peran Orangtua dalam Pembentukan dan Pendidikan Karakter Anak
	7. Peningkatan Kapasitas SDM Anggota DWP dan Fasilitas Bantuan Modal Usaha
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	1. Penguatan Kapasitas SDM Pengelola Sistem Data Gender dan Anak

Sumber Data : DP3AP2KB Kabupaten Toraja Utara 2025

Sasaran 6.4 Meningkatkan Kualitas Pemuda dan Olahraga

Keberhasilan Sasaran 6.4 Meningkatkan Kualitas Pemuda dan Olahraga dengan Indikator Persentase Wirausaha Muda dan Indikator Persentase Atlet Kabupaten yang Memperoleh Perangkat dalam Kejuaraan Regional dan Nasional tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

a. Analisis Pencapaian Sasaran 6.4 (Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga)

Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi	
Persentase Wirausaha Muda	%	0,28	6,01	2.146
Persentase Atlet Kabupaten yang Memperoleh Perangkat dalam Kejuaraan Regional dan Nasional	%	13,86	3,07	22%
Rata-rata capaian Kinerja				

Sumber Data : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toraja Utara 2025

Sasaran 6.4 diukur melalui indikator Persentase Wirausaha Muda dan Persentase Atlet Kabupaten yang Memperoleh Perangkat dalam Kejuaraan Regional dan Nasional. Indikator Persentase Wirausaha Muda digunakan untuk menggambarkan tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kewirausahaan, sedangkan indikator Persentase Atlet Kabupaten yang Memperoleh Perangkat dalam Kejuaraan Regional dan Nasional digunakan untuk menggambarkan capaian pembinaan olahraga daerah. Kedua indikator tersebut digunakan sebagai tolok ukur dalam memantau pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengembangan pemuda dan olahraga.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Untuk Persentase wirausaha muda diperoleh realisasi sebesar 6,01. Jumlah wirausaha muda di kabupaten Toraja Utara Adalah 1.436 sementara jumlah total wirausaha 23.883. untuk mendapatkan realisasi 6,01 digunakan rumus:

$$\text{persentase wirausaha muda} = \frac{\text{jumlah wirausaha muda}}{\text{jumlah total wirausaha}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{persentase wirausaha muda} &= \frac{1.436}{23.883} \times 100\% \\ &= 6,01\end{aligned}$$

Untuk Persentase Atlet Kabupaten yang Memperoleh Perangkat dalam Kejuaraan Regional dan Nasional digunakan rumas sebagai berikut:

$$\text{persentase atlet Kabupaten} = \frac{\text{jumlah medali yg diperoleh (regional dan nasional)}}{\text{total atlet kabupaten}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{persentase Atlet Kabupaten} &= \frac{7}{228} \times 100\% \\ &= 3,07\end{aligned}$$

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir RPJMD dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPJMD			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
Persentase Wirausaha Muda	6,01	0,34	
Persentase Atlet Kabupaten yang Memperoleh Perangkat dalam Kejuaraan Regional dan Nasional	3,07	23,76	

c. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2,143,143,819	Rp 2,110,177,883	98.46%
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp 429,730,732	Rp 429,250,241	99.89%
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp 9,095,895,413	p 8,894,009,118	97.78%
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp 105,620,000	Rp 105,620,000	100.00%
5				



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

TOTAL			
--------------	--	--	--

d. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Tabel Program dan Kegiatan (2025)		
No	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
		2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kab/ Kota 2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah- Kab/Kota. 3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 4. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah

Sumber Data : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toraja Utara 2025

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Permasalahan atau Kendala yang dihadapi Adalah Jumlah pemuda yang mampu menembus prestasi tingkat nasional masih terbatas, Kejuaraan tingkat nasional tidak dilaksanakan secara rutin setiap tahun, Pembinaan dan pendampingan belum merata di seluruh cabang olahraga, Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung latihan dan kompetisi, Keterbatasan anggaran pembinaan prestasi nasional, Keterbatasan Pelatih untuk beberapa Cabang Olahraga., Masih Kurangnya minat Pemuda pada cabang olahraga Tertentu



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Solusi yang telah dilakukan : Melakukan seleksi dan pembinaan terfokus pada pemuda dan atlet potensial berprestasi, Memaksimalkan keikutsertaan pada kejuaraan regional sebagai ajang persiapan dan seleksi menuju tingkat nasional, Memprioritaskan pembinaan pada cabang olahraga yang memiliki potensi dan rekam jejak prestasi, Mengoptimalkan fasilitas yang tersedia serta menjalin kerja sama dengan pihak terkait untuk mendukung kebutuhan Latihan, Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan KONI, cabang olahraga, dan mitra terkait untuk optimalisasi sumber daya, Melakukan Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Bakat sejak Usia Dini.

**Tujuan 7 Meningkatnya Daya Dukung Lingkungan Hidup
Berkelanjutan dan Berketahanan Iklim**

Keberhasilan Tujuan 7 Meningkatnya Daya Dukung Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Berketahanan Iklim dengan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indikator Penurunan Intensitas Emisi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

a. Analisis Pencapaian Tujuan 7 (Meningkatnya Daya Dukung Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Berketahanan Iklim)

Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi	
Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	77,38	81,45	77,38
Penurunan Intensitas Emisi	%	0	0	0
Rata-rata capaian Kinerja				

Sumber Data : DISPERKIMTAN-LH, Aplikasi AKSARA BAPPENAS

Dalam rangka mengukur pencapaian Tujuan 7, Pemerintah Daerah menetapkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Intensitas Emisi sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup digunakan untuk menggambarkan kondisi kualitas lingkungan hidup secara umum, sedangkan indikator Penurunan Intensitas Emisi digunakan untuk menggambarkan upaya pengendalian emisi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan ketahanan iklim. Penetapan kedua indikator tersebut sebagai IKU Kabupaten dimaksudkan untuk memantau kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pelaksanaan kebijakan terkait mitigasi perubahan iklim.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir RPJMD dan Nasional

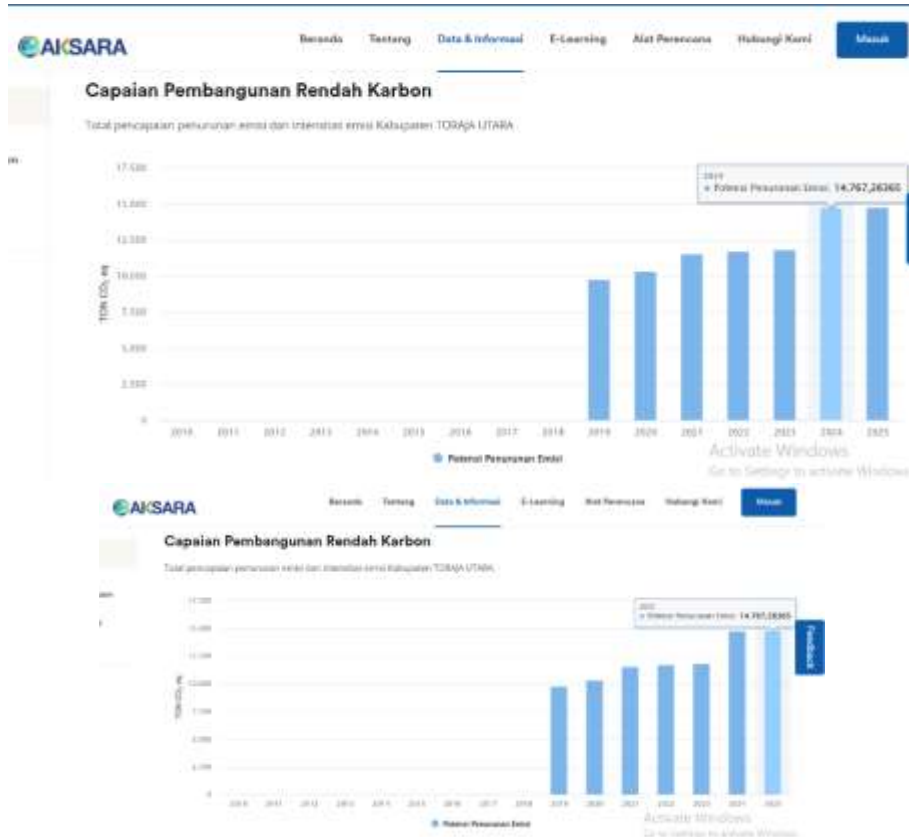
Tabel perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPJMD			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Target Nasional
Kualitas Lingkungan Hidup	81,45	78,22	
Penurunan Intensitas Emisi GRK	0	44,65	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Realisasi tersebut tidak hanya memenuhi target, tetapi melampauinya sebesar 3,23 poin. Ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 2025 berjalan lebih efektif dari yang diproyeksikan sebelumnya

Untuk penurunan intensitas dibawah ini terdapat grafik perbandingan tahun 2024 dengan tahun 2025



Berdasarkan dua grafik Capaian Pembangunan Rendah Karbon Kabupaten Toraja Utara, nilai yang ditunjukkan untuk Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada tahun 2024 dan 2025 adalah sama, yaitu:

- 2024: 14.767,26365 ton CO₂ eq
- 2025: 14.767,26365 ton CO₂ eq

Jika dibandingkan, nilai potensi penurunan emisi pada tahun 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2024. Artinya jumlah emisi yang berhasil ditekan atau potensi pengurangan emisi masih berada pada tingkat yang sama.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi tambahan penurunan emisi pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

c. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	249.669.000,00	237.587.407,00	95,16
TOTAL				

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup tahun 2025 berhasil mencapai tingkat efektivitas yang tinggi. Dengan penyerapan anggaran sebesar 95,16%, program ini mampu mendorong capaian IKLH hingga 81,45, yang mana melampaui target Renstra sebesar 3,23 poin. Hal ini menunjukkan pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran dan berdaya guna.

d. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Tabel Program dan Kegiatan (2025)		
No	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Sasaran 7.1 Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan

Keberhasilan Sasaran 7.1 Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan dengan Indikator Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indikator Indeks Tutupan Lahan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

a. Analisis Pencapaian Sasaran 7.1 (Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan)

Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi	
Indeks Kualitas Air	Angka	76,98	77,22	100,31
Indeks Kualitas Udara	Angka	79,98	89,89	112,39
Indeks Tutupan Lahan	Angka	73,24	73,45	100,28
Rata-rata capaian Kinerja				

Sumber Data : Disperkimtan-LH Kabuptaen Toraja Utara 2025

Sasaran 7.1 diukur melalui indikator Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Tutupan Lahan. Indeks Kualitas Air digunakan untuk menggambarkan kondisi mutu air sebagai salah satu komponen utama lingkungan hidup. Indeks Kualitas Udara digunakan untuk menggambarkan kondisi mutu udara ambien yang berpengaruh terhadap kesehatan dan lingkungan. Sementara itu, Indeks Tutupan Lahan digunakan untuk



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

menggambarkan kondisi tutupan lahan sebagai faktor pendukung keberlanjutan ekosistem dan daya dukung lingkungan. Ketiga indikator tersebut digunakan untuk memantau pencapaian sasaran peningkatan kualitas lingkungan hidup pada aspek air, udara, dan tutupan lahan secara terintegrasi.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir Renstra dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja 3(tiga) Tahun Terakhir			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Target Nasional
Indeks Kualitas Air	77,22	77,78	
Indeks Kualitas Udara	89,89	81,18	
Indeks Tutupan Lahan	73,45	73,52	

1. Indeks Kualitas Udara (Sangat Berhasil): Merupakan capaian terbaik karena melampaui target secara signifikan, yaitu mencapai 89,89 dari target 81,18. Ini menunjukkan kualitas udara jauh lebih bersih dari yang diproyeksikan.
2. Indeks Tutupan Lahan (Hampir Mencapai Target): Realisasi sebesar 73,45 sudah sangat mendekati target akhir Renstra sebesar 73,52. Hanya terdapat selisih tipis sekitar 0,07 poin untuk mencapai target sempurna.
3. Indeks Kualitas Air (Perlu Perhatian): Satu-satunya indikator yang berada di bawah target, dengan realisasi 77,22 dari target 77,78. Terdapat defisit sebesar 0,56 poin yang menunjukkan adanya tantangan dalam pengendalian pencemaran air.

c. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	249.669.000	237.587.407	

d. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Tabel Program dan Kegiatan (2025)		
No	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Sumber Data : Disperkimtan-LH Kabupaten Toraja Utara 2025

Sasaran 7.2 Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Risiko Bencana

Keberhasilan Sasaran 7.2. Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Risiko Bencana dengan Indikator Indeks Resiko Bencana tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

a. Analisis Pencapaian Sasaran 7.2 (Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Risiko Bencana)

Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi	
Indeks Resiko Bencana	Angka	143,04	144,97	98,65
Rata-rata capaian Kinerja				

Sumber Data : BPBD Kabupaten Toraja Utara 2025

Indikator Kinerja Utama Indeks Risiko Bencana mengalami penurunan dari nilai 143,14 di tahun 2024 menjadi 143,97 di tahun 2025 atau naik 1,93 poin. (Berdasarkan surat dari BNPB Nomor B-56/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026, tanggal 30 Januari 2026, perihal Penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025 dari Provinsi Sulawesi Selatan, dimana hasil penilaian Indeks Resiko Bencana mengalami peningkatan, dalam artian bahwa kinerja BPBD Kab. Toraja Utara mengalami penurunan, hal ini dikarenakan mekanisme penilaian indeks Resiko bencana dihitung dengan menggunakan baseline terbaru yang telah dimutakhirkan dengan menggunakan komponen jenis bencana atau kerentanan mengalami kenaikan dari 8 jenis menjadi 11 jenis bencana, sehingga target indeks resiko bencana yang direncanakan mengalami kenaikan. Menurut BNPB hasil perhitungan IRB pada periode 2015 sampai 2024 tidak bisa dibandingkan karena cara perhitungannya mengalami perubahan).

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir Renstra dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPJMD			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
Indeks Resiko Bencana	144,97		

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya				
No	Uraian Program	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi	%
1	Program Penanggulangan Bencana	21.209.951.218	0.449.444.269	96,41%
TOTAL				

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Tabel Program dan Kegiatan (2025)		
No	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
--	--	--

Sumber Data : BPBD Kabupaten Toraja Utara 2025

Sasaran 7.3 Meningkatnya Ketahanan Energi

Keberhasilan Sasaran 7.3. Meningkatnya Ketahanan Energi dengan Indikator Konsumsi Listrik Perkapita tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

a. Analisis Pencapaian Sasaran 7.3 (Meningkatnya Ketahanan Energi)

Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi	
Konsumsi Listrik Perkapita	Kwh/jiwa	209,63	296,55	141

Sumber Data : PLN Toraja Utara 2025

Indikator Konsumsi Listrik Per Kapita digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam pemenuhan dan pemerataan kebutuhan energi listrik masyarakat sebagai wujud ketahanan energi daerah, serta sebagai dasar evaluasi efektivitas kebijakan dan program pembangunan sektor energi.

Tercapainya bahkan terlampauinya target tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan program intensifikasi dan ekstensifikasi oleh PT PLN (Persero).

Program intensifikasi dilakukan melalui optimalisasi pelanggan eksisting, antara lain:

- Program promo tambah daya.
- Peningkatan keandalan pasokan listrik sehingga pelanggan dapat menggunakan listrik secara lebih produktif.
- Digitalisasi layanan (PLN Mobile, kemudahan pembayaran) yang meningkatkan kenyamanan dan konsumsi listrik.
- Program Electrifying Lifestyle yang mendorong penggunaan kompor induksi, kendaraan listrik, dan peralatan berbasis listrik lainnya.

Sementara itu, program ekstensifikasi dilakukan melalui:

- Perluasan jaringan listrik ke wilayah yang belum berlistrik.
- Penyambungan pelanggan baru (rumah tangga, UMKM, fasilitas publik).

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025, Target Akhir RPJMD dan Nasional

Tabel perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPJMD			
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
Konsumsi Listrik Perkapita	296,55	240,72	

Kekurangan-Kekurangan Yang Harus Diperbaiki Serta Solusi Yang Telah Dilakukan:
Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan Kinerja

A. Faktor Keberhasilan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

1. Program Intensifikasi Pelanggan Eksisting

PT PLN (Persero) berhasil mendorong peningkatan konsumsi melalui:

- Program promo tambah daya .
- Peningkatan keandalan sistem distribusi sehingga jam nyala lebih stabil.
- Digitalisasi layanan pelanggan melalui aplikasi PLN Mobile

2. Program Ekstensifikasi (Penambahan Pelanggan Baru)

Perluasan jaringan dan penyambungan pelanggan baru meningkatkan jumlah rumah tangga dan pelaku usaha yang menggunakan listrik, sehingga konsumsi per kapita meningkat.

3. Electrifying Lifestyle & Produktivitas Ekonomi

- Peralihan penggunaan energi berbasis BBM/LPG ke listrik (kompor induksi, peralatan listrik, UMKM berbasis listrik) turut mendorong pertumbuhan konsumsi.
- Penggunaan kendaraan listrik Mobil Listrik dan Motor Listrik, dimana di PLN ULP Rantepao sudah tersedia Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)

4. Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Meningkatnya aktivitas usaha, jasa, dan sektor publik berdampak langsung pada kenaikan kebutuhan energi listrik.

B. Potensi Faktor Risiko / Penyebab Penurunan (Jika Terjadi)

Meskipun saat ini capaian melampaui target, beberapa faktor yang berpotensi menurunkan kinerja ke depan antara lain:

- Perlambatan ekonomi yang menurunkan daya beli.
- Gangguan pasokan atau keandalan jaringan.
- Peralihan sebagian konsumsi ke sumber energi mandiri (PLTS atap, genset).
- Efisiensi energi yang tinggi tanpa diimbangi pertumbuhan pelanggan baru.

C. Solusi yang Telah Dilakukan

- Optimalisasi kapasitas jaringan dan gardu distribusi.
- Program promo tambah daya untuk meningkatkan konsumsi.
- Peningkatan kualitas pelayanan dan respons gangguan.
- Perluasan jaringan listrik ke wilayah potensial pertumbuhan beban.
- Sosialisasi penggunaan listrik produktif kepada UMKM dan rumah tangga.

Capaian 137,53% menunjukkan peningkatan signifikan dalam konsumsi listrik per kapita sebagai indikator ketahanan energi. Keberhasilan ini didorong oleh strategi intensifikasi dan ekstensifikasi yang efektif, peningkatan keandalan sistem, serta pertumbuhan ekonomi lokal. Tantangan ke depan berfokus pada menjaga keberlanjutan pasokan dan memastikan peningkatan konsumsi tetap berkualitas, produktif, dan efisien.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran Pendapatan Kabupaten Toraja Utara tahun 2025 sebesar Rp. 1.099.081.786.981,54 terealisasi sebesar Rp. 1.019.031.674.737,56 atau dengan capaian



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

sebesar 92,71% dari target. Rincian Anggaran dan Realisasi pendapatan tahun 2023 dapat terlihat dalam tabel berikut ini

1. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025
Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH:	1.099.081.786.981,54	996.589.536.788,56	90,67
a. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	71.932.985.564,77	68.432.180.561,56	95,13
Pajak Daerah	38.542.769.624,00	38.772.368.377,73	100,59
Retribusi Daerah	18.397.595.119,77	15.882.019.751,00	86,32
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.226.257.821,00	6.226.257.821,00	100,00
Lain-lain PAD yang Sah	8.766.363.000,00	7.551.534.611,83	86,14
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	71.932.985.564,77	68.432.180.561,56	95,13
b. PENDAPATAN TRANSFER	1.007.997.901.416,77	911.524.898.170,00	90,42
Dana Bagi Hasil (DBH)	13.405.911.893,00	8.917.301.327,00	66,51
Dana Alokasi Umum (DAU)	599.537.622.000,00	605.830.550.156,00	101,04
Dana Alokasi Khusus (DAK)	208.470.746.583,00	153.523.544.367,00	73,64
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	821.414.280.476,00	768.271.395.850,00	93,53
Dana Desa	97.050.349.000,00	69.259.137.286,00	71,36
Insentif Fiskal	7.048.676.000,00	7.048.676.000,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	104.099.025.000,00	76.307.813.286,00	73,30
Pendapatan Transfer Antar Daerah	82.484.595.940,77	66.945.689.034,00	81,16
Pendapatan Bagi Hasil	64.184.595.940,77	56.996.027.384,00	88,80
Bantuan Keuangan	18.300.000.000,00	9.949.661.650,00	54,36
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	82.484.595.940,77	66.945.689.034,00	81,16
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.007.997.901.416,77	911.524.898.170,00	90,42
c. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	19.150.900.000,00	16.632.458.057,00	86,84



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19.150.900.000,00	16.632.458.057,00	86,84
JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	19.150.900.000,00	16.632.458.057,00	86,84
JUMLAH PENDAPATAN	1.099.081.786.981,54	996.589.536.788,56	90,67

Sumber: BKAD Kab. Toraja Utara Tahun 2025

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa kinerja atas peningkatan PAD masih perlu ditingkatkan. Upaya optimalisasi, ekstensifikasi dan intensifikasi peningkatan PAD harus di lakukan agar target yang ditetapkan pada tahun mendatang dapat dicapai serta peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi bidang pendapatan atau organisasi penghasil.

2. Belanja Daerah

URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
BELANJA DAERAH:	1.148.228.310.903,36	1.033.889.371.579,86	90,04
a. BELANJA OPERASI	817.808.410.554,60	751.570.741.872,86	91,90
Belanja Pegawai	563.686.808.927,00	560.977.307.990,25	99,51
Belanja Barang dan Jasa	215.311.955.262,95	161.819.000.456,17	75,15
Belanja Hibah	38.809.646.364,65	28.774.433.426,44	74,14
JUMLAH BELANJA OPERASI	817.808.410.554,60	751.570.741.872,86	91,90
b. BELANJA MODAL	168.898.743.548,76	150.769.955.998,00	89,26
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.227.456.909,76	14.457.868.101,00	71,47
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.443.137.533,00	25.271.890.862,00	99,32
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	118.959.075.417,00	110.850.523.535,00	93,18
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.269.073.689,00	189.673.500,00	4,44
JUMLAH BELANJA MODAL	168.898.743.548,76	150.769.955.998,00	89,26
c. BELANJA TIDAK TERDUGA	950.000.000,00	553.017.042,00	58,21



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Belanja Tidak Terduga	950.000.000,00	553.017.042,00	58,21
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	950.000.000,00	553.017.042,00	58,21
d. BELANJA TRANSFER	160.571.156.800,00	130.995.656.667,00	81,58
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.450.000.000,00	2.438.719.700,00	99,53
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	158.121.156.800,00	128.556.936.967,00	81,30
JUMLAH BELANJA TRANSFER	160.571.156.800,00	130.995.656.667,00	81,58
JUMLAH BELANJA	1.148.228.310.903,36	1.033.889.371.579,86	90,04

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara merupakan perwujudan pertanggung jawaban Tahunan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 dan 2025-2029.

Kinerja seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai dengan sangat baik. Namun demikian, dalam tahun 2025 masih terdapat indikator dalam sasaran yang dicapainya masih perlu diperbaiki sehingga masih perlu mendapat perhatian lebih lanjut untuk diperbaiki dan dipertahankan dalam 2025.

Selain itu, perbaikan atas pengumpulan data kinerja juga harus dilakukan sehingga dapat memberikan data yang akurat yang berguna bagi pengambil keputusan.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Beberapa langkah penting untuk memecahkan permasalahan di atas yang sekaligus akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Rencana Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang ada dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat meningkatkan kinerja yang masih tergolong belum baik.
- Mendorong ketepatan waktu penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan sehingga kinerja sasaran dapat tercapai.
- Meningkatkan profesionalisme aparatur pegawai pemerintah dan pengawasan.
- Mengembangkan sistem informasi pengumpulan data kinerja agar data kinerja yang diperoleh akurat dan berguna bagi pengambil keputusan.
- Mendorong ketepatan waktu penyampaian LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Perangkat Daerah sehingga penyusunan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Kabupaten dapat tepat waktu.

Sebagai penutup, kami pimpinan beserta segenap aparat Pemda Toraja Utara berharap LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban berakuntabilitas dan dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

LAMPIRAN



KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA
**DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI
DESA DAN DAERAH TERTINGGAL**

Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan Telp 021 – 7989925

www.kemendes.go.id

Nomor : B-16/PEI.01.01/II/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyampaian Informasi Pengisian Data Pemeringkatan
BUM Desa/BUM Desa bersama

26 Februari 2026

Yth.

- 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)
Provinsi pada daftar terlampir; dan**
 - 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)
Kabupaten/Kota pada daftar terlampir**
- Di Tempat**

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUM Desa dan BUM Desa bersama dan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2022 tentang Formula Pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama, maka perlu dilaksanakan pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka evaluasi, pembinaan, dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada Kepala Dinas PMD provinsi dan kabupaten/kota (atau sebutan lainnya) untuk melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengisian data pemeringkatan serta menyampaikan kepada seluruh BUM Desa/BUM Desa bersama yang sudah berbadan hukum agar melakukan pengisian data pada sistem pemeringkatan. Adapun ketentuan pengisian data pemeringkatan sebagai berikut:

1. Pengisian data dilaksanakan oleh BUM Desa/BUM Desa bersama pada website:
<http://bumdes.kemendes.go.id/pemeringkatan>
2. Pengisian data dilaksanakan pada tanggal **5 Maret 2026** sampai dengan tanggal **18 April 2026** pukul 23.59 WIB;
3. Peran Dinas PMD provinsi dan kabupaten/kota terdapat pada Panduan Penggunaan Sistem Pemeringkatan BUM Desa dapat diunduh pada link berikut:
https://drive.google.com/drive/folders/16wHTmMKyU59rEsvmY03qL-1J1v1M4-0m?usp=drive_link

Perlu disampaikan bahwa Dinas PMD kabupaten/kota juga berperan untuk melakukan verifikasi data terpilih sebagaimana tercantum pada Panduan Penggunaan Sistem Pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Untuk informasi lebih lanjut terkait pemeringkatan dan pengisian data, dapat menghubungi Sdr. Azhar (081321061987 - Sumatera), Sdri. Puspita (085780225587 - Jawa dan Bali), Sdr. A.M. Suharto (085242733210 - Kalimantan dan Sulawesi), dan Sdri. Anggraini (08129863075 - NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengembangan Ekonomi dan Investasi
Desa dan Daerah Tertinggal,



Drs. Syahrul, M.Si.
NIP. 19690711 199101 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal;
2. Gubernur pada Provinsi daftar terlampir; dan
3. Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota daftar terlampir;
4. Kepala Desa seluruh Indonesia; dan
5. Direktur BUM Desa/BUM Desa bersama seluruh Indonesia.

Lampiran : Daftar Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Nomor : B-16/PEI.01.01/II/2026
Tanggal : 26 Februari 2026

DAFTAR PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

A. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi (atau sebutan lainnya):

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Provinsi Aceh; | 20. Provinsi Kalimantan Tengah; |
| 2. Provinsi Sumatera Utara; | 21. Provinsi Kalimantan Selatan; |
| 3. Provinsi Sumatera Barat; | 22. Provinsi Kalimantan Timur; |
| 4. Provinsi Sumatera Selatan; | 23. Provinsi Kalimantan Utara; |
| 5. Provinsi Riau; | 24. Provinsi Sulawesi Utara; |
| 6. Provinsi Jambi; | 25. Provinsi Sulawesi Tengah; |
| 7. Provinsi Bengkulu; | 26. Provinsi Sulawesi Selatan; |
| 8. Provinsi Lampung; | 27. Provinsi Sulawesi Tenggara; |
| 9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; | 28. Provinsi Sulawesi Barat; |
| 10. Provinsi Kepulauan Riau; | 29. Provinsi Gorontalo; |
| 11. Provinsi Jawa Barat; | 30. Provinsi Maluku; |
| 12. Provinsi Jawa Tengah; | 31. Provinsi Maluku Utara; |
| 13. Provinsi Jawa Timur; | 32. Provinsi Papua; |
| 14. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; | 33. Provinsi Papua Barat; |
| 15. Provinsi Banten; | 34. Provinsi Papua Tengah; |
| 16. Provinsi Bali; | 35. Provinsi Papua Pegunungan; |
| 17. Provinsi Nusa Tenggara Barat; | 36. Provinsi Papua Barat Daya; |
| 18. Provinsi Nusa Tenggara Timur; | 37. Provinsi Papua Selatan; |
| 19. Provinsi Kalimantan Barat; | |

B. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota (atau sebutan lainnya):

1. PROVINSI ACEH

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1) Kab. Aceh Selatan; | 13) Kab. Gayo Lues; |
| 2) Kab. Aceh Tenggara; | 14) Kab. Aceh Jaya; |
| 3) Kab. Aceh Timur; | 15) Kab. Nagan Raya; |
| 4) Kab. Aceh Tengah; | 16) Kab. Aceh Tamiang; |
| 5) Kab. Aceh Barat; | 17) Kab. Bener Meriah; |
| 6) Kab. Aceh Besar; | 18) Kab. Pidie Jaya; |
| 7) Kab. Pidie; | 19) Kota Banda Aceh; |
| 8) Kab. Aceh Utara; | 20) Kota Sabang; |

- 9) Kab. Simeulue;
- 10) Kab. Aceh Singkil;
- 11) Kab. Bireuen;
- 12) Kab. Aceh Barat Daya;

- 21) Kota Langsa;
- 22) Kota Lhokseumawe;
- 23) Kota Subulussalam.

2. PROVINSI SUMATERA UTARA

- 1) Kab. Tapanuli Tengah;
- 2) Kab. Tapanuli Utara;
- 3) Kab. Tapanuli Selatan;
- 4) Kab. Nias;
- 5) Kab. Langkat;
- 6) Kab. Karo;
- 7) Kab. Deli Serdang;
- 8) Kab. Simalungun;
- 9) Kab. Asahan;
- 10) Kab. Labuhan Batu;
- 11) Kab. Dairi;
- 12) Kab. Toba Samosir;
- 13) Kab. Mandailing Natal;
- 14) Kab. Nias Selatan;

- 15) Kab. Pakpak Bharat;
- 16) Kab. Humbang Hasundutan;
- 17) Kab. Samosir;
- 18) Kab. Serdang Bedagai;
- 19) Kab. Batu Bara;
- 20) Kab. Padang Lawas Utara;
- 21) Kab. Padang Lawas;
- 22) Kab. Labuhan Batu Selatan;
- 23) Kab. Labuhan Batu Utara;
- 24) Kab. Nias utara;
- 25) Kab. Nias Barat;
- 26) Kota Gunungsitoli;
- 27) Kota Padangsidimpuan.

3. PROVINSI SUMATERA BARAT

- 1) Kab. Pesisir Selatan;
- 2) Kab. Solok;
- 3) Kab. Sijunjung;
- 4) Kab. Tanah Datar;
- 5) Kab. Padang Pariaman;
- 6) Kab. Agam;
- 7) Kab. Solok Selatan;

- 8) Kab. Pasaman Barat.
- 9) Kab. Lima Puluh Kota;
- 10) Kab. Pasaman;
- 11) Kab. Kepulauan Mentawai;
- 12) Kab. Dharmasraya;
- 13) Kota Sawah Lunto;
- 14) Kota Pariaman.

4. PROVINSI RIAU

- 1) Kab. Kampar;
- 2) Kab. Indragiri Hulu;
- 3) Kab. Bengkalis;
- 4) Kab. Indragiri Hilir;
- 5) Kab. Pelalawan;

- 6) Kab. Rokan Hulu;
- 7) Kab. Siak;
- 8) Kab. Kuantan Singingi;
- 9) Kab. Kepulauan Meranti;
- 10) Kab. Rokan Hilir.

5. PROVINSI JAMBI

- 1) Kab. Kerinci;
- 2) Kab. Merangin;
- 3) Kab. Sarolangun;
- 4) Kab. Batanghari;
- 5) Kab. Muaro Jambi;

- 6) Kab. Tanjung Jabung Barat;
- 7) Kab. Tanjung Jabung Timur;
- 8) Kab. Bungo;
- 9) Kab. Tebo;
- 10) Kota Sungai Penuh.

6. PROVINSI SUMATERA SELATAN

- 1) Kab. Ogan Komering Ulu;
- 2) Kab. Ogan Komering Ilir;

- 8) Kab. Ogan Komering Ulu Timur;
- 9) Kab. Ogan Komering Ulu Selatan;

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 3) Kab. Muara Enim; | 10) Kab. Ogan Ilir; |
| 4) Kab. Lahat; | 11) Kab. Empat Lawang; |
| 5) Kab. Musi Rawas; | 12) Kab. Penukal Arab Lematang Ilir; |
| 6) Kab. Musi Banyuasin; | 13) Kab. Musi Rawas Utara; |
| 7) Kab. Banyuasin; | 14) Kota Prabumulih. |

7. PROVINSI BENGKULU

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1) Kab. Bengkulu Selatan; | 6) Kab. Muko Muko; |
| 2) Kab. Rejang Lebong; | 7) Kab. Lebong; |
| 3) Kab. Bengkulu Utara; | 8) Kab. Kepahiang; |
| 4) Kab. Kaur; | 9) Kab. Bengkulu Tengah. |
| 5) Kab. Seluma; | |

8. PROVINSI LAMPUNG

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Kab. Lampung Selatan; | 8) Kab. Way Kanan; |
| 2) Kab. Lampung Tengah; | 9) Kab. Pesawaran; |
| 3) Kab. Lampung Utara; | 10) Kab. Pringsewu; |
| 4) Kab. Lampung Barat; | 11) Kab. Mesuji; |
| 5) Kab. Tulang Bawang; | 12) Kab. Tulang Bawang Barat; |
| 6) Kab. Tanggamus; | 13) Kab. Pesisir Barat. |
| 7) Kab. Lampung timur; | |

9. PROVINSI KEPULAUAN BABEL

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1) Kab. Bangka; | 4) Kab. Bangka Barat; |
| 2) Kab. Belitung; | 5) Kab. Belitung Timur; |
| 3) Kab. Bangka Tengah; | 6) Kab. Belitung Selatan. |

10. PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- | | |
|------------------|----------------------------|
| 1) Kab. Bintan; | 4) Kab. Lingga; |
| 2) Kab. Karimun; | 5) Kab. Kepulauan Anambas. |
| 3) Kab. Natuna; | |

11. PROVINSI JAWA BARAT

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1) Kab. Bogor; | 11) Kab. Majalengka; |
| 2) Kab. Sukabumi; | 12) Kab. Sumedang; |
| 3) Kab. Cianjur; | 13) Kab. Indramayu; |
| 4) Kab. Bandung; | 14) Kab. Subang; |
| 5) Kab. Garut; | 15) Kab. Purwakarta; |
| 6) Kab. Tasikmalaya; | 16) Kab. Karawang; |
| 7) Kab. Ciamis; | 17) Kab. Bekasi; |
| 8) Kab. Pangandaran; | 18) Kab. Bandung Barat; |
| 9) Kab. Kuningan; | 19) Kota Banjar. |
| 10) Kab. Cirebon; | |

12. PROVINSI JAWA TENGAH

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1) Kab. Cilacap; | 16) Kab. Blora; |
| 2) Kab. Banyumas; | 17) Kab. Rembang; |

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 3) Kab. Purbalingga; | 18) Kab. Pati; |
| 4) Kab. Banjarnegara; | 19) Kab. Kudus; |
| 5) Kab. Kebumen; | 20) Kab. Jepara; |
| 6) Kab. Purworejo; | 21) Kab. Demak; |
| 7) Kab. Wonosobo; | 22) Kab. Semarang; |
| 8) Kab. Magelang; | 23) Kab. Temanggung; |
| 9) Kab. Boyolali; | 24) Kab. Kendal; |
| 10) Kab. Klaten; | 25) Kab. Batang; |
| 11) Kab. Sukoharjo; | 26) Kab. Pekalongan; |
| 12) Kab. Wonogiri; | 27) Kab. Pemalang; |
| 13) Kab. Karanganyar; | 28) Kab. Tegal; |
| 14) Kab. Sragen; | 29) Kab. Brebes. |
| 15) Kab. Grobogan; | |

13.PROVINSI DI YOGYAKARTA

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1) Kab. Kulon Progo; | 3) Kab. Gunung Kidul; |
| 2) Kab. Bantul; | 4) Kab. Sleman |

14.PROVINSI JAWA TIMUR

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1) Kab. Pacitan; | 16) Kab. Mojokerto; |
| 2) Kab. Ponorogo; | 17) Kab. Jombang; |
| 3) Kab. Trenggalek; | 18) Kab. Nganjuk; |
| 4) Kab. Tulungagung; | 19) Kab. Madiun; |
| 5) Kab. Blitar; | 20) Kab. Magetan; |
| 6) Kab. Kediri; | 21) Kab. Ngawi; |
| 7) Kab. Malang; | 22) Kab. Bojonegoro; |
| 8) Kab. Lumajang; | 23) Kab. Tuban; |
| 9) Kab. Jember; | 24) Kab. Lamongan; |
| 10) Kab. Banyuwangi; | 25) Kab. Gresik; |
| 11) Kab. Bondowoso; | 26) Kab. Bangkalan; |
| 12) Kab. Situbondo; | 27) Kab. Sampang; |
| 13) Kab. Probolinggo; | 28) Kab. Pamekasan; |
| 14) Kab. Pasuruan; | 29) Kab. Sumenep; |
| 15) Kab. Sidoarjo; | 30) Kota Batu. |

15.PROVINSI BANTEN

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1) Kab. Pandeglang; | 3) Kab. Tangerang; |
| 2) Kab. Lebak; | 4) Kab. Serang. |

16.PROVINSI BALI

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1) Kab. Jembrana; | 6) Kab. Bangli; |
| 2) Kab. Tabanan; | 7) Kab. Karangasem; |
| 3) Kab. Badung; | 8) Kab. Buleleng; |
| 4) Kab. Gianyar; | 9) Kota Denpasar. |
| 5) Kab. Klungkung; | |

17.PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1) Kab. Lombok Barat; | 5) Kab. Dompu; |
| 2) Kab. Lombok Tengah; | 6) Kab. Bima; |
| 3) Kab. Lombok Timur; | 7) Kab. Sumbawa Barat; |
| 4) Kab. Sumbawa; | 8) Kab. Lombok Utara. |

18.PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1) Kab. Kupang | 12) Kab. Sumba Timur |
| 2) Kab. Timor Tengah Selatan | 13) Kab. Sumba Barat |
| 3) Kab. Timor Tengah Utara | 14) Kab. Lembata |
| 4) Kab. Belu | 15) Kab. Rote Ndao |
| 5) Kab. Malaka | 16) Kab. Manggarai Barat |
| 6) Kab. Alor | 17) Kab. Nagekeo |
| 7) Kab. Flores Timur | 18) Kab. Sumba Tengah |
| 8) Kab. Sikka | 19) Kab. Sumba Barat Daya |
| 9) Kab. Ende | 20) Kab. Manggarai Timur |
| 10) Kab. Ngada | 21) Kab. Sabu Raijua |
| 11) Kab. Manggarai | |

19. PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1) Kab. Sambas; | 7) Kab. Bengkayang; |
| 2) Kab. Mempawah; | 8) Kab. Landak; |
| 3) Kab. Sanggau; | 9) Kab. Sekadau; |
| 4) Kab. Ketapang; | 10) Kab. Melawi; |
| 5) Kab. Sintang; | 11) Kab. Kayong Utara; |
| 6) Kab. Kapuas Hulu; | 12) Kab. Kubu Raya. |

20.PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1) Kab. Kotawaringin Barat | 8) Kab. Sukamara |
| 2) Kab. Kotawaringin Timur | 9) Kab. Lamandau |
| 3) Kab. Kapuas | 10) Kab. Gunung Mas |
| 4) Kab. Barito Selatan | 11) Kab. Pulang Pisau |
| 5) Kab. Barito Utara | 12) Kab. Murung Raya |
| 6) Kab. Katingan | 13) Kab. Barito Timur |
| 7) Kab. Seruyan | |

21.PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1) Kab. Tanah Laut; | 7) Kab. Hulu Sungai Tengah; |
| 2) Kab. Kotabaru; | 8) Kab. Hulu Sungai Utara; |
| 3) Kab. Banjar; | 9) Kab. Tanah Bumbu; |
| 4) Kab. Barito Kuala; | 10) Kab. Balangan; |
| 5) Kab. Tapin; | 11) Kab. Tabalong. |
| 6) Kab. Hulu Sungai Selatan; | |

22.PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1) Kab. Paser | 5) Kab. Kutai Timur |
| 2) Kab. Kutai Kartanegara | 6) Kab. Penajam Paser Utara |
| 3) Kab. Berau | 7v Kab. Mahakam Ulu |
| 4) Kab. Kutai Barat | |

23.PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1) Kab. Bulungan | 3) Kab. Nunukan |
| 2) Kab. Malinau | 4) Kab. Tana Tidung |

24.PROVINSI SULAWESI UTARA

- | | |
|---------------------------|--|
| 1) Kab. Bolaang Mongondow | 7) Kab. Minahasa Tenggara |
| 2) Kab. Minahasa | 8) Kab. Bolaang Mongondow Utara |
| 3) Kab. Kepulauan Sangihe | 9) Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro |
| 4) Kab. Kepulauan Talaud | 10) Kab. Bolaang Mongondow Timur |
| 5) Kab. Minahasa Selatan | 11) Kab. Bolaang Mongondow Selatan |
| 6) Kab. Minahasan Utara | 12) Kota Mobagu. |

25.PROVINSI SULAWESI TENGAH

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| 1) Kab. Banggai | 7) Kab. Banggai Kepulauan |
| 2) Kab. Poso | 8) Kab. Parigi Moutong |
| 3) Kab. Donggala | 9) Kab. Tojo Una Una |
| 4) Kab. Toli Toli | 10) Kab. Sigi |
| 5) Kab. Buol | 11) Kab. Banggai Laut |
| 6) Kab. Morowali | 12) Kab. Morowali Utara |

26.PROVINSI SULAWESI SELATAN

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1) Kab. Kepulauan Selayar | 12) Kab. Soppeng |
| 2) Kab. Bulukumba | 13) Kab. Wajo |
| 3) Kab. Bantaeng | 14) Kab. Sindereng Rappang |
| 4) Kab. Janeponto | 15) Kab. Pinrang |
| 5) Kab. Takalar | 16) Kab. Enrekang |
| 6) Kab. Gowa | 17) Kab. Luwu |
| 7) Kab. Sinjai | 18) Kab. Tana Toraja |
| 8) Kab. Bone | 19) Kab. Luwu Utara |
| 9) Kab. Maros | 20) Kab. Luwu Timur |
| 10) Kab. Pangkajene Kepulauan | 21) Kab. Toraja Utara |
| 11) Kab. Barru | |

27.PROVINSI SULAWESI TENGGAH

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1) Kab. Kolaka | 9) Kab. Konawe Utara |
| 2) Kab. Konawe | 10) Kab. Buton Utara |
| 3) Kab. Muna | 11) Kab. Kolaka Timur |
| 4) Kab. Buton | 12) Kab. Konawe Kepulauan |
| 5) Kab. Konawe Selatan | 13) Kab. Muna Barat |
| 6) Kab. Bombana | 14) Kab. Buton Tengah |

- 7) Kab. Wakatobi
- 8) Kab. Kolaka Utara

- 15) Kab. Buton Selatan

28.PROVINSI GORONTALO

- 1) Kab. Gorontalo
- 2) Kab. Boalemo
- 3) Kab. Bone Bolango

- 4) Kab. Pahuwato
- 5) Kab. Gorontalo Utara

29.PROVINSI SULAWESI BARAT

- 1) Kab. Mamuju Utara
- 2) Kab. Mamuju
- 3) Kab. Mamasa

- 4) Kab. Polewali Mandar
- 5) Kab. Majene
- 6) Kab. Mamuju Tengah

30.PROVINSI MALUKU

- 1) Kab. Maluku Tengah;
- 2) Kab. Maluku Tenggara;
- 3) Kab. Maluku Tenggara Barat;
- 4) Kab. Buru;
- 5) Kab. Buru Selatan.
- 6) Kab. Seram Bagian Timur;

- 7) Kab. Seram Bagian Barat;
- 8) Kab. Kepulauan Aru;
- 9) Kab. Maluku Barat Daya;
- 10) Kota Ambon
- 11) Kota Tual

31.PROVINSI MALUKU UTARA

- 1) Kab. Halmahera Barat;
- 2) Kab. Halmahera Tengah;
- 3) Kab. Halmahera Utara;
- 4) Kab. Halmahera Selatan;
- 5) Kab. Pulau Morotai;

- 6) Kab. Halmahera Timur;
- 7) Kab. Pulau Morotai;
- 8) Kab. Kepulauan Sula;
- 9) Kota Tidore Kepulauan

32.PROVINSI PAPUA

- 1) Kab. Jayapura;
- 2) Kab. Kepulauan Yapen;
- 3) Kab. Biak Numfor;
- 4) Kab. Sarmi;
- 5) Kab. Keerom;

- 6) Kab. Waropen;
- 7) Kab. Supiori;
- 8) Kab. Mamberamo Raya;
- 9) Kota Jayapura.

33.PROVINSI PAPUA TENGAH

- 1) Kab. Deiyai;
- 2) Kab. Dogiyai;
- 3) Kab. Intan Jaya;
- 4) Kab. Mimika;

- 5) Kab. Nabire;
- 6) Kab. Paniai;
- 7) Kab. Puncak;
- 8) Kab. Puncak Jaya.

34.PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

- 1) Kab. Jayawijaya;
- 2) Kab. Lanny Jaya;
- 3) Kab. Mamberamo Tengah;
- 4) Kab. Nduga;

- 5) Kab. Pegunungan Bintang;
- 6) Kab. Tolikara;
- 7) Kab. Yalimo;
- 8) Kab. Yahukimo.

35.PROVINSI PAPUA SELATAN

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) Kab. Asmat; | 3) Kab. Mappi; |
| 2) Kab. Boven Digoel; | 4) Kab. Merauke; |

36.PROVINSI PAPUA BARAT

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1) Kab. Manokwari Selatan; | 5) Kab. Teluk Bintuni; |
| 2) Kab. Manokwari; | 6) Kab. Teluk Wondama; |
| 3) Kab. Pegunungan Arfak; | 7) Kab. Kaimana. |
| 4) Kab. Fak Fak; | |

37.PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1) Kab. Maybrat. | 4) Kab. Sorong Selatan; |
| 2) Kab. Raja Ampat; | 5) Kab. Tambrau. |
| 3) Kab. Sorong; | |

Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengembangan Ekonomi dan Investasi
Desa dan Daerah Tertinggal,



Drs. Syahrul, M.Si.
NIP. 19690711 199101 1 001